



BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Jl. MT. Haryono Kav 45-46 Jakarta 12770 Telp.(021) 22791400

Home page :www.dephub.go.id

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (LAKIP)

BPTJ

TAHUN 2019



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2019 ini bisa diselesaikan pada waktunya.

Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Tahun 2019. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pertanggungjawaban yang memuat gambaran keberhasilan baik makro maupun mikro, langkah-langkah pelaksanaan kebijakan dan program yang telah dilaksanakan, dan kendala dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain itu, laporan kinerja ini juga berperan sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja secara terukur, serta alat untuk mendorong peningkatan kinerja demi terwujudnya *good governance* di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Kinerja tersebut diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019.

Berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, telah dapat tercapai kemajuan yang cukup signifikan. Meskipun sangat disadari bahwa dalam laporan ini masih dijumpai sejumlah kekurangan, namun diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan umpan balik bagi jajaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Ungkapan terima kasih dan apresiasi yang tulus kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2019 ini.

Jakarta, 10 Februari 2020

KEPALA
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK



POLANA B. PRAMESTI

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19611102 198703 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2019 ini bisa diselesaikan pada waktunya.

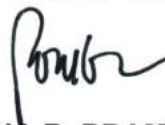
Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Tahun 2019. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pertanggungjawaban yang memuat gambaran keberhasilan baik makro maupun mikro, langkah-langkah pelaksanaan kebijakan dan program yang telah dilaksanakan, dan kendala dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain itu, laporan kinerja ini juga berperan sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja secara terukur, serta alat untuk mendorong peningkatan kinerja demi terwujudnya *good governance* di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Kinerja tersebut diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019.

Berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, telah dapat tercapai kemajuan yang cukup signifikan. Meskipun sangat disadari bahwa dalam laporan ini masih dijumpai sejumlah kekurangan, namun diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan umpan balik bagi jajaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Ungkapan terima kasih dan apresiasi yang tulus kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2019 ini.

Jakarta, 10 Februari 2020

KEPALA
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK



POLANA B. PRAMESTI

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19611102 198703 2 001

No	Proses	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Disusun	Sekretaris BPTJ	10-2-2020	
2.	Diperiksa	Direktur Prasarana BPTJ	10-2-2020	
3.	Diperiksa	Direktur Lalu Lintas BPTJ	10-2-2020	
4.	Diperiksa	Direktur Angkutan BPTJ	10-2-2020	

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 LATAR BELAKANG.....	1
I.2 TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA.....	2
I.3 STRUKTUR ORGANISASI BPTJ.....	3
I.4 SUMBER DAYA MANUSIA BPTJ.....	7
I.5 POTENSI, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN.....	9
I.6 SISTEMATIKA PELAPORAN.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	16
II.1 URAIAN SINGKAT PERENCANAAN STRATEGIS (ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS NASIONAL).....	16
II.2 PERJANJIAN KINERJA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK 2019.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
III.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA	29
III.2 PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	30
III.3 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	44
III.4 CAPAIAN KEBERHASILAN KINERJA BPTJ.....	55
III.5 CAPAIAN KEBERHASILAN KINERJA LAINNYA UNIT KERJA.....	63
III.6 REALISASI ANGGARAN.....	104
BAB IV PENUTUP.....	110
IV.1 KESIMPULAN.....	110
IV.2 SARAN.....	112

IV.3 TINDAK LANJUT ATAS HASIL EVALUASI.....	114
LAMPIRAN	115
Lampiran I. CAPAIAN TAHUN 2019.....	115
Lampiran II. REKAPITULASI REALISASI DAYA SERAP TA.2019.....	124
Lampiran III. RENCANA KINERJA TAHUN 2019.....	126
Lampiran IV. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019.....	127
Lampiran V. REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019.....	128

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel I.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Kerja	7
Tabel I.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon	9
Tabel II.1 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kementerian Perhubungan Tahun 2019.....	17
Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2019.....	17
Tabel II.3 Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.....	28
Tabel III.1 Realisasi Kinerja Terhadap Target Perjanjian Kinerja BPTJ Tahun 2019.....	30
Tabel III.2 Jumlah Perjalanan Per Jenis Kendaraan Di Wilayah Jabodetabek Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019.....	33
Tabel III.2 Jumlah Perjalanan Per Jenis Kendaraan Di Wilayah Jabodetabek Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019.....	33
Tabel III.2 Jumlah Perjalanan Per Jenis Kendaraan Di Wilayah Jabodetabek Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019.....	33
Tabel III.3 Jumlah Perjalanan Per JenisCapaian kecepatan rata-rata kendaraan umum JAC, JRC dan Transjabodetabek Sampai Dengan Tahun 2019.....	35
Tabel III.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Periode Tahun 2017-2019 terhadap Target Kinerja Tahun 2017-2019.....	41
Tabel III.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Terhadap Target Kinerja 2019 dalam Renstra Periode Tahun 2016-2019.....	42
Tabel III.6 Capaian Kinerja terhadap Realisasi Anggaran Sekretariat BPTJ Tahun 2019.....	45
Tabel III.7 Capaian Kinerja terhadap Realisasi Anggaran Prasarana BPTJ Tahun 2019.....	50
Tabel III.8 Capaian Kinerja terhadap Realisasi Anggaran Lalu-Lintas BPTJ Tahun 2019.....	51
Tabel III.9 Capaian Kinerja terhadap Realisasi Anggaran Angkutan BPTJ Tahun 2019.....	55

Tabel III.10 Capaian Keberhasilan Kinerja BPTJ.....	55
Tabel III.11 Titik Pantauan ATCS di Wilayah Jabodetabek.....	69
Tabel III.12 Analisa Tingkat Pelayanan Terminal Tipe A Jabodetabek.....	76
Tabel III.13 Pagu Anggaran BPTJ Tahun 2017-2019 dan Realisasi Anggaran BPTJ Tahun 2017 – 2019.....	104
Tabel III.14 Penyerapan Keuangan BPTJ Per Jenis Belanja Tahun 2019.....	105
Tabel III.15 Dana Tidak Terserap pada Sekretariat BPTJ Berdasarkan Jenis Belanja.....	105
Tabel III.16 Analisa Dana yang Tidak Terserap oleh Direktorat Prasarana.....	106
Tabel III.17 Analisa Dana yang Tidak Terserap oleh Direktorat Lalu Lintas.....	106
Tabel III.18 Analisa Dana yang Tidak Terserap oleh Direktorat Angkutan.....	108

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar I.1 Struktur Organisasi BPTJ	7
Gambar I.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender.....	8
Gambar I.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	8
Gambar III.1 Persentase Jenis Pengguna Kendaraan Di Wilayah Jabodetabek..	32
Gambar III.2 Capaian IK 1. Modal share terhadap target triwulan I s.d IV tahun 2019.....	33
Gambar III.3 Capaian IK 1. Persentase Penurunan Jumlah Kecelakaan dengan Menggunakan Angkutan Umum terhadap target triwulan I s.d IV tahun 2019.....	35
Gambar III.4 Capaian IK 3. Kecepatan rata – rata kendaraan umum terhadap target triwulan I s.d IV tahun 2019.....	38
Gambar III.5 Capaian IK 5. Rasio konektivitas antar wilayah terhadap target triwulan I s.d IV tahun 2019.....	40
Gambar III.6 Diagram Ratio Target dan Capaian IK4 BPTJ 2019 pada Renstra Kemenhub 2017-2019.....	43
Gambar III.7 Diagram Ratio Target dan Capaian IK3 BPTJ 2019 pada Renstra Kemenhub 2017-2019.....	43
Gambar III.8 Diagram Ratio Target dan Capaian IK1 BPTJ 2019 pada Renstra Kemenhub 2017-2019.....	44
Gambar III.9 Pengarahan Penataan Organisasi dan Reformasi Birokrasi BPTJ oleh Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Perhubungan.....	64
Gambar III.10 Capacity Building SDM BPTJ.....	64
Gambar III.11 Koordinasi Proses Verifikasi Berkas Pelamar.....	65
Gambar III.12 Pengembangan Karakter Bagi Pegawai Non ASN di Lingkungan BPTJ.....	65
Gambar III.13 Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).....	66
Gambar III.14 Koordinasi Penilaian Maturitas SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan.....	67

Gambar III.15 Pelaksanaan Monitoring Kebijakan Penanganan Ganjil Genap di Gerbang Tol di Wilayah Jabodetabek.....	68
Gambar III.16 Hasil Pemantauan ATCS di Simpang Terminal Parung Kabupaten Bogor.....	70
Gambar III.17 Hasil Pemantauan ATCS di Simpang Pal UI Depok.....	70
Gambar III.18 Hasil Pemantauan ATCS di Simpang Rawa Panjang Kota Bekasi.	70
Gambar III.19 Prototype Aplikasi Analisa Dampak Lalu Lintas.....	72
Gambar III.20 Pelaksanaan Penyusunan Studi Trase LRT Cibubur – Baranangsiang.....	73
Gambar III.21 Rapat Pembangunan e-SPT dan perangkat <i>SMS Gateway</i>	74
Gambar III.22 Koordinasi Perencanaan Teknis Pengembangan MAT Jabodetabek Tahun 2019.....	75
Gambar III.23 Pengembangan Aplikasi dan Pengadaan <i>Hardware E-Ticketing</i>	75
Gambar III.24 Monitoring dan Evaluasi SPM Terminal Penumpang Angkutan Jalan.....	76
Gambar III.25 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Terminal Tipe A di Jabodetabek..	78
Gambar III.26 Pelaksanaan Survey Fasilitas Pendukung.....	79
Gambar III.27 Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimum Stasiun Kereta Api.....	81
Gambar III.28 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Integrasi Moda dan Pengembangan Kawasan Bertransit Angkutan Umum.....	84
Gambar III.29 Kegiatan Bimbingan Teknis Integrasi Prasarana Transportasi Jalan dan Perkeretaapian.....	86
Gambar III.30 KPBU dalam Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe A Jabodetabek.....	87
Gambar III.31 Pemberian Penghargaan Pramudi dan Tes Praktek Pramudi.....	94
Gambar III.32 Pemberian Penghargaan Kepada Operator Angkutan Terbaik.....	96
Gambar III.33 Rekap Jumlah Kendaraan yang Melanggar.....	98
Gambar III.34 Diagram Prosentase Pelanggaran.....	98
Gambar III.35 Penegakan Hukum Angkutan Umum Bandara Soekarno-Hatta....	99

Gambar III.36 Rekapitulasi Kegiatan Rampcheck Angkutan Lebaran Tahun 2019/1440 H Periode 29 Mei S.D 13 Juni 2019.....	101
Gambar III.37 Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan LLAJ yang dilakukan oleh Personil PKB Tangerang Selatan di Terminal Pondok Cabe.....	102
Gambar III.38 Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019.....	103
Gambar III.39 Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019 di Terminal Pulo Gebang.....	103

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Tahun 2019. Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai **pengungkapan capaian kinerja BPTJ selama tahun 2019**, berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan diawal pembentukan BPTJ dalam **Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2019**. Komitmen dimaksud merupakan fokus BPTJ dalam mencapai tingkat kinerja yang tertuang di dalam rumusan **tujuan dan sasaran**. Laporan Kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2019 disusun sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan maupun kekurangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama tahun anggaran 2019 berdasarkan tujuan dan sasaran BPTJ yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Tahun 2019 adalah gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2019 dikaitkan dengan upaya-upaya strategis dan operasional yang telah dilakukan oleh BPTJ dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, melalui pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2016-2019. Untuk mengukur capaian kinerja dari setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran strategis dilakukan Pengukuran Capaian Kinerja. Capaian kinerja (*performance result*) tahun anggaran 2019 dibandingkan dengan rencana kerja (*performance plan*) yang telah disesuaikan dengan DIPA T.A. 2019 berikut revisinya, sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan Badan Pengelola Transportasi

Jabodetabek. Analisis atas capaian kinerja tahun 2019 terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

I.2 TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Pasal 2 dan Pasal 3, terdiri dari :

1.2.1 Tugas

BPTJ mempunyai tugas mengembangkan, mengelola dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan menerapkan tata kelola organisasi yang baik.

1.2.2 Fungsi

- a. Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana umum dan rencana program kegiatan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi berdasarkan Rencana Induk Transportasi Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi,
- b. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kebutuhan anggaran dalam rangka pelaksanaan rencana umum dan rencana program kegiatan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi,
- c. Fasilitasi teknis, pembiayaan, dan/ atau manajemen dalam rangka peningkatan penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi,
- d. fasilitasi teknis, pembiayaan, dan/atau manajemen dalam rangka pengembangan serta peningkatan sarana dan prasarana penunjang penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi,
- e. Fasilitasi teknis, pembiayaan, dan atau manajemen dalam rangka pelaksanaan manajemen permintaan lalu lintas di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi,
- f. Penyusunan rencana pelaksanaan, perencanaan kebutuhan anggaran, dan pelaksanaan program kegiatan transportasi dalam Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok,

Tangerang, dan Bekasi yang tidak termasuk dalam rencana umum dan rencana program kegiatan transportasi dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah,

- g. Penyiapan bahan usulan regulasi dan kebijakan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi,
- h. Pemberian rekomendasi penataan ruang yang berorientasi angkutan umum massal,
- i. Pemberian perizinan angkutan umum yang melampaui batas provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi,
- j. Pemberian rekomendasi untuk angkutan terusan (feeder Service),
- k. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan rencana umum serta program pengembangan dan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi,
- l. Melakukan koreksi dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang dilakukan oleh instansi, operator, dan pihak lainnya, dan
- m. pelaksanaan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

I.3 STRUKTUR ORGANISASI BPTJ

Susunan dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek terdiri dari :

1.3.1 Sekretariat

- a. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan, dukungan teknis, dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan BPTJ.
- b. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana dan program, pelaksanaan anggaran, pengelolaan Barang Milik Negara, serta evaluasi dan pelaporan,

- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang undangan, pelaksanaan dokumentasi dan sosialisasi peraturan, penyusunan perjanjian dan kerjasama antar lembaga, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum,
- Penyiapan pelaksanaan manajemen kepegawaian, penyusunan organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, administrasi perkantoran, kearsipan serta urusan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan umum, dan
- Penyiapan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, komunikasi dan informasi publik, edukasi, publikasi dan dokumentasi, serta pelayanan informasi dan dokumentasi.

1.3.2 Direktorat Prasarana

- a. Direktorat Prasarana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan regulasi dan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi darat, perkeretaapian, serta integrasi prasarana transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
- b. Dalam melaksanakan tugas Direktorat Prasarana menyelenggarakan fungsi :
 - Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi darat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi,
 - Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi perkeretaapian di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, dan
 - Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan

pelaporan di bidang integrasi prasarana transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

1.3.3 Direktorat Lalu Lintas

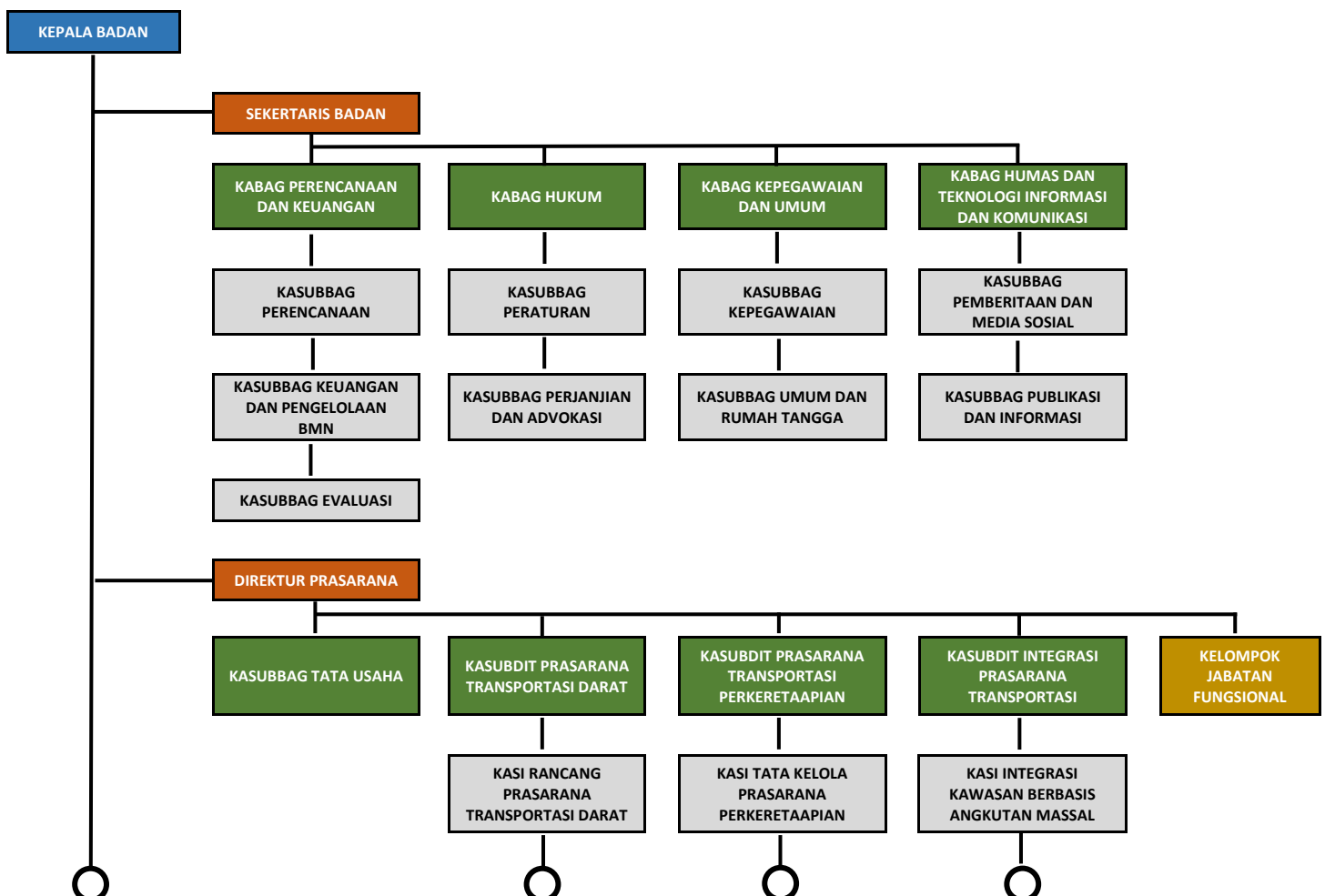
- a. Direktorat Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas transportasi darat, lalu lintas transportasi perkeretaapian, serta pengembangan sistem dan informasi transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
- b. Dalam melaksanakan tugas Direktorat Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi :
 - Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas transportasi darat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi,
 - Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas transportasi perkeretaapian di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, dan
 - Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem dan informasi transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

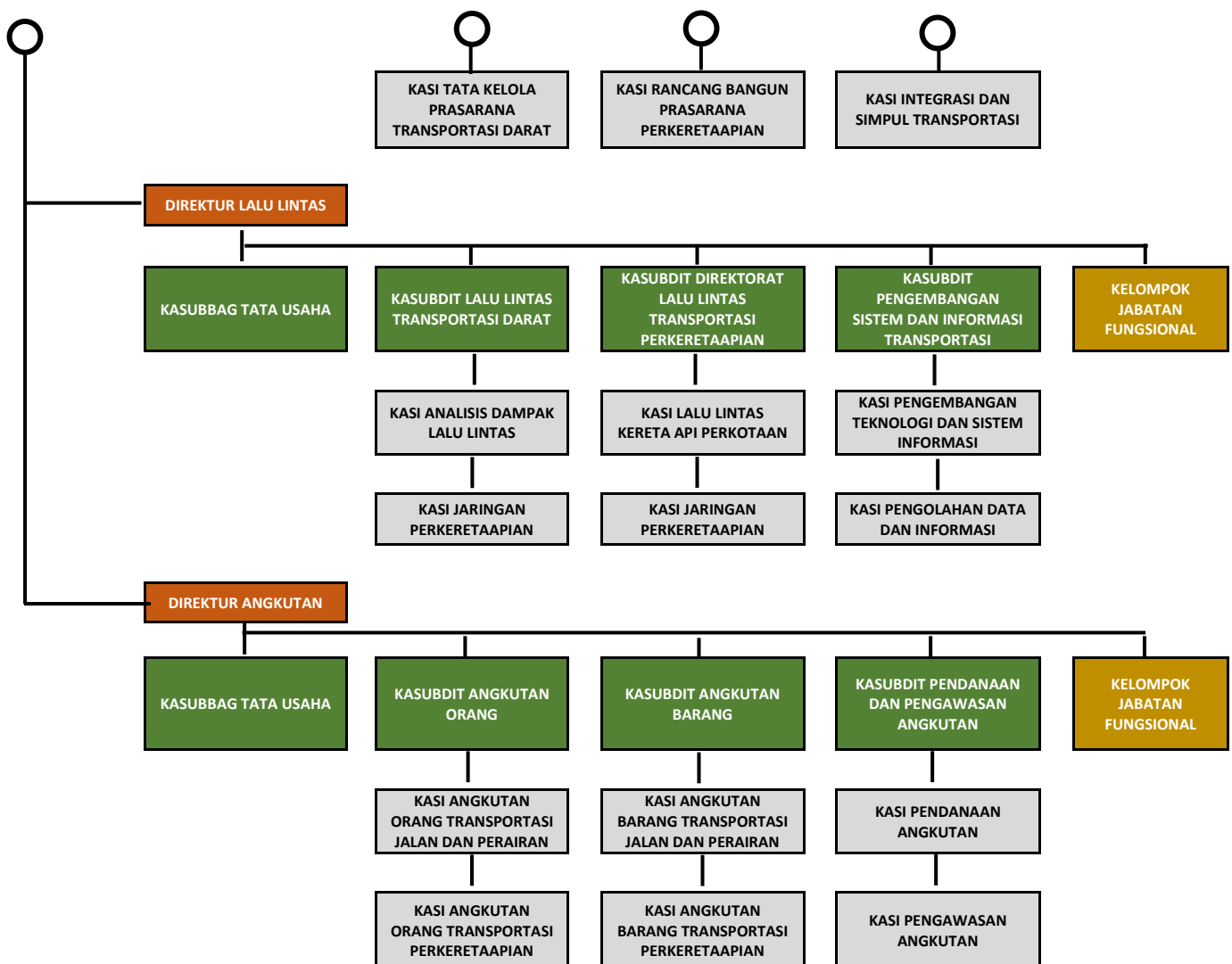
1.3.4 Direktorat Angkutan

- a. Direktorat Angkutan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang, angkutan barang, serta pengawasan angkutan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
- b. Dalam melaksanakan tugas Direktorat Angkutan menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi,
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan barang di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, dan
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pendanaan dan pengawasan angkutan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Struktur Organisasi BPTJ terdiri dari :





Sumber : Lampiran PM. 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPTJ

Gambar I.1 Struktur Organisasi BPTJ

I.4 SUMBER DAYA MANUSIA BPTJ

Dalam menjalankan tugasnya, pada tahun 2019 Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek didukung oleh 146 orang Pegawai Negeri Sipil, komposisi pegawai Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek disajikan sebagaimana tabel berikut :

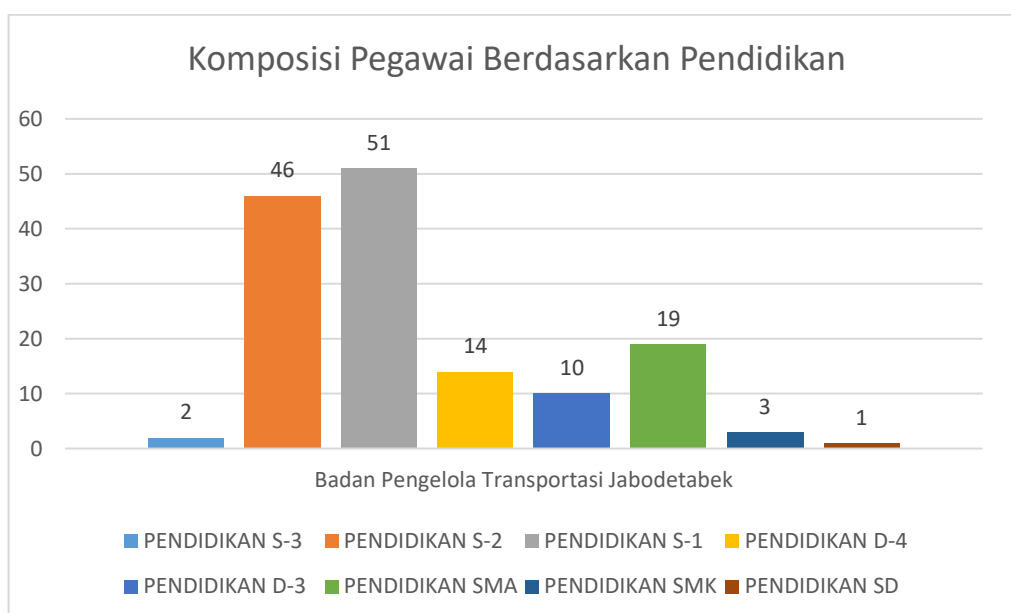
Tabel I.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

UNIT KERJA	PNS	PPNP	CARAKA	PRAMUBAKTI	SECURITY	PENGEMUDI
Sekretariat	45	22	5	13	11	5
Dit. Prasarana	25	14	3	0	0	0
Dit. Lalu - lintas	26	12	7	0	0	0
Dit. Angkutan	27	13	8	0	0	0
Satker	0	7	2	0	0	0
T. Pondok Cabe	1	15	3	8	8	0

UNIT KERJA	PNS	PPNP	CARAKA	PRAMUBAKTI	SECURITY	PENGEMUDI
T. Jatijajar	7	18	2	9	10	0
T. Poris Plawad	2	14	2	7	12	0
T. Baranangsiang	13	23	2	10	9	0
TOTAL	146	138	34	47	50	5



Gambar I.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender



Gambar I.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Tabel I.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon

UNIT	ESELON				JUMLAH
	I	II	III	IV	
Badan Pengelola Trans Jabodetabek	1	4	12	29	46

Keterangan: Jumlah pegawai berdasarkan Eselon saat ini ada sebanyak 46 pejabat, ada 2 (dua) jabatan struktural yang kosong Eselon III sebanyak 1 (satu) jabatan dan Eselon IV sebanyak 1 (satu) jabatan.

I.5 POTENSI, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

1.5.1 Potensi

Kementerian Perhubungan telah menetapkan susunan struktur organisasi Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (BPTJ). Susunan struktur organisasi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (BPTJ). Pembentukan BPTJ merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 yang telah ditetapkan pada 18 September 2015.

Dengan PM 110 Tahun 2018 maka memberikan kewenangan kepada BPTJ dalam mengelola penyelenggaraan transportasi Jabodetabek telah sehingga dilakukan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan lainnya terkait penyelenggaraan transportasi Jabodetabek, salah satunya dengan mencabut PM 66 tahun 2016 tentang pendelegasian wewenang Menteri Perhubungan kepada Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

1.5.2 Isu Strategis

Pada Rapat terbatas (RATAS) Presiden dengan sejumlah Menteri yang membahas mengenai pengelolaan transportasi Jabodetabek beserta peran BPTJ dalam menangannya telah diselenggarakan beberapa kali pada tahun 2019. Alhasil didapati bahwa diperlukan adanya koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan rencana pembangunan dan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kota/kabupaten terhadap Rencana Induk Transportasi Jabodetabek sesuai dengan Perpres Nomor 55 Tahun 2018 sebagai pedoman penyelenggaraan transportasi Jabodetabek yang terintegrasi dengan berkoordinasi dengan BPTJ. Hal ini kian memperkuat posisi BPTJ dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan, pembangunan dan pengelolaan transportasi di Wilayah Jabodetabek bersama-sama dengan Pemerintah Daerah terkait dan Kementerian/Lembaga lainnya.

Selain itu yang menjadi Isu strategis yang berkembang pada proses pembangunan transportasi tahun 2019 sebagai berikut :

a. **Cikarang Bekasi Laut Inland Waterway**

Proyek Cikarang Bekasi Laut akan menjadi *pilot project* yang mengimplementasikan transportasi multimoda dalam aktivitas logistik nasional (pendistribusian barang menuju ke tempat tujuan akhir) dengan moda transportasi alternatif lain selain jalan raya. Dengan pemanfaatan banjir kanal, sebagian kargo yang biasanya ditransportasikan melalui jalan raya menggunakan angkutan darat seperti truk, trailer dan yang lainnya dapat dikirimkan ke kawasan Cikarang dan sekitarnya.

Keuntungan dari implementasi CBL Inland Waterway ini diharapkan dapat mengurangi porsi beban jalan akibat angkutan logistik ini sudah dalam tahap memprihatinkan. Dengan begitu, maka tingkat kepadatan di jalan raya dapat dikurangi dan kerusakan jalan akibat angkutan barang dapat diminimalisir. Selain itu, manfaat lain yang diharapkan bisa didapat dari implementasi CBL ini adalah berkurangnya polusi udara yang diakibatkan angkutan darat, berkurangnya penggunaan bahan bakar minyak, dan berkurangnya tingkat kecelakaan di jalan raya karena angkutan darat dinilai sebagai moda transportasi yang paling rentan terhadap risiko. CBL merupakan proyek strategis nasional yang sudah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

b. Kawasan Berbasis Transit atau *Transit Oriented Development (TOD)*

Transit Oriented Development atau lebih dikenal dengan sebutan TOD merupakan pengembangan yang mengintegrasikan desain ruang kota untuk menyatukan orang, kegiatan, bangunan, dan ruang publik melalui konektivitas yang mudah dengan berjalan kaki ataupun bersepeda serta dekat dengan pelayanan angkutan umum yang sangat baik ke seluruh kota. Saat ini, terdapat 54 titik potensial yang terdapat dalam lokasi TOD sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek. Dalam penyelenggaraan kawasan berorientasi angkutan umum di wilayah Jabodetabek yaitu memberikan rekomendasi teknis guna memastikan rencana pembangunan di kawasan TOD di wilayah Jabodetabek sudah memenuhi aspek-aspek transportasi dan melakukan pembinaan berupa pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) telah mengeluarkan rekomendasi teknis mengenai aspek transportasi dalam TOD, yaitu:

1. TOD Dukuh Atas, Jakarta
2. TOD Gunung Putri, Bogor
3. TOD Rawabuntu, Tangerang
4. TOD Jatimulya, Bekasi

c. **Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe A**

Pengembangan Terminal Baranangsiang, Bogor Jawa Barat masih terganjal perkara teknis sehingga tak dapat memanfaatkan dana APBN. pembenahan secara fisik Terminal Baranangsiang tidak bisa dilakukan dengan memanfaatkan APBN mengingat Pemerintah Kota Bogor telah melaksanakan kerja sama pengembangan terminal dengan pola Bangun Guna Serah dengan PT Pancakarya Grahatama Indonesia (PGI). Mengacu pada perjanjian kerja sama tersebut, dia menyatakan bahwa perjanjian tidak berakhir meski terjadi pengalihan aset akibat amanat perundang-undangan. Perjanjian kerja sama yang diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta pengembangan sektor perekonomian tetap berlanjut oleh para penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam jangka pendek dengan kondisi fisik bangunan yang ada akan terus mengoptimalkan layanan kepada masyarakat selaku pengguna jasa Terminal Baranangsiang. Dalam jangka menengah, pengembangan kawasan berorientasi transit yang menjadi konsep revitalisasi Baranangsiang ditujukan untuk mendukung operasional Terminal Baranangsiang. Untuk jangka panjang, Terminal Baranangsiang direncanakan dapat terhubung dengan layanan kereta ringan atau light rail transit (LRT) dengan trase LRT Cibubur – Bogor.

d. **Pembangunan Jakarta Elevated Loopline Railway**

Perlintasan sebidang sering menyebabkan kemacetan. Pihaknya bekerjasama dengan Pemprov DKI untuk segera mewujudkan lintasan tersebut. pembangunan tidak menggunakan APBN. Skema yang akan digunakan adalah kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU). lintasan kereta layang lebih efektif dibanding *flyover* dan *underpass*. Menurutny, pelintasan melayang bisa membuat integrasi antarmoda lebih mudah. Dari pada setiap kali kita membangun *flyover* dan *underpass*. Itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi kita angkat lintasan keretanya hingga menimbulkan integrasi yang lebih baik dan ada TOD yang lebih berdampak kepada

pengurangan kemacetan dan berdampak pada pemberian lapangan kerja. *Loop line* ini dinilai lebih efektif dibandingkan dengan lintasan yang sudah ada saat ini. Apalagi, lintasan dengan skema layang ini tak akan mengganggu lalu lintas jalan raya. Pembahasan *elevated loop line* sampai *pre-Feasibility Study*.

Jalur kereta api layang atau *loop line* siap dilaksanakan pada 2020. Jalur Lingkar Layang (*loop line*) dibangun dalam rangka mengatasi lonjakan penumpang commuter sebesar 2 juta penumpang per hari. Saat ini, penumpang kereta api commuter telah melebihi 1,1 juta penumpang per hari. *Loop line* akan berperan dalam mengatasi kemacetan dan mengurangi volume lalu lintas di jalan raya Jakarta. Dengan akan dibangunnya *loop line*, maka penumpang kereta api dari Jabodetabek dalam tujuannya ke titik-titik sentra bisnis di ibukota tidak perlu lagi berganti transportasi lainnya tetapi cukup naik ke atas menggunakan kereta api *Loopline*. *Elevated loop line* akan berperan mengatasi kemacetan dan mengurangi volume lalu lintas di jalan raya Ibu Kota. Selain itu, kereta yang akan dibangun melayang di atas jalur KRL *existing* diharapkan meningkatkan frekuensi pemberangkatan, sebab waktu tunggu (*headway*) pemberangkatan makin singkat.

1.5.3 Permasalahan

Transportasi merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi dan tulang punggung dari proses distribusi orang maupun barang serta memiliki peran sebagai pembuka keterisolasian wilayah. Ketersediaan infrastruktur transportasi merupakan salah satu aspek dalam meningkatkan daya saing produk nasional sehingga harus didukung dengan sumber daya manusia yang profesional, tanggap terhadap perkembangan teknologi dan kondisi sosial masyarakat. Kementerian Perhubungan senantiasa berupaya untuk dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat atas kualitas transportasi baik dari aspek keselamatan, keamanan, pelayanan dan ketersediaan kapasitas. Kendati demikian, Kementerian Perhubungan selalu berupaya menyelesaikan berbagai permasalahan transportasi yang ada, yaitu :

a. **Belum terlaksananya pembangunan Cikarang Bekasi Laut**

CBL diharapkan dapat beroperasi pada tahun 2020 namun sampai saat ini belum dilaksanakan karena menunggu proses persetujuan perizinan dan rekomendasi dari beberapa Kementerian terkait seperti Kementerian ATR / BPN, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR. BPTJ sebagai koordinator rencana aksi dan PJPK telah menginisiasi KPBU untuk melibatkan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan CBL *Inland Waterway*. Proyek CBL ini melibatkan banyak

stakeholder dan membutuhkan dukungan dari semua *stakeholder* agar dapat diimplementasikan dengan efektif. Tantangan terbesar dari CBL adalah lokasi terminal yang akan dikembangkan. Terdapat 2 opsi terkait dengan lokasi terminal, yang pertama yaitu terminal terletak di ujung kanal dengan kelemahan banyaknya utilitas (jembatan dan pipa gas) yang harus direlokasi dan minimnya ketersediaan air kanal yang mencukupi. Sedangkan untuk lokasi yang kedua, terminal CBL akan dibangun di pertengahan kanal.

b. **Belum optimalnya pelayanan transportasi multimoda dan antarmoda yang terintegrasi**

Tidak bisa dipungkiri bahwa ongkos transportasi publik maupun biaya logistik di Indonesia masih tinggi, yang disebabkan oleh belum terwujudnya integrasi antar moda transportasi secara menyeluruh yang dapat mengefisienkan waktu, biaya, dan tenaga. Untuk menciptakan integrasi dengan rute perusahaan transportasi publik perlu menata kembali halte bus dan mendekatkannya dengan stasiun-stasiun kereta api. Hal ini bisa membawa kembali budaya berjalan kaki. Untuk itu, pedestrian yang menjadi akses pejalan kaki harus lebar, bebas pedagang kaki lima, dan nyaman. Jika semua fasilitas tidak terpenuhi, akan sulit mendorong pengguna mobil yang sudah terbiasa nyaman dalam perjalanan beralih ke transportasi umum.

c. **Polusi Udara Jakarta**

Pada beberapa bulan terakhir di tahun 2019, Jakarta mendapat predikat kota dengan kualitas terburuk di dunia selama beberapa pekan. Pemerintah Jakarta merespons permasalahan polusi udara dengan diimplementasikan melalui kebijakan perluasan wilayah rekayasa lalu lintas ganjil-genap guna menekan populasi kendaraan sebagai salah satu pemicu polusi. Pengujian emisi secara rutin dilakukan hingga membatasi usia pakai kendaraan yang akan melintas di wilayah Jabodetabek.

d. **Kemacetan masih menjadi permasalahan yang belum dapat diurai**

Kemacetan lalu lintas menjadi permasalahan sehari-hari ditemukan di pasar, sekolah, terminal bus (seperti kejadian ngetem sembarangan), lampu merah dan persimpangan jalan raya maupun rel kereta api, bahkan hampir disetiap sudut jalan, kondisi itu disebabkan oleh beberapa faktor.

Salah satu faktornya disebabkan karena pada zaman modern ini dengan mudahnya seseorang membeli kendaraan baru dengan *down payment* (DP) rendah sehingga meningkatkan volume kendaraan yang dapat menimbulkan kemacetan. Untuk itu perlu pembatasan penggunaan kendaraan pribadi di jalan-jalan protokol

Jakarta, antara lain dengan kebijakan jalan berbayar elektronik (*electronic road pricing/ERP*) dan memperluas kebijakan ganjil genap. Pembatasan kendaraan pribadi melalui ERP akan membuat pemilik kendaraan pribadi harus membayar lebih jika ingin melintas di jalan-jalan Ibu Kota.

e. Keterbatasan Alokasi Anggaran

Keterbatasan alokasi anggaran dalam DIPA BPTJ Tahun 2019 sehingga kegiatan yang sudah ada dalam *time schedule* Rencana Strategis (Renstra) BPTJ dan RITJ TA. 2019 belum sepenuhnya bisa terealisasi sesuai yang direncanakan dan dibutuhkan sehingga dapat menjadi penyebab tidak tercapainya target kinerja BPTJ Tahun 2019.

I.6 SISTEMATIKA LAPORAN

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka laporan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

BAB II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek pada tahun 2019 yang telah ditetapkan pada Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019 dan disandingkan dengan pengukuran kinerja berupa capaian yang telah diperoleh selama tahun 2019.

BAB IV : Penutup

Tinjauan secara umum dengan mengemukakan capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, terdiri dari :

IV.1 Kesimpulan

IV.2 Saran Tindak Lanjut

BAB V : Lampiran

Lampiran I : Capaian Tahun 2019

Lampiran II : Rekapitulasi Realisasi Daya Serap Per Triwulan
Tahun Anggaran 2019

Lampiran III : Rencana Kerja Tahunan Tahun 2019

Lampiran IV : Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Lampiran V : Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2019

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 URAIAN SINGKAT PERENCANAAN STRATEGIS (ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS NASIONAL)

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tantangan dan perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Perencanaan strategis terkait dengan masa depan. Suatu proses perencanaan pasti akan melibatkan berbagai tingkat kegagalan. Perencanaan strategis yang efektif tidak hanya mengartikulasikan ke mana suatu organisasi berjalan dan tindakan yang diperlukan untuk membuat kemajuan, tetapi juga bagaimana ia akan tahu jika ini akan terus menerus berhasil. Melalui pendekatan Renstra yang transparan dan sinergi, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dapat memaduraskan visi, misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek disusun melalui 2 (dua) tahapan perencanaan, yaitu tahapan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan tahapan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK).

Sejalan dengan upaya Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan visi pembangunan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong dalam sektor transportasi, yaitu dengan “Terwujudnya Konektiitas yang Handal, Berdaya saing, dan memberikan nilai tambah’, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek terus berupaya untuk mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jabodetabek dengan menerapkan tata kelola organisasi yang baik, dimana konektivitas dan integrasi merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Untuk mewujudkannya, Kementerian Perhubungan telah menetapkan sasaran dan strategis sebagai berikut :

- a. Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas nasional dan peningkatan angkutan,
- b. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi,
- c. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi,
- d. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Tahun 2019 disusun sebagai indikator *outcome*, sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Tabel I.1 :

Tabel II.1 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Kementerian Perhubungan Tahun 2019

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(3)		(4)	(5)
SS1 Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas nasional dan peningkatan angkutan.	IKP4 Rasio panjang jalan nasional yang terlayani oleh jaringan angkutan umum perkotaan		%	70
	IKK43	Tersedianya dokumen perizinan angkutan umum jalan dan perairan di wilayah Jabodetabek	Dokumen	4
	IKK44	Terlaksananya pembinaan perusahaan angkutan umum jalan, perairan dan perkeretaapian di wilayah Jabodetabek	Dokumen	1
	IKK46	Tersusunnya dokumen monitoring dan evaluasi pengembangan jaringan trayek transportasi jalan dan perairan di Jabodetabek	Dokumen	1
	IKK47	Tersusunnya dokumen Perencanaan pengembangan jaringan trayek transportasi jalan dan perairan di Jabodetabek	Dokumen	1
	IKK49	Tersusunnya dokumen monitoring dan evaluasi pengembangan angkutan umum transportasi perkeretaapian di Jabodetabek	Dokumen	1

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(3)		(4)	(5)
	IKK54	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengembangan jaringan lintas angkutan barang jalan, perairan dan perkeretaapian di Jabodetabek	Dokumen	1
	IKK55	Tersusunnya Dokumen Perencanaan jaringan lintas angkutan barang jalan, perairan dan perkeretaapian di Jabodetabek	Dokumen	1
SS2 Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi	IKP2 Persentase penurunan jumlah kecelakaan dengan menggunakan angkutan umum di wilayah Jabodetabek		%	10,8
	IKK33	Terselenggaranya Pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan Nasional di wilayah Jabodetabek	Laporan	8
		- Rambu	%	62,50
		- Penerangan Jalan	%	62,74
		- RPPJ	%	65,71
		- Marka	%	60,52
		- Warning Light	%	61,40
		- Cermin Tikung	%	0,00
		- Paku Jalan	%	0,00

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(3)		(4)	(5)
	IKK34	Terselenggaranya pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan Nasional di wilayah Jabodetabek	Laporan	1
	IKK63	Pelaksanaan pengawasan SPM operasional terminal, stasiun, dan pelabuhan angkutan perairan	Dokumen	1
	IKK64	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan angkutan	Dokumen	1
	IKK65	Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan angkutan di wilayah Jabodetabek	Dokumen	1
	IKK66	Tersedianya Sistem Informasi Manajemen (SIM) pengawasan angkutan di wilayah Jabodetabek	Dokumen	1
	IKK67	Pembinaan keselamatan sarana angkutan orang dan barang di wilayah Jabodetabek	Dokumen	1
SS3 Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	IKP3 Kecepatan rata-rata kendaraan umum pada jam puncak di wilayah Jabodetabek		Km/Jam	17
	IKK1	Terlaksananya monitoring dan evaluasi SPM Simpul dan Fasilitas Pendukung Transportasi Darat di wilayah	Dokumen	1

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(3)		(4)	(5)
	IKK2	Terlaksananya peningkatan pengetahuan teknis tentang Transportasi Darat	Dokumen	1
	IKK3	Tersusunnya dokumen perencanaan Terminal Tipe A di Wilayah Jabodetabek	Dokumen	3
	IKK4	Terlaksananya pembangunan /perawatan/pengembangan prasarana transportasi darat dan fasilitas pendukung di wilayah Jabodetabek	Dokumen	1
	IKK5	Tersusunnya dokumen evaluasi atas pembangunan dan pengembangan Transportasi Jalan di wilayah Jabodetabek	Dokumen	1
	IKK9	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan prasarana dan fasilitas pendukung perkeretaapian di jabodetabek	Dokumen	7
	IKK10	Tersusunnya dokumen NSPK perkeretaapian di Wilayah Jabodetabek	Dokumen	1
	IKK11	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelayanan prasarana perkeretaapian di Jabodetabek	Dokumen	1

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(3)		(4)	(5)
	IKK36	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pengembangan Jaringan Kereta Api Perkotaan di Jabodetabek	Dokumen	1
	IKK37	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Sistem Operasi dan Lintas Pelayanan KA Perkotaan di Wilayah Jabodetabek	Laporan	2
	IKK29	Tersusunnya Perencanaan; fasilitas perlengkapan jalan Nasional di wilayah Jabodetabek	Laporan	1
	IKK30	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Ruas dan Simpang Jalan Nasional di wilayah Jabodetabek	Laporan	1
	IKK31	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Lalu Lintas di Jalan Nasional Wilayah Jabodetabek	Laporan	1
	IKK32	Terlaksananya pembinaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di wilayah Jabodetabek	Laporan	1
	IKK27	Tersedianya penilaian dan pemberian rekomendasi analisis dampak lalu lintas di Jalan Nasional Wilayah Jabodetabek	Lokasi	18

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(3)		(4)	(5)
	IKK28	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi analisis dampak lalu lintas di Jabodetabek	Laporan	2
	IKK41	Terselenggaranya Intelligent Transport System (ITS) di wilayah Jabodetabek	Laporan	2
	IKK42	Terciptanya Pengembangan teknologi bidang lalu lintas di wilayah Jabodetabek	Laporan	3
SS4 Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi	IKP1 Modal share (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek		%	32
	IKK19	Tersusunnya dokumen perencanaan Kawasan Berbasis Angkutan Massal di wilayah Jabodetabek	Dokumen	4
	IKK23	Terlaksananya bimbingan dan bantuan teknis tentang fasilitas integrasi simpul di wilayah Jabodetabek	Dokumen	2
	IKK24	Tersusunnya dokumen perencanaan Integrasi Simpul Transportasi di wilayah Jabodetabek	Dokumen	1
	IKK62	Tersusunnya Dokumen Perencanaan sumber, pemanfaatan dan pengelolaan pendanaan angkutan wilayah Jabodetabek	Dokumen	9

II.2 PERJANJIAN KINERJA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK 2019

Dokumen Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki instansi bersangkutan.

Perjanjian Kinerja adalah rencana kinerja tahunan (*annual performance plan*) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2019, yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Penetapan Kinerja ini untuk merinci dan memperjelas target-target kinerja yang akan dicapai kurun waktu satu tahun serta untuk mempermudah terkait dengan sumber daya dan anggaran yang telah ditetapkan (*pagu definitive*).

Diharapkan Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi. Adapun perincian dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel II.2 Perjanjian Kinerja
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2019

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(SP) SASARAN PROGRAM BPTJ	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SS1 Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas nasional dan peningkatan angkutan.	SP4 Meningkatnya cakupan pelayanan angkutan umum di kawasan perkotaan Jabodetabek	IKP4 Rasio panjang jalan nasional yang terlayani oleh jaringan angkutan umum perkotaan	%	70
		IKK43 Tersedianya dokumen perizinan angkutan umum jalan dan perairan di wilayah Jabodetabek	Dokumen	4
		IKK44 Terlaksananya pembinaan perusahaan angkutan umum jalan, perairan dan perkeretaapian di wilayah Jabodetabek	Dokumen	1

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(SP) SASARAN PROGRAM BPTJ	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
		IKK46	Tersusunnya dokumen monitoring dan evaluasi pengembangan jaringan trayek transportasi jalan dan perairan di Jabodetabek	Dokumen	1
		IKK47	Tersusunnya dokumen Perencanaan pengembangan jaringan trayek transportasi jalan dan perairan di Jabodetabek	Dokumen	1
		IKK49	Tersusunnya dokumen monitoring dan evaluasi pengembangan angkutan umum transportasi perkeretaapian di Jabodetabek	Dokumen	1
		IKK54	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengembangan jaringan lintas angkutan barang jalan, perairan dan perkeretaapian di Jabodetabek	Dokumen	1
		IKK55	Tersusunnya Dokumen Perencanaan jaringan lintas angkutan barang jalan, perairan dan perkeretaapian di Jabodetabek	Dokumen	1
SS2 Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi	SP2 Menurunnya angka kecelakaan yang melibatkan angkutan umum di wilayah Jabodetabek	IKP2 Persentase penurunan jumlah kecelakaan dengan menggunakan angkutan umum di wilayah Jabodetabek		%	10,8
		IKK33	Terselenggaranya Pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan Nasional di wilayah Jabodetabek	Laporan	8
			- Rambu	%	62,50
			- Penerangan Jalan	%	62,74
			- RPPJ	%	65,71
			- Marka	%	60,52
			- Warning Light	%	61,40

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(SP) SASARAN PROGRAM BPTJ	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
			- Cermin Tikung	%	0,00
			- Paku Jalan	%	0,00
		IKK34	Terselenggaranya pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan Nasional di wilayah Jabodetabek	Laporan	1
		IKK63	Pelaksanaan pengawasan SPM operasional terminal, stasiun, dan pelabuhan angkutan perairan	Dokumen	1
		IKK64	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan angkutan	Dokumen	1
		IKK65	Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan angkutan di wilayah Jabodetabek	Dokumen	1
		IKK66	Tersedianya Sistem Informasi Manajemen (SIM) pengawasan angkutan di wilayah Jabodetabek	Dokumen	1
		IKK67	Pembinaan keselamatan sarana angkutan orang dan barang di wilayah Jabodetabek	Dokumen	1
SS3 Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	SP3 Meningkatnya kecepatan rata-rata kendaraan umum pada jam puncak di wilayah Jabodetabek	IKP3 Kecepatan rata-rata kendaraan umum pada jam puncak di wilayah Jabodetabek		Km/Jam	17
		IKK1	Terlaksananya monitoring dan evaluasi SPM Simpul dan Fasilitas Pendukung Transportasi Darat di wilayah	Dokumen	1
		IKK2	Terlaksananya peningkatan pengetahuan teknis tentang Transportasi Darat	Dokumen	1
		IKK3	Tersusunnya dokumen perencanaan Terminal Tipe A di Wilayah Jabodetabek	Dokumen	3

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(SP) SASARAN PROGRAM BPTJ	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
		IKK4	Terlaksananya pembangunan /perawatan/pengembangan prasarana transportasi darat dan fasilitas pendukung di wilayah Jabodetabek	Dokumen	1
		IKK5	Tersusunnya dokumen evaluasi atas pembangunan dan pengembangan Transportasi Jalan di wilayah Jabodetabek	Dokumen	1
		IKK9	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan prasarana dan fasilitas pendukung perkeretaapian di jabodetabek	Dokumen	7
		IKK10	Tersusunnya dokumen NSPK perkeretaapian di Wilayah Jabodetabek	Dokumen	1
		IKK11	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelayanan prasarana perkeretaapian di Jabodetabek	Dokumen	1
		IKK36	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pengembangan Jaringan Kereta Api Perkotaan di Jabodetabek	Dokumen	1
		IKK37	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Sistem Operasi dan Lintas Pelayanan KA Perkotaan di Wilayah Jabodetabek	Laporan	2
		IKK29	Tersusunnya Perencanaan; fasilitas perlengkapan jalan Nasional di wilayah Jabodetabek	Laporan	1
		IKK30	Terlaksana nya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Ruas dan Simpang Jalan Nasional di wilayah Jabodetabek	Laporan	1

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(SP) SASARAN PROGRAM BPTJ	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
		IKK31	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Lalu Lintas di Jalan Nasional Wilayah Jabodetabek	Laporan	1
		IKK32	Terlaksananya pembinaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di wilayah Jabodetabek	Laporan	1
		IKK27	Tersedianya penilaian dan pemberian rekomendasi analisis dampak lalu lintas di Jalan Nasional Wilayah Jabodetabek	Lokasi	18
		IKK28	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi analisis dampak lalu lintas di Jabodetabek	Laporan	2
		IKK41	Terselenggaranya Intelligent Transport System (ITS) di wilayah Jabodetabek	Laporan	2
		IKK42	Terciptanya Pengembangan teknologi bidang lalu lintas di wilayah Jabodetabek	Laporan	3
SS4 Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi	SP1 Meningkatnya peran moda angkutan umum perkotaan di Wilayah Jabodetabek-	IKP1 <i>Modal share</i> (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek		%	32
		IKK19	Tersusunnya dokumen perencanaan Kawasan Berbasis Angkutan Massal di wilayah Jabodetabek	Dokumen	4
		IKK23	Terlaksananya bimbingan dan bantuan teknis tentang fasilitas integrasi simpul di wilayah Jabodetabek	Dokumen	2
		IKK24	Tersusunnya dokumen perencanaan Integrasi Simpul Transportasi di wilayah Jabodetabek	Dokumen	1
		IKK62	Tersusunnya Dokumen Perencanaan sumber, pemanfaatan dan	Dokumen	9

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(SP) SASARAN PROGRAM BPTJ	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		pengelolaan pendanaan angkutan wilayah Jabodetabek		

Untuk mencapai sasaran strategis sesuai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2019 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 168.993.920.000 (seratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), sebagaimana disajikan dalam Tabel II.3 sebagai berikut :

Tabel II.3 Anggaran dalam Perjanjian Kinerja
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

No.	Unit Kerja	Pagu TA. 2019
1	Sekretariat	74.215.456.000
2	Direktorat Prasarana	51.424.015.000
3	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan	29.914.419.000
4	Direktorat Angkutan	13.440.030.000
Jumlah		168.993.920.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk media untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi. Akuntabilitas kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah melakukan akuntabilitas kinerja masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk Laporan Kinerja. Petunjuk pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Perhubungan diatur dalam Permenhub Nomor PM 45 Tahun 2016, serta diatur juga dalam Permenhub Nomor PM 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Latar belakang perlunya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dipandang perlu adanya pelaporan AKIP, untuk melaksanakan pelaporan AKIP perlu dikembangkan Sistem AKIP, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dan dalam rangka perwujudan *good governance* telah dikembangkan media pertanggungjawaban LAKIP. Pencapaian kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek ditunjang dengan upaya secara berkesinambungan untuk melaksanakan manajemen kinerja yang dimulai dari pengumpulan data kinerja, pengukuran kinerja, dan penilaian kinerja yang secara berkala telah dipantau oleh pimpinan dalam aplikasi berbasis web *e-performance* dan aplikasi *e-monev* sehingga hubungan kerja antar staf dan pimpinan dapat terjalin dengan baik dan lancar.

Untuk mengukur kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), capaian kinerja pada setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran tertentu dilakukan pengukuran dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan rencana tingkat capaian yang telah ditetapkan, sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan organisasi. Evaluasi dan analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan dimungkinkan dengan adanya sejumlah deviasi/celah kinerja, sehingga diperlukan strategi perbaikan untuk mewujudkan capaian kinerja yang lebih baik dimasa mendatang.

III.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) setiap bulannya telah diukur secara otomatis dalam aplikasi *e-performance* sesuai dengan data capaian yang telah diinput oleh unit eselon I dan unit eselon II di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dengan

alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id>. Melalui aplikasi ini, evaluasi atas capaian kinerja unit eselon I dan eselon II dapat dilakukan secara periodik kapan saja dan dimana saja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan, telah ditetapkan perhitungan persentase capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka gunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Bila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Namun demikian, pengukuran IKU untuk kegiatan tiap unit eselon II Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek yang bersifat teknis, tata cara perhitungannya disesuaikan dengan perbedaan dan karakteristik IKU tersebut. Untuk itu, telah ditetapkan manual perhitungan masing-masing capaian.

III.2 PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Serta Analisis Pencapaian.

Berikut adalah realisasi target kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019, sebagai berikut :

Tabel III.1 Realisasi Kinerja Terhadap Target
Perjanjian Kinerja BPTJ Tahun 2019

No.	IKU	Satuan	2019		
			Target PK	Capaian	%
Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal, Berdaya Saing, dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan					
1	Modal Share (Pangsa Pasar) Angkutan Umum Perkotaan di Wilayah Jabodetabek	%	32	32	100

No.	IKU	Satuan	2019		
			Target PK	Capaian	%
Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi					
2	Persentase Penurunan Jumlah Kecelakaan dengan Menggunakan Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek	%	10,8	13,65	126,39
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi					
3	Kecepatan Rata-Rata Kendaraan Umum pada Jam Puncak di Wilayah Jabodetabek	Km/Jam	17	22,86	134,47
Meningkatkan Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi					
4	Rasio Panjang Jalan Nasional yang Terlayani Oleh Jaringan Angkutan Umum Perkotaan	%	70	67	95,71

Sumber : Aplikasi *e-performance* Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

a. Rumus Pengukuran Kinerja BPTJ

Pengukuran kinerja BPTJ ditinjau dari kinerja lalu lintas dan pelayanan Angkutan Umum di wilayah Jabodetabek, diukur dengan menggunakan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rumus sebagai berikut :

1. **IK 1. Modal Share (Pangsa Pasar)** Angkutan Umum Perkotaan di Wilayah Jabodetabek.

$$\text{Rumus Modal share} = \frac{\text{jumlah perjalanan dengan Angkutan Umum}}{\text{total jumlah perjalanan}}$$

2. **IK 2. Persentase Penurunan Jumlah Kecelakaan dengan Menggunakan Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek.**

Rumus Penurunan Kecelakaan

$$= 100\% - \frac{\text{jumlah kejadian kecelakaan angkutan umum tahun ke } N}{\text{jumlah kejadian kecelakaan angkutan umum tahun ke } N - 1} \times 100\%$$

3. **IK 3. Kecepatan rata – rata** kendaraan umum pada jam puncak di wilayah Jabodetabek.

$$\text{Rumus Kecepatan} = \frac{\Sigma \text{ jarak trayek}}{\Sigma \text{ waktu perjalanan (km/jam)}}$$

4. **IK 4. Rasio konektivitas (cakupan layanan angkutan umum)** antar wilayah Jabodetabek.

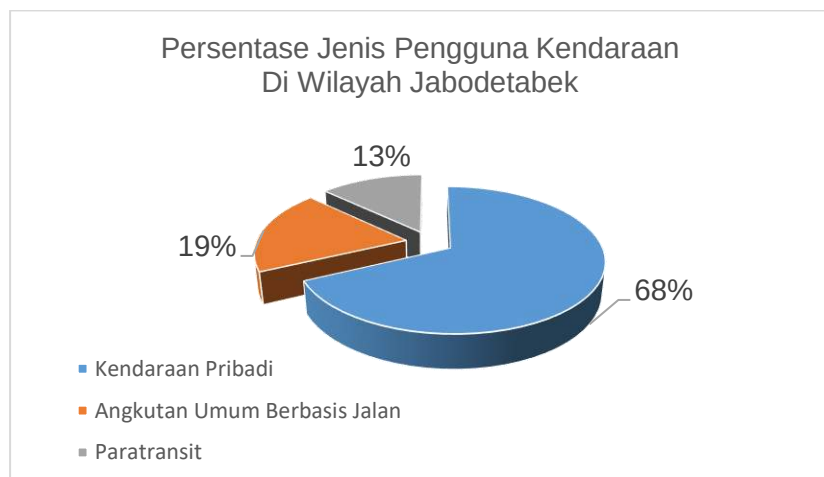
Rumus Cakupan layanan Angkutan Umum

$$= \frac{\Sigma \text{luas jalan tercover angkutan umum}}{\Sigma \text{luas jalan di Wilayah Jabodetabek}}$$

- b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2019 pada Sasaran Pertama target **IK1. Modal share (pangsa pasar) Angkutan Umum Perkotaan di Wilayah Jabodetabek**

Telah dilakukan pembahasan mengenai perkembangan pencapaian kinerja lalu-lintas dan pelayanan angkutan umum di Wilayah Jabodetabek Tahun 2019. Berdasarkan hasil survei pemilihan moda perjalanan di Wilayah Jabodetabek, didapati hal-hal sebagai berikut :

1. Didominasi pengguna kendaraan pribadi (sepeda motor dan mobil) sebesar 68%,
2. Sedangkan untuk pengguna angkutan umum sebesar 32% yang meliputi :
 - a) Angkot, transjakarta, bus perkotaan dan angkutan umum berbasis rel (KRL, MRT dan LRT) sebesar 19%,
 - b) Pengguna paratransit (bajaj, taksi konvensional, taksi online, ojek online) sebesar 13%.



Gambar III.1 Persentase Jenis Pengguna Kendaraan Di Wilayah Jabodetabek

Target *Modal share* angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek di Tahun 2019 sebesar 32%.

Tabel III.2 Jumlah Perjalanan Per Jenis Kendaraan Di Wilayah Jabodetabek Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019

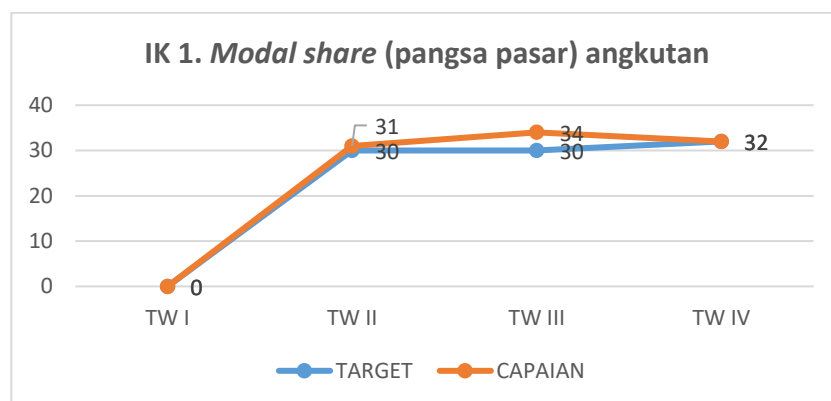
PERJALANAN	JUMLAH	PERSENTASE
PRIBADI	35.867	68%
ANGKUTAN UMUM, PARATRANSIT, KERETA	16.878	32%
TOTAL	52.745	

$$\begin{aligned} \text{Modal share} &= \frac{\text{jumlah perjalanan dengan Angkutan Umum}}{\text{total jumlah perjalanan}} \\ &= \frac{16878}{52745} = 32\% \end{aligned}$$

$$\% \text{Capaian Modal share} = \frac{0,32}{0,32} \times 100\% = 100\%$$

Capaian sampai dengan Triwulan IV Tahun 2019 adalah sebesar 32%, dengan asumsi sebagai berikut :

1. Survei primer dilakukan terhadap 49.756 orang responden.
2. Pemilihan sampel responden dengan metode *random sampling* (lokasi berdasarkan jumlah penduduk kecamatan pada 13 kota/ kabupaten di wilayah Jabodetabek) yang terdiri dari Provinsi DKI (Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat), wilayah Provinsi Jawa Barat (Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor) dan wilayah Provinsi Banten (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan),
3. Perhitungan capaian *modal share* diolah dengan menggunakan aplikasi *Home Interview* (HI).



Gambar III.2 Capaian IK 1. *Modal share* terhadap target triwulan I s.d IV tahun 2019

Pada laporan triwulan I masih belum dilaksanakan pengukuran terhadap capaian IK.1 Modal Share, survei primer baru dapat dilaksanakan pada triwulan II dengan jumlah responden sebanyak 5.778 orang, pada triwulan III jumlah responden sebanyak 32.111 responden sedangkan pada triwulan IV jumlah responden bertambah menjadi 49.756 orang responden. Penambahan jumlah responden ini berpengaruh besar terhadap capaian kinerja yang diperoleh. *Modal share* dicapai dengan menerapkan **strategi Push dan Pull** :

Push :

Strategi yang digunakan dalam **mendorong pengguna kendaraan pribadi** agar dapat **beralih** menggunakan moda **transportasi umum**.

Program kebijakan Ganjil Genap diberlakukan di 3 ruas jalan tol yakni ruas Tol Jakarta – Cikampek, Tol Jagorawi, dan Tol Jakarta – Tangerang, Kampanye Jalan Hijau yang bertujuan untuk mendorong semaksimal mungkin masyarakat untuk berpindah dari kendaraan bermotor pribadi ke angkutan umum massal dan berjalan kaki.

Pull :

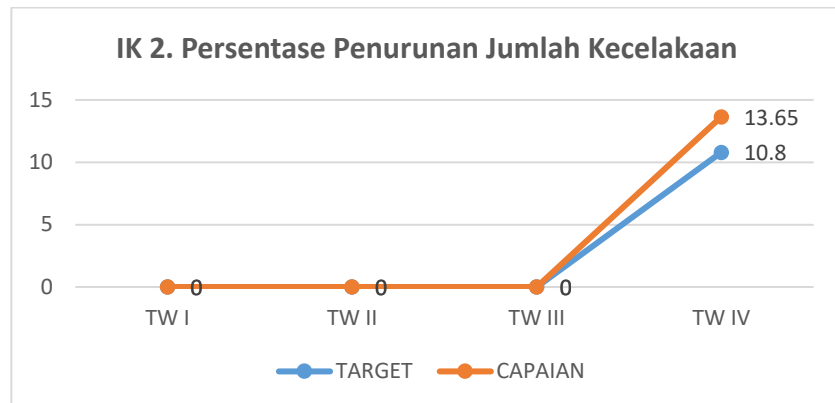
Strategi untuk **menarik pengguna kendaraan pribadi** untuk beralih **menggunakan moda transportasi umum**.

Program yang dilaksanakan adalah pengembangan 20 trayek Utama Prioritas di Wilayah Jabodetabek telah dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, antara lain: Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Jabodetabek (RUJT), Survei Peninjauan Lapangan dalam rangka pengembangan trayek di Jabodetabek dan pelaksanaan *Flag Off* Angkutan Umum Dalam Trayek baik untuk Angkutan Perkotaan maupun Angkutan Permukiman dan uji coba layanan bus angkutan perkotaan Jabodetabek Premium Puncak. Penambahan jumlah armada sebanyak 371 armada yang semula di Tahun 2018 sebanyak 1.266 kendaraan, di tahun 2019 jumlah armada menjadi 1.637 kendaraan.

- c. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2019 pada Sasaran Pertama target IK2. Persentase Penurunan Jumlah Kecelakaan Menggunakan Angkutan Umum**

Sasaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek yang kedua adalah Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi dengan IKU Persentase Penurunan Jumlah Kecelakaan dengan Menggunakan Angkutan Umum di Wilayah

Jabodetabek dan memiliki target 10,8, dengan capaian sebesar 13,65 pada tahun 2019.



Gambar III.3 Capaian IK 1. Persentase Penurunan Jumlah Kecelakaan dengan Menggunakan Angkutan Umum terhadap target triwulan I s.d IV tahun 2019

- d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2019 pada Sasaran Pertama target **IK3. Kecepatan Rata – Rata kendaraan umum pada jam puncak di wilayah Jabodetabek**

Kecepatan rata – rata kendaraan umum pada jam puncak di wilayah Jabodetabek di tahun 2019 ditargetkan sebesar 17 km/jam.

Tabel III.3 Capaian kecepatan rata-rata kendaraan umum JAC, JRC dan Transjabodetabek Sampai Dengan Tahun 2019

Layanan	Total Jarak (Km)	Total Waktu (Jam)	Kecepatan (Km/Jam) (S/t)
JAC	1.537	65	23,65
JRC	2.284	107,13	21,32
Transjabodetabek	5.344	228,77	23,36
Total	9.165	400,9	22,86

$$\begin{aligned} \text{Kecepatan rata-rata kendaraan umum} &= \frac{\sum \text{jarak trayek}}{\sum \text{waktu perjalanan} \left(\frac{\text{km}}{\text{jam}} \right)} \\ &= \frac{9165}{400,9} = 22,86 \text{ Km/Jam} \end{aligned}$$

%Capaian Kecepatan rata-rata kendaraan umum

$$= \frac{22,86}{17} \times 100\% = 134,47\%$$

Capaian sampai dengan Triwulan IV tahun 2019 sebesar 22,86 Km/Jam, dengan kondisi sebagai berikut :

1. Survei primer dilakukan terhadap sample sejumlah 216 kendaraan pada 70 trayek lintas provinsi yang mewakili

kota/ kabupaten di wilayah Jabodetabek yang terdiri dari trayek dengan asal tujuan di wilayah Provinsi DKI (Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat), wilayah Provinsi Jawa Barat (Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor) dan wilayah Provinsi Banten (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan). Adapun 70 trayek yang menjadi sampelnya adalah sebagai berikut :

a) Transjabodetabek

- 1) Balaraja-Cikarang
- 2) Baranangsiang-Terminal Tanjung Priok
- 3) Depok-Terminal Cawang
- 4) Harmoni-Kampung Melayu
- 5) Kemayoran-Islamic Center Tangerang
- 6) Terminal Kalideres-Baranangsiang
- 7) Pool Ppd Ciputat-Terminal Blok M
- 8) Pool Ppd Ciputat-Terminal Kp Rambutan
- 9) Term Baranangsiang-Term Cikarang
- 10) Term Baranangsiang-Term Kp Rambutan
- 11) Term Barangsiang- Term Tanjung Priok
- 12) Term Bekasi-Bulak Kapal
- 13) Term Bekasi-Tanah Abang
- 14) Term Bekasi-Term Poris Plawad
- 15) Term Bubulak-Term Blok M
- 16) Term Bubulak-Term Rawamangun
- 17) Term Bubulak-Term Senen
- 18) Term Ciawi-Pasar Senen
- 19) Term Ciawi-Tanah Abang
- 20) Term Cibinong-Term Grogol
- 21) Term Cibinong-Term Kp Melayu
- 22) Term Cibinong-Term Kp Rambutan
- 23) Term Cibinong-Term Tanjung Priok
- 24) Term Cikarang-Term Blok M
- 25) Term Cikarang-Term Kalideres

- 26) Term Cikarang-Term Senen
- 27) Term Cileungsi -Term Senen
- 28) Terminal Cileungsi-Term Blok M
- 29) Term Depok-Term Cawang
- 30) Term Kp Rambutan-Baranangsiang
- 31) Term Kp Rambutan-Poris
- 32) Term Kp Rambutan-Pulogadung
- 33) Term Leuwiliang-Term Kalideres
- 34) Term Leuwiliang-Term Tanjung Priok
- 35) Term Poris Plawad-Grogol
- 36) Term Pulogadung-Term Poris Plawad
- 37) Term Pulogadung-Baranangsiang

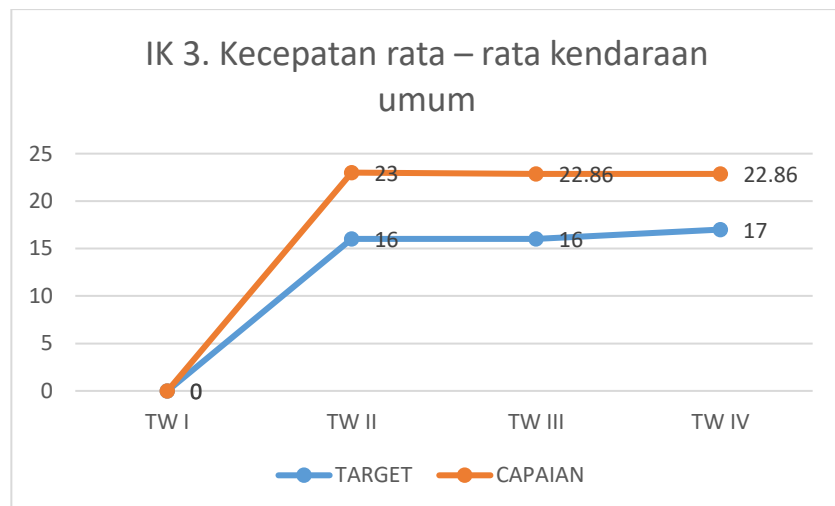
b) Jabodetabek *Airport (JA) Connexion*

- 1) Soekarno Hatta-Bekasi Timur
- 2) Soekarno Hatta-Karawaci
- 3) Soekarno Hatta-Cimanggu City
- 4) Soekarno Hatta-Grand Cemara Hotel
- 5) Soekarno Hatta-Hotel Aryaduta
- 6) Soekarno Hatta-Hotel Sahid Jaya
- 7) Soekarno Hatta-Jababeka Cikarang
- 8) Soekarno Hatta-Mall Btm Bogor
- 9) Soekarno Hatta-Mangga Dua
- 10) Soekarno Hatta-Sentul City Bellanova
- 11) Soekarno Hatta-Terminal Kayuringin
- 12) Halim Perdana Kusuma-Botani Square
- 13) Halim Perdana Kusuma-Mall Ciputra Cibubur

c) Jabodetabek *Residence (JR) Connexion*

- 1) Graha Raya Bintaro-Itc Mangga Dua
- 2) Grand Wisata-Fx Sudirman
- 3) Harvest City-Blok M
- 4) Harvest City-Kelapa Gading
- 5) Harvest City-Itc Mangga Dua
- 6) Kota Wisata Cibubur-Kasablanka

- 7) Legenda Wisata Cibubur-Grogol
 - 8) Legenda Wisata Cibubur-Senayan
 - 9) Lippo Cikarang-Terminal Blok M
 - 10) Lippo Village Karawaci-Fx Sudirman
 - 11) Metland Transyogi-Itc Mangga Dua
 - 12) Grand Citra Cibubur-Grogol
 - 13) Grand Citra Cibubur-Halte Artha Gading
 - 14) Grand Citra Cibubur-Kawasan Thamrin
 - 15) Grand Citra Cibubur-Citra Indah
 - 16) Citra Indah-Halte Grogol
 - 17) Citra Raya-Wtc Mangga Dua
 - 18) Puri Beta 2 Ciledug-Blok M
 - 19) Summarecon Mall Serpong-Fx Sudirman
 - 20) Summarecon Mall Serpong-Ratu Plaza
2. Metode survei statis (survei asal – tujuan) dengan cara melakukan pencatatan waktu keberangkatan dan waktu kedatangan pada 70 trayek,
 3. Perhitungan kecepatan rata – rata kendaraan umum pada jam puncak diolah dengan menggunakan bantuan aplikasi *Home Interview* (HI).



Gambar III.4 Capaian IK 3. Kecepatan rata – rata kendaraan umum terhadap target triwulan I s.d IV tahun 2019

Capaian IK 3. Kecepatan rata – rata kendaraan umum dari triwulan I s.d. triwulan IV pada tahun 2019 dapat melampaui target, hal ini karena yang menjadi sampel trayek yang

digunakan adalah 70 trayek (Transjabodetabek 37 trayek, Jabodetabek *Residence* (JR) *Connexion* 20 trayek dan Jabodetabek *Airport* (JA) *Connexion* 13 trayek), dengan yang dipergunakan sebagai sampel sebanyak 216 kendaraan.

Capaian Kecepatan rata – rata kendaraan umum dapat lebih ditingkatkan dengan cara :

1. Optimalisasi penerapan kebijakan ganjil-genap di 3 ruas jalan tol di Wilayah Jabodetabek (Jakarta-Cikampek, Jagorawi dan Jakarta-Tangerang),
 2. Mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tetap memberlakukan skema Ganjil-Genap di beberapa ruas jalan di DKI Jakarta sebagaimana telah diterapkan saat ini di ruas Jalan MT.Haryono, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan M.H Thamrin, Jalan Sudirman, Jalan Gatot Subroto, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Majapahit dan beberapa ruas jalan lainnya di wilayah DKI,
 3. Pengoperasian ATCS BPTJ dan Monitoring Infrastruktur pada titik simpang.
- e. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2010 pada Sasaran Pertama target **IK4. Rasio konektivitas (cakupan layanan angkutan umum) antar wilayah Jabodetabek**

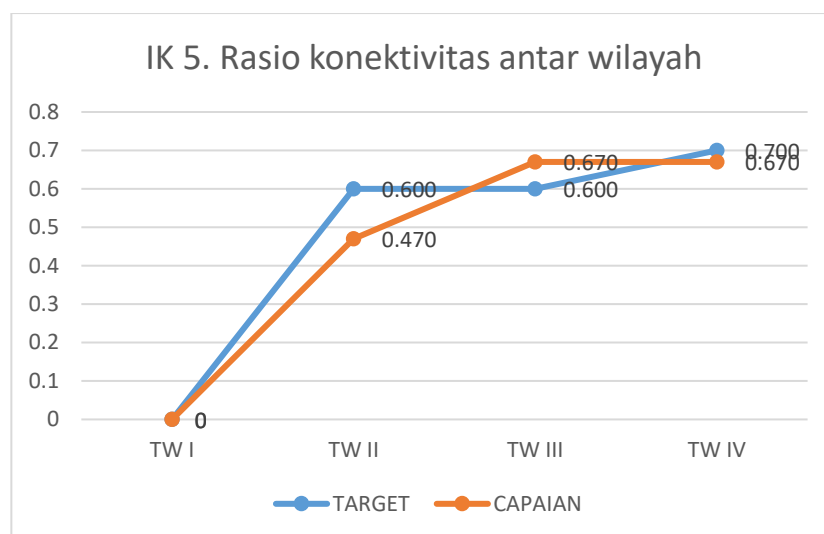
Rasio konektivitas antar wilayah di wilayah Jabodetabek pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 70%. Capaian sampai dengan Triwulan IV (satu) tahun 2019 sebesar 67%, dengan asumsi sebagai berikut :

No.	Nama Angkutan Umum	Total Panjang Trayek
1.	Trayek antar Terminal hasil survei	701,00 Km
2.	Trans Jabodetabek	2673,22 Km
3.	Angkutan Bandaran	1808,10 Km
4.	Angkutan Permukiman	884,00 Km
5.	Trayek AU Kota Bogor	454,16 Km
6.	Trayek AU Kota Bekasi	447,02 Km
7.	Trayek AU Kab. Tangerang	545,00 Km
8.	Trayek AU Kota Tangerang	572,00 Km
9.	Trayek AU Kota Depok	367,21 Km
Total		7750,48 Km
Standar lebar jalan ditambah <i>willingness to walk</i>		0,107 Km
Total area yang terlayani angkutan umum		829,301 Km ²
Total Jalan Jabodetabek		1231,296 Km ²
Persentase <i>Coverage area</i>		67%

$$\begin{aligned}\text{Cakupan layanan angkutan umum} &= \frac{7750,48 \times 0,107}{1231,296} \\ &= \frac{828,301}{1231,296} = 0,67 = 67\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\% \text{ Capaian cakupan layanan angkutan umum} &= \frac{0,670}{0,700} \times 100\% \\ &= 95,714\%\end{aligned}$$

Pengolahan data bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait data panjang jalan yang dilalui angkutan umum dan data total jalan Jabodetabek dari Badan Pusat Statistik (BPS).



Gambar III.5 Capaian IK 5. Rasio konektivitas antar wilayah terhadap target triwulan I s.d IV tahun 2019

Capaian kinerja IK 5. Rasio konektivitas antar wilayah sampai dengan triwulan IV masih belum dapat mencapai dikarenakan beberapa pusat kegiatan di pinggiran wilayah Jabodetabek memiliki tingkat kepadatan rendah dan potensi *demand* yang dinilai kecil sehingga kurang menarik bagi pengusaha *autobus* untuk membuka layanan di daerah tersebut sehingga cakupan pelayanan konektivitas (*coverage area*) angkutan umum belum maksimal.

Peningkatan capaian konektivitas angkutan umum di tahun depan dapat dicapai dengan melakukan pengawasan di lapangan serta peningkatan capaian konektivitas angkutan umum di tahun depan dapat dicapai dengan melakukan pengawasan di lapangan serta Perlunya meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam rangka pembukaan trayek baru khususnya pada pusat kegiatan yang belum terjangkau angkutan umum perkotaan dan pada wilayah pinggiran Jabodetabek serta melakukan kajian

pemberian subsidi terhadap layanan angkutan umum pada wilayah tersebut sebagai upaya peningkatan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Rasio Konektivitas antar wilayah.

3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017-2019 Terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2017-2019.

Dalam mengukur peningkatan capaian kinerja terhadap target, dilakukan perbandingan capaian kinerja terhadap target secara periodik dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Berdasarkan hasil perbandingan didapati bahwa pencapaian sejumlah sasaran mengalami peningkatan, sebagian mengalami penurunan dan sebagian lainnya tidak mengalami perubahan.

Target Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek untuk Tahun 2019 telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2017-2019. Adapun rincian perbandingan capaian kinerja periode tahun 2017-2019 sebagaimana tabel III.4.

Tabel III.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Periode Tahun 2017-2019 terhadap Target Kinerja Tahun 2017-2019

No.	IKU	Satuan	2017			2018			2019		
			Target PK	Capaian	%	Target PK	Capaian	%	Target PK	Capaian	%
Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal, Berdaya Saing, dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan											
1	Modal Share (Pangsa Pasar) Angkutan Umum Perkotaan di Wilayah Jabodetabek	%	26	25	96,15	29	29,9	103,1	32	32	100
Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi											
2	Persentase Penurunan Jumlah Kecelakaan dengan Menggunakan Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek	%	8,9	19,45	218,54	9,7	10,51	108,35	10,8	13,65	126,39
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi-											
3	Kecepatan Rata-Rata Kendaraan Umum pada Jam Puncak di Wilayah Jabodetabek	Km/ Jam	15	15,78	105,2	16	17,32	108,25	17	22,86	134,47
Meningkatkan Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi											
4	Rasio Panjang Jalan Nasional yang Terlayani Oleh Jaringan Angkutan Umum Perkotaan	%	57	48	84,21	63	54,29	86,17	70	67	95,71

3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Terhadap Target Kinerja 2019 dalam Renstra Periode Tahun 2016-2019.

Target Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek untuk Tahun 2019 telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2017-2019.

Tabel III.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Terhadap Target Kinerja 2019 dalam Renstra Periode Tahun 2016-2019

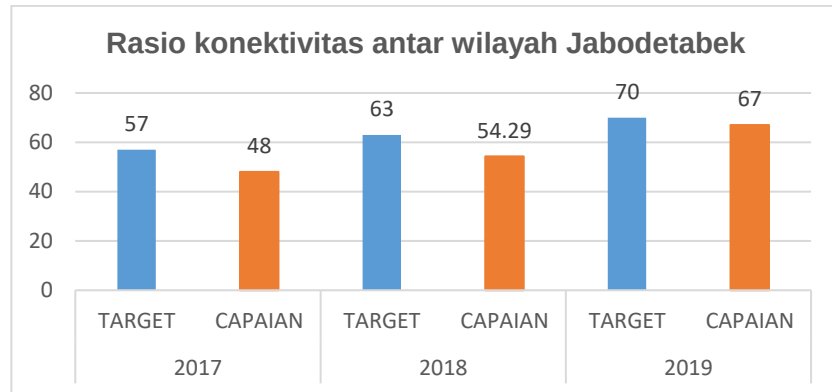
No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (OUTCOME)		SATUAN	TARGET 2019	CAPAIAN 2019	PERSENTASE CAPAIAN (%)
SS1	IK4	Rasio konektivitas antar wilayah Jabodetabek	Rasio	70	67	95,71
SS3	IK3	Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum pada jam puncak di wilayah Jabodetabek	Km/Jam	17	22,86	134,47
SS4	IK1	Modal Share (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek	%	32	32	100

Sumber : PK Kemenhub 2018

Dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek menyumbang sebanyak 3 sasaran antara lain SS1 Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah dalam rangka mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan, SS3 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi, SS4 Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi. Dan sebanyak 3 indikator kinerja dalam sasaran Kementerian Perhubungan, diantaranya IK4 Rasio konektivitas antar wilayah Jabodetabek, IK3 Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum pada jam puncak di wilayah Jabodetabek, dan IK1 *Modal Share* (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek.

- a. Perbandingan Realisasi Kinerja BPTJ Tahun 2019 Terhadap Target Tahun 2018 dalam Renstra Kemenhub 2017-2019 pada Sasaran Pertama

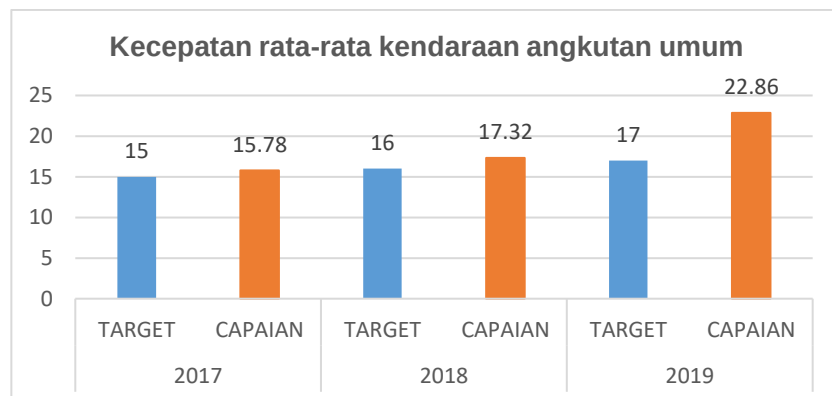
Sasaran Kementerian Perhubungan yang pertama yaitu Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah dalam rangka mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan dengan IK4 Rasio konektivitas antar wilayah Jabodetabek. Capaian IK4 BPTJ Tahun 2017 adalah sebesar 84,21% dan di tahun 2018 adalah sebesar 86,17%, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 95,71% sehingga rata-rata capaian terhadap Renstra BPTJ Tahun 2017-2019 sebesar 88,70%.



Gambar III.6 Diagram Ratio Target dan Capaian IK4 BPTJ 2019 pada Renstra Kemenhub 2017-2019

- b. Perbandingan Realisasi Kinerja BPTJ Tahun 2019 Terhadap Target Tahun 2019 dalam Renstra Kemenhub 2017-2019 pada Sasaran Ketiga

Sasaran Kementerian Perhubungan yang ketiga yaitu Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi dengan IK3 Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum pada jam puncak di wilayah Jabodetabek. Capaian IK3 BPTJ Tahun 2017 sebesar 105,20% dan tahun 2018 sebesar 108,25%, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 134,47% sehingga rata-rata capaian renstra adalah sebesar 115,97%.

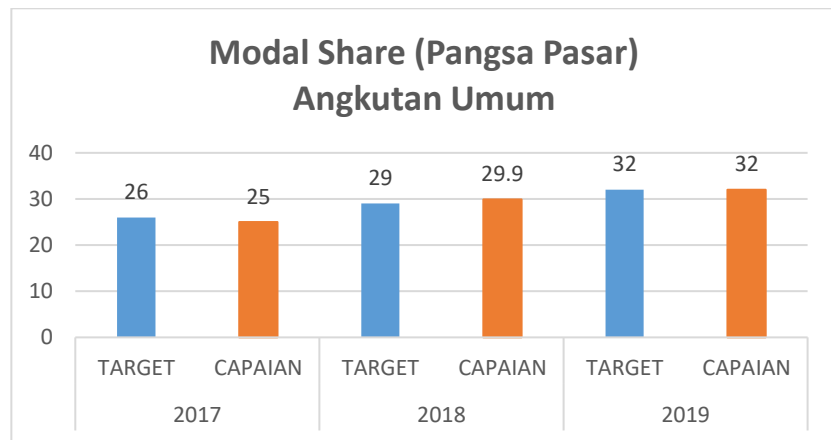


Gambar III.7 Diagram Ratio Target dan Capaian IK3 BPTJ 2019 pada Renstra Kemenhub 2017-2019

- c. Perbandingan Realisasi Kinerja BPTJ Tahun 2019 Terhadap Target Tahun 2019 dalam Renstra Kemenhub 2017-2019 pada Sasaran Keempat

Sasaran Kementerian Perhubungan yang keempat adalah Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi dengan IK11 *Modal Share* (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek. Capaian IK11 di tahun 2017

sebesar 96,15% dan 2018 sebesar 103,1%, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 100% sehingga rata-rata capaian renstra sebesar 99,75%.



Gambar III.8 Diagram Ratio Target dan Capaian IK1 BPTJ 2019 pada Renstra Kemenhub 2017-2019

III.3 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tingkat efisiensi atas sumber daya menunjukkan kemampuan unit kerja dalam mengelola sumber daya yang dimiliki baik itu berupa SDM, anggaran maupun barang/aset dalam mencapai output dari setiap kegiatan yang telah direncanakan. Tingginya nilai efisiensi menunjukkan kemampuan unit kerja dalam menghemat sumber daya dimiliki untuk mencapai output, sebaliknya rendahnya nilai efisiensi menunjukkan kurangnya penghematan sumber daya dalam mencapai output.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, efisiensi unit kerja eselon II dapat dihitung melalui perbandingan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya dalam mencapai *output* yang telah ditargetkan.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi
PAK_i : Pagu anggaran keluaran i
RAK_i : Realisasi anggaran keluaran i
CK_i : Capaian keluaran i

Perhitung efisiensi dapat dilakukan dengan memanfaatkan data perbandingan antar pagu anggaran, realisasi anggaran dan capaian keluaran tahun 2019. Adapun rincian perbandingannya pada tabel III.6.

Tabel III.6 Capaian Kinerja terhadap Realisasi Anggaran Sekretariat BPTJ Tahun 2019

SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET 2019	CAPAIAN 2019	%	PAGU	REAL
Meningkatnya sistem manajemen perencanaan untuk peningkatan kinerja di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Jumlah dokumen yang disusun untuk melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan jangka pendek, menengah, jangka panjang, serta program	Laporan	6	6	100	1,208,373,000	1,206,213,146
	Jumlah dokumen evaluasi terkait pelaksanaan perencanaan dan program	Laporan	5	10	200	4,797,954,000	4,796,670,115
Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Teknis BPTJ sesuai kebutuhan	Jumlah kepersertaan pegawai dalam mengikuti diklat/bimtek sesuai bidangnya	Orang	25	61	244	1605981500	1584041667
	Jumlah pegawai yang memperoleh sertifikat kelulusan mengikuti diklat/bimtek sesuai bidang	Orang	25	58	232	1605981500	1584041667

SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET 2019	CAPAIAN 2019	%	PAGU	REAL
Terselenggaranya kegiatan publikasi dan dokumentasi menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan transportasi di Jabodetabek	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Bagi Masyarakat Umum	Kegiatan	1	1	100	143,332,000	142,540,000
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Penyusunan Materi Publikasi (Non Pemberitaan)	Laporan	1	1	100	2,422,491,000	2,420,093,280
Terselenggaranya pelayanan informasi publik menyangkut penyelenggaraan transportasi di Jabodetabek	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Penyusunan Dokumentasi	Laporan	1	1	100	961,360,000	960,872,500
	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan Website BPTJ	Kegiatan	1	1	100	77,605,000	77,603,050
Terlaksananya Kegiatan Hubungan Media	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Hubungan Media	Laporan	1	1	100	915,411,000	910,179,717

SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET 2019	CAPAIAN 2019	%	PAGU	REAL
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan Media Sosial dan Jejaring Komunikasi	Laporan	1	1	100	2,139,479,000	2,125,448,410
Terlaksananya Pengelolaan Media Sosial dan Jejaring Komunikasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Analisis Berita dan Opini Publik dan Penyelenggaraan Strategi Komunikasi	Laporan	1	1	100	40,200,000	40,150,000
Meningkatnya jumlah regulasi dan sosialisasi di bidang transportasi	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun	Peraturan	5	5	140	1,677,460,000	1,676,336,154
	Tersusunnya himpunan peraturan di bidang transportasi Jabodetabek	Laporan	1	1	100	171,677,000	169,432,965
	Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundangan	Laporan	3	3	67	170,574,000	169,696,520

SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET 2019	CAPAIAN 2019	%	PAGU	REAL
Meningkatnya jumlah layanan kerja sama Nasional dan Internasional di bidang transportasi serta mengantisipasi adanya permasalahan hukum dari kebijakan yang dikeluarkan	Jumlah rancangan kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri dalam rangka kerja sama di bidang transportasi	Dokumen	6	6	100	322,179,000	321,661,630
	Jumlah kegiatan advokasi hukum di bidang transportasi	Laporan	2	2	100	621,425,000	620,738,264
Meningkatnya layanan perkantoran	Pemenuhan kebutuhan layanan perkantoran BPTJ	Bulan	12	12	100	52,022,192,000	51,902,107,268
Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan BPTJ	Nilai AKIP BPTJ	Nilai	88	-	-	566,024,000	566,022,750
Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan di Lingkungan BPTJ	Jumlah dokumen yang disusun untuk memenuhi kebutuhan laporan SIMAK BMN	Laporan	2	2	100	420472000	419317859
	Jumlah Dokumen yang disusun untuk memenuhi kebutuhan laporan keuangan	Laporan	3	3	100	620856000	619666346

SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET 2019	CAPAIAN 2019	%	PAGU	REAL
	Jumlah dokumen yang disusun untuk memenuhi kebutuhan laporan PNB	Laporan	12	12	100	318,068,000	318,056,500
	Jumlah dokumen yang disusun untuk memenuhi kebutuhan laporan daya serap	Laporan	12	12	100	367,237,000	365,946,400
	Jumlah dokumen yang disusun untuk memenuhi kebutuhan laporan administrasi perbendaharaan	Laporan	12	12	100	239,769,000	239,520,250
	Tingkat penyerapan anggaran	%	97	99,63	102.7	264,865,000	264,512,115
Meningkatnya kinerja pelaksanaan RITJ	Jumlah dokumen evaluasi terkait pelaksanaan perencanaan dan program	Laporan	1	1	100	514,490,000	514,428,171
TOTAL ANGGARAN						74,215,456,000	74,015,296,744

Dengan memanfaatkan data diatas, diketahui efisiensi di Sekretariat BPTJ Tahun 2019 sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$Efisiensi = \frac{10.052.466.881}{83.501.740.875} \times 100\%$$

$$Efisiensi = 12.03 \%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, didapati bahwa efisiensi di Sekretariat BPTJ Tahun 2019 mencapai 12.03%.

Tabel III.7 Capaian Kinerja terhadap Realisasi Anggaran Prasarana BPTJ Tahun 2019

Keluaran (Output)	Capaian Keluaran (Output)	Anggaran	
		Pagu (PAK)	Realisasi (RAK)
Subdirektorat Prasarana Transportasi Darat	5.6	6.289.864.000	6.279.329.100
Subdirektorat Prasarana Transportasi Perkeretaapian	2.9	14.616.500.000	14.417.986.778
Subdirektorat Prasarana Integrasi Transportasi	0.2	19.117.651.000	19.081.281.668

Dari tabel di atas, pengukuran efisiensi adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\sum_i ((6.289.864.000 \times 5.6) - 6.279.329.100) + ((14.616.500.000 \times 2.9) - 14.417.986.778) + ((19.117.651.000 \times 0.2) - 19.081.281.668)}{\sum_i ((6.289.864.000 \times 5.6) + (14.616.500.000 \times 2.9) + (19.117.651.000 \times 0.2))} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, didapati bahwa efisiensi di Prasarana BPTJ Tahun 2019 mencapai 34.2%.

Tabel III.8 Capaian Kinerja terhadap Realisasi Anggaran Lalu-Lintas BPTJ Tahun 2019

KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN	CAPAIAN KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN	ANGGARAN		PENYEBUT	PEMBAGI
		PAGU (PAK)	REALISASI (RAK)		
Pengoperasian dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1,00	1.629.309.000,00	1.623.037.712,00	6.271.288,00	1.629.309.000,00
Pembangunan Sistem Perizinan Online Andalalin BPTJ	1,00	193.700.000,00	193.462.500,00	237.500,00	193.700.000,00
Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Perlengkapan Jalan Nasional di wilayah Jabodetabek	1,00	350.000.000,00	348.993.772,00	1.006.228,00	350.000.000,00
Evaluasi Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Jabodetabek	1,00	381.350.000,00	379.487.800,00	1.862.200,00	381.350.000,00
Monitoring Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas	1,00	622.651.000,00	621.515.100,00	1.135.900,00	622.651.000,00

KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN	CAPAIAN KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN	ANGGARAN		PENYEBUT	PEMBAGI
		PAGU (PAK)	REALISASI (RAK)		
Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Nasional Jabodetabek	1,00	19.262.169.000,00	19.257.921.575,00	4.247.425,00	19.262.169.000,00
Perencanaan Teknis Penerapan Emission Zone di Jabodetabek	1,00	790.600.000,00	790.600.000,00	0,00	790.600.000,00
Peningkatan Kinerja Lalu Lintas Ruas dan Simpang di Jabodetabek	1,00	565.040.000,00	555.786.150,00	9.253.850,00	565.040.000,00
Monitoring dan Evaluasi Dampak Kebijakan di Sektor Transportasi Tahun 2017 - 2018	1,00	784.673.000,00	782.462.458,00	2.210.542,00	784.673.000,00
Studi Trase LRT Cibubur – Baranangsiang – Kota Bogor	1,00	1.750.397.000	1.750.287.000	110.000,00	1.750.397.000,00

KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN	CAPAIAN KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN	ANGGARAN		PENYEBUT	PEMBAGI
		PAGU (PAK)	REALISASI (RAK)		
Pelatihan Sistem Operasi MRT	1,00	634.980.000	632.457.000	2.523.000,00	634.980.000,00
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Jaringan dan Lalu Lintas Kereta Api Perkotaan di Wilayah Jabodetabek	1,00	248.000.000	241.725.425	6.274.575,00	248.000.000,00
Pengoperasian ATCS BPTJ dan Monitoring Infrastruktur pada Titik Simpang	1,00	966.000.000	963.385.659	2.614.341,00	966.000.000,00
Pemeliharaan ATCS BPTJ	1,00	200.000.000	199.542.016	457.984,00	200.000.000,00
Pembangunan e-SPT dengan SMS gateway	1,00	151.800.000	149.523.000	2.277.000,00	151.800.000,00

KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN	CAPAIAN KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN	ANGGARAN		PENYEBUT	PEMBAGI
		PAGU (PAK)	REALISASI (RAK)		
Pengadaan Perangkat SMS Gateway	1,00	30.140.000	30.096.000	44.000,00	30.140.000,00
Perencanaan Teknis Pengembangan Matrik Asal Tujuan Jabodetabek 2019	1,00	1.040.000.000	1.039.890.000	110.000,00	1.040.000.000,00
HASIL PERHITUNGAN PENYEBUT		40.635.833			
HASIL PERHITUNGAN PEMBAGI		29.600.809.000,00			
HASIL EFISIENSI		14%			

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, didapati bahwa efisiensi di Lalu-Lintas BPTJ Tahun 2019 mencapai 14%.

Tabel III.9 Capaian Kinerja terhadap Realisasi Anggaran
Angkutan BPTJ Tahun 2019

NO	URAIAN TUGAS DAN JABATAN / UNIT KERJA	HASIL KERJA (BK)	BEBAN KERJA / BK / Th	JAM KERJA / BK	JAM KERJA / BK / Th	JAM KERJA EFEKTIF/Th
1	Direktorat Angkutan	Peningkatan, penyediaan serta pengembangan dan pelayanan angkutan umum di wilayah JABODETABEK	196	392	76.832	
Jumlah total jam kerja efektif per tahun					76.832	
Jumlah jam kerja efektif per pegawai per tahun						1.250 Jam
Perhitungan jumlah kebutuhan pegawai yaitu $76832 : 1250 \times \text{Orang} = 61,47$ (54 Orang)						

Jumlah pegawai pemangku jabatan saat ini : 54 (lima puluh empat) pegawai dan honorer, jumlah kebutuhan pegawai standar/tetap : 61 (enam puluh satu) pegawai, kekurangan pegawai : 7 (tujuh), kelebihan pegawai : 0 (nol) pegawai.

III.4 CAPAIAN KEBERHASILAN KINERJA BPTJ

Di Tahun 2019, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek memiliki 4 Sasaran Strategis dan 4 Indikator Kinerja Program yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Persentase rata-rata capaian adalah sebesar 97.05% dengan persentase penyerapan keuangan rata-rata sebesar 99.63% sebagaimana pada tabel III.3 dan tabel III.4 sebagai berikut

Tabel III.10 Capaian Keberhasilan Kinerja BPTJ

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SS1 Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas nasional dan peningkatan angkutan.	IKP4 Rasio panjang jalan nasional yang terlayani oleh jaringan angkutan umum perkotaan	%	70	67	95,714%

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
(1)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
	IKK43	Tersedianya dokumen perizinan angkutan umum jalan dan perairan di wilayah Jabodetabek	Dokumen (KP Izin)	16.620	16.620	100
	IKK44	Terlaksananya pembinaan perusahaan angkutan umum jalan, perairan dan perkeretaapian di wilayah Jabodetabek	Dokumen	1	1	100
	IKK46	Tersusunnya dokumen monitoring dan evaluasi pengembangan jaringan trayek transportasi jalan dan perairan di Jabodetabek	Dokumen	1	1	100
	IKK47	Tersusunnya dokumen Perencanaan pengembangan jaringan trayek transportasi jalan dan perairan di Jabodetabek	Trayek	20	20	100
	IKK49	Tersusunnya dokumen monitoring dan evaluasi pengembangan angkutan umum transportasi perkeretaapian di Jabodetabek	Dokumen	1	1	100
	IKK54	Terlaksananya monitoring,	Dokumen	1	1	100

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
(1)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		evaluasi dan pengembangan jaringan lintas angkutan barang jalan, perairan dan perkeretaapian di Jabodetabek				
	IKK55	Tersusunnya Dokumen Perencanaan jaringan lintas angkutan barang jalan, perairan dan perkeretaapian di Jabodetabek	Dokumen	1	1	100
SS2 Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi	IKP2 Persentase penurunan jumlah kecelakaan dengan menggunakan angkutan umum di wilayah Jabodetabek		%	10,8	13,65	126,39%
	IKK33	Terselenggaranya Pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan Nasional di wilayah Jabodetabek	Laporan	8	8	100
		Rambu	%	62,50	62,50	100
		Penerangan Jalan	%	62,74	62,74	100
		RPPJ	%	65,71	65,71	100
		Marka	%	60,52	60,52	100
		Warning Light	%	61,40	61,40	100

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
(1)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		Cermin Tikung	%	0,00	0,00	0
		Paku Jalan	%	0,00	0,00	0
	IKK34	Terselenggaranya pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan Nasional di wilayah Jabodetabek	Laporan	1	1	100
	IKK63	Pelaksanaan pengawasan SPM operasional terminal, stasiun, dan pelabuhan angkutan perairan	Dokumen	1	1	100
	IKK64	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan angkutan	Dokumen	1	1	100
	IKK65	Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan angkutan di wilayah Jabodetabek	Dokumen	1	1	100
	IKK66	Tersedianya Sistem Informasi Manajemen (SIM) pengawasan angkutan di wilayah Jabodetabek	Dokumen	1	1	100

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
(1)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
	IKK67	Pembinaan keselamatan sarana angkutan orang dan barang di wilayah Jabodetabek	Dokumen	1	1	100
SS3 Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	IKP3 Kecepatan rata-rata kendaraan umum pada jam puncak di wilayah Jabodetabek		Km/Jam	17	22,86	134,47%
	IKK1	Terlaksananya monitoring dan evaluasi SPM Simpul dan Fasilitas Pendukung Transportasi Darat di wilayah	Dokumen	1	1	100
	IKK2	Terlaksananya peningkatan pengetahuan teknis tentang Transportasi Darat	Dokumen	1	1	100
	IKK3	Tersusunnya dokumen perencanaan Terminal Tipe A di Wilayah Jabodetabek	Dokumen	4	4	100
	IKK4	Terlaksananya pembangunan /perawatan/pen gembangan prasarana transportasi darat dan fasilitas pendukung di wilayah Jabodetabek	Dokumen	1	1	100

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
(1)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
	IKK5	Tersusunnya dokumen evaluasi atas pembangunan dan pengembangan Transportasi Jalan di wilayah Jabodetabek	Dokumen	1	1	100
	IKK9	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan prasarana dan fasilitas pendukung perkeretaapian di jabodetabek	Dokumen	5	5	100
	IKK10	Tersusunnya dokumen NSPK perkeretaapian di Wilayah Jabodetabek	Dokumen	2	2	100
	IKK11	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelayanan prasarana perkeretaapian di Jabodetabek	Dokumen	1	1	100
	IKK36	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pengembangan Jaringan Kereta Api Perkotaan di Jabodetabek	Dokumen	1	1	100
	IKK37	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Sistem Operasi dan Lintas Pelayanan KA	Laporan	2	2	100

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
(1)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		Perkotaan di Wilayah Jabodetabek				
	IKK29	Tersusunnya Perencanaan; fasilitas perlengkapan jalan Nasional di wilayah Jabodetabek	Laporan	1	1	100
	IKK30	Terlaksana nya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Ruas dan Simpang Jalan Nasional di wilayah Jabodetabek	Laporan	1	1	100
	IKK31	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Lalu Lintas di Jalan Nasional Wilayah Jabodetabek	Laporan	1	1	100
	IKK32	Terlaksana nya pembinaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di wilayah Jabodetabek	Laporan	1	1	100
	IKK27	Tersedianya penilaian dan pemberian rekomendasi analisis dampak lalu lintas di Jalan Nasional	Lokasi	18	28	155

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
(1)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		Wilayah Jabodetabek				
	IKK28	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi analisis dampak lalu lintas di Jabodetabek	Laporan	2	2	100
	IKK41	Terselenggaranya Intelligent Transport System (ITS) di wilayah Jabodetabek	Laporan	2	2	100
	IKK42	Terciptanya Pengembangan teknologi bidang lalu lintas di wilayah Jabodetabek	Laporan	3	3	100
SS4 Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi	IKP1 Modal share (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek		%	32	32	100,005
	IKK19	Tersusunnya dokumen perencanaan Kawasan Berbasis Angkutan Massal di wilayah Jabodetabek	Dokumen	4	4	100
	IKK23	Terlaksananya bimbingan dan bantuan teknis tentang fasilitas integrasi simpul di wilayah Jabodetabek	Dokumen	2	2	100

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
(1)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
	IKK24	Tersusunnya dokumen perencanaan Integrasi Simpul Transportasi di wilayah Jabodetabek	Dokumen	2	2	100
	IKK62	Tersusunnya Dokumen Perencanaan sumber, pemanfaatan dan pengelolaan pendanaan angkutan wilayah Jabodetabek	Dokumen	2	1	50

III.5 CAPAIAN KEBERHASILAN KINERJA LAINNYA UNIT KERJA

3.5.1 Sekertariat BPTJ

Pada tahun 2019, terdapat sejumlah capaian kegiatan lainnya di Sekretariat BPTJ yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat BPTJ untuk memberikan pelayanan, dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di Lingkungan BPTJ. Adapun capaian kinerja lainnya yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

a. Penataan Organisasi dan Pengelolaan SDM

Penataan organisasi dan pengelolaan SDM merupakan salah satu capaian Sekretariat BPTJ dalam menunjang tugas pokok dan fungsi BPTJ dalam mengelola transportasi Jabodetabek. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penataan Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Kegiatan ini meliputi reorganisasi BPTJ guna meningkatkan kinerja instansi serta menyukseskan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek 2018 – 2029. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan jangka panjang pengembangan organisasi, SDM dan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPTJ.



Gambar III.9 Pengarahan Penataan Organisasi dan Reformasi Birokrasi BPTJ oleh Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Perhubungan

2. *Capacity Building* Sumber Daya Manusia BPTJ

Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan potensi SDM di lingkungan BPTJ dan memberikan penyegaran kemampuan pegawai dalam pelaksanaan tugas bekerja sama dengan sub sektor lain seperti STTD, Bekasi ataupun PPSDMAP, Bogor.



Gambar III.10 Capacity Building SDM BPTJ

3. Penyelenggaraan Pengadaan CPNS Formasi Tahun 2019

Kegiatan ini untuk mendukung penyelenggaraan pengadaan CPNS tahun 2019 yang meliputi kegiatan seleksi administratif hingga kegiatan supervisi selama periode pendaftaran CPNS 2019, kemudian dilanjutkan dengan proses menjawab sanggahan calon pelamar hingga pengumuman kelulusan tahap administrasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempersiapkan penyelenggaraan pengadaan CPNS tahun 2019 dengan baik dan sesuai ketentuan serta terselenggaranya koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait.



Gambar III.11 Koordinasi Proses Verifikasi Berkas Pelamar

4. Peningkatan Jiwa Korsia

Kegiatan peningkatan kebersamaan yang melibatkan seluruh pegawai di lingkungan BPTJ. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pelatihan dasar mengenai kedisiplinan dan jiwa korsia pegawai serta menumbuhkan rasa tanggung jawab.



Gambar III.12 Pengembangan Karakter Bagi Pegawai Non ASN di Lingkungan BPTJ

5. Penyuluhan Gerakan Anti Narkoba

Kegiatan penyuluhan dan tes kesehatan dari penggunaan narkoba yang dilakukan untuk semua pegawai di lingkungan BPTJ. Kegiatan ini juga dilakukan di sejumlah terminal yang dikelola oleh BPTJ. Tujuan dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyuluhan anti narkoba dan pemeriksaan terhadap pegawai dan pengemudi di beberapa terminal di kawasan Jabodetabek. Salah satu contoh kegiatan ini adalah di Hotel Permata, Bogor pada Selasa, 20 Agustus 2019 di Hotel Permata, Bogor.



Gambar III.13 Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)

b. Maturitas SPIP

menunjukkan tingkatan unit kerja dalam mengendalikan potensi risiko dan pelaksanaan pengendaliannya untuk mencapai tugas pokok dan target kinerja yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, penyusunan SPIP di Lingkungan BPTJ di akomodir oleh Sekretariat BPTJ khususnya Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Maturitas SPIP dinilai terhadap 25 sub unsur yang ada dalam SPI. Secara garis besar, tiap sub unsur dinilai berdasarkan pada lima tingkat yaitu :

- 1). Ketersediaan peraturan ataupun acuan (TOR/SOP) pelaksanaan kegiatan,
- 2). Sosialisasi atas peraturan dan acuan pelaksanaan kegiatan,
- 3). Implementasi atas peraturan dan acuan pelaksanaan kegiatan,
- 4). Terlaksananya evaluasi atas implementasi pelaksanaan kegiatan secara berkala,
- 5). Pemantauan atas evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkelanjutan.

Berdasarkan penilaian maturitas SPIP di Lingkungan BPTJ yang telah dilakukan oleh Tim Assessor Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan didapati nilai maturitas SPIP Tahun 2019 sebesar 3.08 atau “Terdefinisi”. Nilai tersebut lebih tinggi dibanding tahun 2018 yakni 2.96 atau “Berkembang”. Peningkatan maturitas didorong oleh pelaksanaan evaluasi secara berkala.



Gambar III.14 Koordinasi Penilaian Maturitas SPIP
di Lingkungan Kementerian Perhubungan

3.5.2 Direktorat Prasarana BPTJ

- a. Kegiatan : Monitoring Dampak Kebijakan Sektor Transportasi Tahun 2017 s.d 2018 di Wilayah Jabodetabek

Kegiatan monitoring dampak kebijakan sektor transportasi tahun 2017 s.d 2018 di Wilayah Jabodetabek difokuskan pada implementasi paket kebijakan penanganan kemacetan di Jalan Tol Jakarta – Cikampek, JAGORAWI dan Jakarta – Tangerang yang tertuang dalam PM 18 Tahun 2018 tentang Pengaturan Lalu Lintas Selama Masa Pembangunan Proyek Infrastruktur Strategis Nasional Di Ruas Jalan Tol Jakarta – Cikampek dan PM 36 Tahun 2018 tentang Pengaturan Lalu Lintas Di Ruas Tol Jakarta - Tangerang, Tangerang - Merak, Dan Jakarta - Bogor – Ciawi.

Untuk mengatasi kemacetan di ruas Tol Jakarta – Cikampek, kebijakan yang diimplementasikan sebagai berikut :

1. Pembatasan operasional angkutan barang di ruas jalan Tol Jakarta – Cikampek mulai Pukul 06.00 – 09.00 WIB setiap hari kerja kecuali hari libur nasional, dimulai dari ruas Cawang sampai dengan Karawang Barat dan sebaliknya,
2. Pembatasan lalu lintas mobil penumpang dengan sistem ganjil – genap arah Jakarta mulai Pukul 06.00 – 09.00 WIB setiap hari kerja kecuali hari libur nasional pada akses masuk (ramp on) prioritas (yang telah diimplementasikan pada ramp on Bekasi Barat 1, Bekasi barat 2, dan Bekasi Timur 2),
3. Lajur khusus angkutan umum untuk mobil bus arah Jakarta Pukul 06.00 – 09.00 WIB setiap hari kerja kecuali hari libur nasional mulai dari Pintu Tol Bekasi Timur hingga exit Tol Halim.

Untuk mengatasi kemacetan di ruas Tol Jakarta – Tangerang, kebijakan yang diimplementasikan sebagai berikut :

1. Pembatasan operasional angkutan barang di ruas jalan Tol Jakarta – Tangerang dan Tangerang - Merak mulai Pukul 06.00 – 09.00 WIB setiap hari kerja kecuali hari libur nasional, dilakukan pada akses masuk (ramp on) Cikupa, Bitung 2, Karawaci 4, Tangerang 2, dan Kunciran 2 (arah Jakarta),
2. Pengaturan lalu lintas mobil penumpang dengan sistem ganjil – genap arah Jakarta mulai Pukul 06.00 – 09.00 WIB setiap hari kerja kecuali hari libur nasional pada akses masuk (ramp on) Karawaci 2, Karawaci 4, Kunciran 2, dan Tangerang 2,
3. Lajur khusus angkutan umum untuk mobil bus arah Jakarta Pukul 06.00 – 09.00 WIB setiap hari kerja kecuali hari libur nasional mulai dari Pintu Tol Tangerang 2 hingga exit Tol Kebon Jeruk.

Untuk mengatasi kemacetan di ruas Tol Jakarta – Bogor – Ciawi, kebijakan yang diimplementasikan sebagai berikut :

1. Pengaturan lalu lintas mobil penumpang dengan sistem ganjil – genap arah Jakarta mulai Pukul 06.00 – 09.00 WIB setiap hari kerja kecuali hari libur nasional pada akses masuk (ramp on) Cibubur 2;
2. Lajur khusus angkutan umum untuk mobil bus arah Jakarta Pukul 06.00 – 09.00 WIB setiap hari kerja kecuali hari libur nasional mulai dari Pintu Tol Bogor hingga exit Tol Pasar Rebo.



Gambar III.15 Pelaksanaan Monitoring Kebijakan Penanganan Ganjil Genap di Gerbang Tol di Wilayah Jabodetabek

Tabel III.11 Titik Pantauan ATCS di Wilayah Jabodetabek

NO.	KOTA BEKASI	KOTA BOGOR	KOTA DEPOK	KABUPATEN BEKASI	KABUPATEN BOGOR
1	Sp. Wahab Affan	Sp. Pomad	Sp. Pal UI	Sp. Sinda	Sp. Cibinong
2	Sp. Kranji	Sp. Talang	Sp. Cilodong	Sp. Kompas	Sp. Cikaret
3	Sp. Perumnas	Sp. Marwan	Sp. Bojong Sari	Sp. Exit Toll Cibitung	Sp. Gadog
4	Sp. Pemda	Sp. Pangrango	Sp. Sengon	Sp. Warung Bongkok	Sp. Ciawi
5	Sp. Kayu Ringin	Sp. Tugu Kujang	Sp. PLN	Sp. SGC	Sp. PM
6	Sp. BCP	Sp. Baranangsiang			Sp. Salabenda
7	Sp. Tol Barat	Sp. Bangbarung			Sp. Terminal Parung
8	Sp. Rawa Panjang	Sp. Pandu			Sp. IPB
9	Sp. Kartini	Sp. BORR			
10	Sp. Unisma/SMP 2	Sp. Warung Jambu			
11	Sp. Lotte Mart	Sp. Ekalosari			
12	Sp. Masuk Terminal	Sp. Yasmin			
13	Sp. Keluar Terminal	Sp. Lippo Plaza			
14	Sp. Bulak Kapal	Sp. Semplak			
15	Sp. Rawa Semut	Sp. SBJ			
16	Sp. Pekayon	Sp. Bubulak			
17	Sp. Kali Abang	Sp. Laladon			
18	Sp. Bank Jabar	Sp. Aspol			

Dalam pengoperasian ATCS dilakukan pemantauan kondisi lalu lintas dan dilaksanakan secara visual dengan memanfaatkan CCTV yang terpasang pada tiang-tiang Traffic Light untuk mengetahui :

1. Kondisi lalu lintas di persimpangan pada ruas jalan nasional,
2. Kondisi kinerja perangkat ATCS,
3. Potensi yang dapat menyebabkan kemacetan, dan
4. Kendala lainnya.

Berdasarkan pemantauan secara rutin yang telah dilaksanakan, apabila diketahui terjadi permasalahan lalu lintas pada lokasi-lokasi terpantau. Kondisi lalu lintas yang merupakan hasil pelaksanaan pemantauan secara rutin dan periodik untuk setiap bulan dengan berisikan informasi tentang kondisi lalu lintas pada persimpangan.

Berikut contoh hasil pemantauan Jalan Nasional yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 April - 3 Mei 2019, diperoleh kondisi lalu lintas yang memerlukan penanganan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Simpang Ciawi dan Simpang Terminal Parung Kabupaten Bogor



Gambar III.16 Hasil Pemantauan ATCS di Simpang Terminal Parung Kabupaten Bogor

Terdapat adanya hambatan samping seperti angkot yang mengetem terlalu lama di badan jalan dan mulut simpang sehingga mengganggu laju kendaraan lain serta terdapat pedagang kaki lima yang menggunakan badan jalan untuk berjualan.

2. Simpang Pal UI Depok



Gambar III.17 Hasil Pemantauan ATCS di Simpang Pal UI Depok

Terdapat adanya hambatan samping seperti angkot yang mengetem di badan jalan yang menyebabkan antrian kendaraan dan mengganggu laju kendaraan lain dan tidak menghiraukan adanya rambu larangan.

3. Simpang Rawa Panjang Kota Bekasi



Gambar III.18 Hasil Pemantauan ATCS di Simpang Rawa Panjang Kota Bekasi

Terdapat adanya hambatan samping seperti angkot yang mengetem terlalu lama di badan jalan sehingga mengganggu laju kendaraan lain.

Selain pemantauan untuk setiap simpang adapula pemantauan melalui alat detektor statistik ini dipasang di

beberapa ruas jalan yang terletak di wilayah Kota Bekasi. Saat ini baru tersedia di empat titik yaitu di simpang Kayu Ringin mengarah ke BCP dan mengarah ke Summarecon, satu di ruas jalan Ahmad Yani tepatnya didekat simpang

Alat detektor statistik dipasang untuk mendapatkan data terkait volume lalu lintas selama 24 jam. Data dari hasil detektor alat tersebut digunakan sebagai pengumpulan data lalu lintas yang nantinya dapat digunakan untuk optimalisasi kinerja ruas dan simpang.

Pemantauan juga dilakukan untuk mengetahui kondisi lalu lintas pada ruas jalan tol. Jalan tol di wilayah Jabodetabek menjadi salah satu bagian yang perlu diperhatikan sehingga pemantauan kondisi lalu lintas pada ruas tersebut mengingat besarnya volume kendaraan yang beroperasi di jalan tol tersebut. Pemantauan di ruas jalan tol dilakukan dengan tujuan untuk :

- Mengetahui waktu tempuh di ruas jalan tol,
- Mengetahui kecepatan kendaraan di ruas jalan tol, dan
- Mengetahui karakteristik lalu lintas di ruas jalan tol.

Berikut ini beberapa laporan hasil pemantauan ruas jalan tol di wilayah Jabodetabek pada bulan April 2019 :

a) Jalan Tol Jakarta – Cikampek

Tanggal	CIKARANG UTAMA – TEBET			TEBET – CIKARANG UTAMA		
	Jarak (km)	Waktu tempuh (menit)	Kecepatan (km/jam)	Jarak (km)	Waktu tempuh (menit)	Kecepatan (km/jam)
22-Apr-2019	30	59	30,51	30	102	17,65
23-Apr-2019	30	103	17,48	30	91	19,78
24-Apr-2019	30	86	20,93	30	88	20,45
25-Apr-2019	30	98	18,37	30	102	17,65
26-Apr-2019	30	99	18,18	30	97	18,56

b) Jalan Tol Jakarta – Tangerang

Tanggal	TANGERANG – TEBET			TEBET – TANGERANG		
	Jarak (km)	Waktu tempuh (menit)	Kecepatan (km/jam)	Jarak (km)	Waktu tempuh (menit)	Kecepatan (km/jam)
22-Apr-19	46	49	56,33	46	61	45,25
23-Apr-19	46	50	55,20	46	56	49,29
24-Apr-19	46	54	51,11	46	72	38,33
25-Apr-19	46	65	42,46	46	58	47,59
26-Apr-19	46	62	44,52	46	74	37,30

c) Jalan Tol Jakarta – Ciawi

tanggal	CIAWI – TEBET			TEBET – CIAWI		
	Jarak (km)	Waktu tempuh (menit)	Kecepatan (km/jam)	Jarak (km)	Waktu tempuh (menit)	Kecepatan (km/jam)
22-Apr-19	48	41	70,24	48	46	62,61
23-Apr-19	48	52	55,38	48	49	58,78
24-Apr-19	48	44	65,45	48	54	53,33
25-Apr-19	48	45	64,00	48	46	62,61
26-Apr-19	48	53	54,34	48	47	61,28

Karakteristik arus lalu lintas terbentuk dari pergerakan individu pengendara dan pengendara yang melakukan interaksi antara yang satu dengan yang lainnya pada satu ruas jalan. Arus lalu lintas pada suatu ruas jalan karakteristiknya akan bervariasi baik berdasarkan lokasi maupun waktunya. Selain itu perilaku pengemudi ikut mempengaruhi terhadap perilaku arus lalu lintas.

Dengan dilaksanakannya pengoperasian perangkat ATCS maka diperlukan suatu kegiatan monitoring terhadap infrastruktur terhadap perangkat ATCS pada setiap titik simpang yang dilakukan dengan metode survei lapangan. Kegiatan Monitoring ini telah dilaksanakan untuk mengetahui kondisi dan performa dari setiap perangkat yang terpasang di lapangan, terutama untuk optimalisasi lampu APILL dan speaker announcer mengingat kedua komponen tersebut tidak dapat dipantau secara langsung melalui ruang kontrol ATCS, serta apabila kondisi aktual menunjukkan terjadinya kendala atau permasalahan di lokasi dapat dengan segera dilakukan penanganan lebih lanjut.

b. Kegiatan : Pembangunan Sistem Perizinan Online Andalalin BPTJ



Gambar III.19 *Prototype Aplikasi Analisa Dampak Lalu Lintas*

Untuk mendukung transparansi dan elektronifikasi perizinan Andalalin di BPTJ maka dilakukan kegiatan Pembangunan Sistem Perizinan Online Andalalin BPTJ dengan harapan :

1. Terciptanya transparansi dalam proses penilaian Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas,
2. Terciptanya elektronifikasi (*paperless*) dalam proses penilaian Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas,
3. Mempermudah konsultan dan pengembang dalam pengurusan Rekomendasi Andalalin.

Hambatan yang muncul dalam kegiatan Pembangunan Sistem Perizinan Online Andalalin BPTJ sebagai berikut :

1. Diperlukan peralatan tambahan untuk mengimplementasi Sistem Perizinan Online Andalalin BPTJ secara optimal (Misal : Server tersendiri)
2. Perlu didukung workshop atau sosialisasi kepada pengembang dan konsultan yang akan mengurus rekomendasi Andalalin sehingga sistem yang baru dapat dipahami dan diimplementasikan

c. Kegiatan : Studi Trase LRT Cibubur - Baranangsiang - Kota Bogor

Kegiatan Studi Trase LRT Cibubur-Baranangsiang Kota Bogor ini adalah untuk mendapatkan pedoman, penilaian kajian kelayakan dan rancangan dasar jalur LRT Cibubur-Baranangsiang Kota Bogor dari segi aspek teknis dalam rangka persiapan pembangunan jalur LRT Cibubur-Baranangsiang Kota Bogor.



Gambar III.20 Pelaksanaan Penyusunan Studi Trase LRT Cibubur – Baranangsiang

Berdasarkan hasil rapat laporan akhir studi trase LRT Cibubur-Barangsiang bersama instansi–instansi terkait didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Trase yang berpotongan dengan jalan Tol, dapat berpotensi meningkatkan demand dan ekonomi di Kawasan tersebut.
 2. Stasiun Baranansiang disepakati dibangun diatas Terminal Barangsiang.
 3. Area dibagi dalam opsi trase terpilih ini sesuai dengan masukan dan ditauan kembali di pada konsep laporan akhir;
 4. Typical kontruksi disesuaikan dengan yang ada saat ini (*elevated*).
- d. Kegiatan : Pembangunan e-SPT dengan Pengadaan SMS Gateway

Sesuai dengan tata kelola administrasi pemerintah bahwa dalam pelaksanaan survai dan koordinasi diperlukan surat tugas/surat perintah tugas sebagai dasar hukum/ landasan penugasan pegawai BPTJ. Pembangunan aplikasi E-SPT dilaksanakan untuk membuat SPT (Surat Perintah Tugas) secara online. E-SPT ini berfungsi untuk mempermudah dalam pembuatan SPT untuk penulisan nama, gelar, dan isi tugas yang diperintahkan serta meminimalisir adanya duplikasi penugasan pegawai BPTJ.



Gambar III.21 Rapat Pembangunan e-SPT dan perangkat SMS Gateway

Kegiatan pengadaan perangkat SMS Gateway dilaksanakan sebagai server dari aplikasi E-SPT dengan SMS Gateway dimana setiap pegawai yang mendapat Surat Perintah Tugas akan menerima notifikasi SPT melalui SMS ke HP masing-masing pegawai.

- e. Kegiatan : Perencanaan Teknis Pengembangan Matrik Asal Tujuan Jabodetabek 2019



Gambar III.22 Koordinasi Perencanaan Teknis Pengembangan MAT Jabodetabek Tahun 2019

Tersusunnya matrik asal tujuan Jabodetabek Tahun 2019 yang digunakan sebagai data dasar perencanaan dalam pengembangan dan peningkatan layanan transportasi yang terintegrasi di Jabodetabek.

- f. Kegiatan : Pengadaan *Hardware* dan Pembangunan Aplikasi *E-Ticketing*

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengaplikasikan *E-Ticketing* di Terminal Jatijajar yang berfungsi sebagai *Collecting* data Penumpang yang terkoneksi pada mesin Gate Terminal yang akan terhubung pada Perangkat Komputer yang tersedia.



Gambar III.23 Pengembangan Aplikasi dan Pengadaan *Hardware E-Ticketing*

Kegiatan Pengadaan *hardware E-ticketing* berupa pengadaan *Gate E-Ticketing* (beserta mesin) sebanyak 2 (dua) buah, Perangkat Komputer, Min Tab dan printer untuk mencetak *QR code*. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengaplikasikan *E-Ticketing* di Terminal Jatijajar.

3.5.3 Direktorat Lalu-lintas BPTJ

- a. Monitoring dan Evaluasi SPM Terminal Penumpang Angkutan Jalan di Wilayah Jabodetabek



Gambar III.24 Monitoring dan Evaluasi SPM Terminal Penumpang Angkutan Jalan

Melakukan monitoring dan evaluasi kondisi Prasarana Terminal Tipe A di Jabodetabek sebagai pengawasan dan evaluasi teknis Terminal Penumpang Angkutan Jalan di Jabodetabek sehingga terselenggara fungsi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dalam pengawasan penyelenggaraan prasarana transportasi jalan di Jabodetabek.

Untuk mengetahui SPM Terminal Tipe A di Jabodetabek dengan menghitung tingkat pelayanan setiap terminal tipe A di Jabodetabek. Dengan tingkat pelayanan Terminal Tipe A yang baik maka menunjukkan SPM Terminal Tipe A di Jabodetabek sudah terpenuhi begitu juga sebaliknya. Pelayanan terminal tipe A yang dimaksud adalah Pelayanan Keselamatan, Pelayanan Keamanan, Pelayanan Keandalan/Keteraturan, Pelayanan Kenyamanan, Pelayanan Kemudahan/Keterjangkauan dan Pelayanan Kesetaraan.

Berdasarkan hasil Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Terminal Penumpang Angkutan Jalan di Jabodetabek Tahun 2019, berikut hasil analisis yang didapat :

Tabel III.12 Analisa Tingkat Pelayanan
Terminal Tipe A Jabodetabek

No	Nama Terminal	Aspek Pelayanan	Skor (Dalam Persentase)	Rata-Rata	Hasil
1	Kampung Rambutan DKI Jakarta	Keselamatan	70	88	Tingkat Pelayanan Terpenuhi
		Keamanan	100		
		Kehandalan/Keteraturan	100		
		Kenyamanan	83		
		Kemudahan/Keterjangkauan	75		
		Kesetaraan	100		

No	Nama Terminal	Aspek Pelayanan	Skor (Dalam Persentase)	Rata-Rata	Hasil
2	Kalideres DKI Jakarta	Keselamatan	80	85	Tingkat Pelayanan Terpenuhi
		Keamanan	100		
		Kehandalan/Keteraturan	66		
		Kenyamanan	75		
		Kemudahan/Keterjangkauan	88		
		Kesetaraan	100		
3	Baranangsiang Kota Bogor	Keselamatan	10	51	Tingkat Pelayanan Cukup Terpenuhi
		Keamanan	100		
		Kehandalan/Keteraturan	50		
		Kenyamanan	58		
		Kemudahan/Keterjangkauan	88		
		Kesetaraan	0		
4	Jatijajar Kota Depok	Keselamatan	35	70	Tingkat Pelayanan Cukup Terpenuhi
		Keamanan	100		
		Kehandalan/Keteraturan	66		
		Kenyamanan	71		
		Kemudahan/Keterjangkauan	50		
		Kesetaraan	100		
5	Pondok Cabe Kota Tangerang Selatan	Keselamatan	30	81	Tingkat Pelayanan Terpenuhi
		Keamanan	100		
		Kehandalan/Keteraturan	100		
		Kenyamanan	92		
		Kemudahan/Keterjangkauan	63		
		Kesetaraan	100		
6	Poris Plawad Kota Tangerang	Keselamatan	30	78	
		Keamanan	100		
		Kehandalan/Keteraturan	100		

No	Nama Terminal	Aspek Pelayanan	Skor (Dalam Persentase)	Rata-Rata	Hasil
		Kenyamanan	63		Tingkat Pelayanan Terpenuhi
		Kemudahan/Keterjangkauan	75		
		Kesetaraan	100		
7	Induk Kota Bekasi	Keselamatan	10	53	Tingkat Pelayanan Cukup Terpenuhi
		Keamanan	100		
		Kehandalan/Keteraturan	66		
		Kenyamanan	42		
		Kemudahan/Keterjangkauan	75		
		Kesetaraan	25		

b. Bimtek Terminal Tipe A di Jabodetabek



Gambar III.25 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Terminal Tipe A di Jabodetabek

Melakukan pembahasan terkait kegiatan sewa menyewa BMN di lingkungan BPTJ terutama di 4 Terminal Tipe A yang dikelola oleh BPTJ.

Pelaksanaan Bimbingan Teknis dilaksanakan dengan metode diskusi antara narasumber dan peserta berkaitan dengan pelaksanaan simulasi sewa di lingkungan BPTJ.

1. Dengan diadakannya bimbingan teknis ini, diharapkan dapat terjadi timbal balik yang bermanfaat bagi BPTJ dalam kegiatan sewa BMN sebagai PNBK;
2. Terkait kegiatan sewa menyewa BMN di lingkungan BPTJ terutama di 4 Terminal Tipe A yang dikelola oleh BPTJ

harus teregistrasi terlebih dahulu dalam aplikasi SIMAK-BMN Kementerian Keuangan;

3. Acuan yang digunakan dalam Kegiatan Pengelolaan BMN ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Kementerian Keuangan akan membantu terkait teknis-teknis dalam Pengelolaan BMN di aset-aset Kementerian Perhubungan terutama BPTJ;
4. Diharapkan terdapat tindak lanjut terkait Kegiatan Pengelolaan BMN di BPTJ dari terselenggaranya Bimbingan Teknis Simulasi Pelaksanaan Sewa di Lingkungan BPTJ ini.

c. Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



Gambar III.26 Pelaksanaan Survey Fasilitas Pendukung

Melakukan Monitoring terhadap Fasilitas Pendukung di wilayah Jabodetabek sebagai pengawasan dan evaluasi teknis terhadap penyelenggaraan prasarana transportasi jalan.

Hasil pelaksanaan *survey* dari 8 koridor :

1. Koridor Kabupaten Bekasi

Berdasarkan hasil survei yang telah dilaksanakan terdapat 14 halte dengan kondisi eksisting 2 halte tidak layak karena kondisinya sangat buruk yaitu Halte di depan Pabrik Suzuki dan Halte depan Kantor Pemadam Kebakaran, kemudian 2 halte membutuhkan perbaikan yaitu halte depan pasar Cibitung dan Halte di seberang pasar Cibitung, dan 10 halte masih layak digunakan dengan kondisi eksisting baik.

2. Koridor Kota Bekasi

Berdasarkan hasil survei yang telah dilaksanakan terdapat 31 halte dengan kondisi eksisting 6 Halte perlu perbaikan yaitu Halte Bulak Kapal, Halte Perkantoran Pemkot Bekasi 2, Halte Institut STIAMI, Halte Seberang Taman Kota, Halte Depan Yayasan Bina Tunggal dan Halte Seberang Ruko Festival Sultan Agung. Sedangkan 25 Halte lainnya masih layak untuk digunakan dengan kondisi eksisting baik.

3. Koridor Kota Depok

Berdasarkan hasil survei yang telah dilaksanakan terdapat 6 halte dengan kondisi eksisting 2 halte tidak layak karena kondisinya sangat buruk dan membutuhkan perbaikan yaitu Halte Mall Cimanggis dan Halte Komplek SDN Depok Jaya, kemudian 4 halte lainnya masih layak digunakan dengan kondisi eksisting baik.

4. Koridor Kota Bogor

Berdasarkan hasil survei yang telah dilaksanakan di koridor Kota Bogor terdapat 30 halte dengan kondisi eksisting 7 halte tidak layak karena kondisinya sangat buruk dan membutuhkan perbaikan yaitu Halte Warung Jambu, Halte Bantar Jati 2, Halte Bantar Jati 1, Halte IPB MM, Halte Kebun Raya (Kiri Jalan), Halte Botani, Halte Tanpa Nama depan Hotel Amaris, Halte Damkar serta 23 halte masih layak digunakan dengan kondisi eksisting baik.

5. Koridor Kabupaten Bogor

Berdasarkan hasil survei yang telah dilaksanakan di koridor Kabupaten Bogor terdapat 13 halte dengan kondisi eksisting 10 halte tidak layak karena kondisinya sangat buruk dan membutuhkan perbaikan yaitu Halte Toyota K.H Abdullah Bin Nur, Halte Radar Bogor, Halte Kolam Renang Yasmin, Halte Ruko Yasmin, Halte Ruko Yasmin 2, Halte Semplak 1, Halte Semplak 2, Halte SBJ 2, Halte SBJ 1, Halte Perum Sinbad, serta 3 halte yang sudah layak untuk digunakan karena kondisinya baik, yaitu Halte Yasmin Transmart, Halte Hermina, Halte Yogya Dramaga.

6. Koridor Kota Tangerang

Berdasarkan hasil survei yang telah dilaksanakan di koridor Kota Tangerang terdapat 26 halte dengan kondisi eksisting 6

Halte tidak layak karena kondisinya buruk dan membutuhkan perbaikan yaitu Halte Pom Bensin Pintu Tol Bitung, Halte Jati, Halte Giant, Halte Bank BTPN, Halte Tanah Tinggi, Halte Timbangan serta 20 halte masih layak digunakan dengan kondisi eksisting baik.

7. Koridor Kabupaten Tangerang

Berdasarkan hasil survei yang telah dilaksanakan di koridor Kabupaten Tangerang terdapat 3 halte dengan kondisi eksisting 3 Halte tidak layak karena kondisinya buruk dan membutuhkan perbaikan yaitu Halte Kecamatan Balaraja, Halte Ramayana dan Halte Sabar Subur.

8. Koridor Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan hasil survei yang telah dilaksanakan di koridor Kota Tangerang Selatan terdapat 11 Halte dengan kondisi eksisting 10 Halte tidak layak karena kondisinya buruk dan membutuhkan perbaikan yaitu Halte Transjabodetabek Juanda 1, Halte Transjabodetabek Juanda 2, Halte Kecil Dekat UIN, Halte UIN Jakarta, Halte JPO UIN, Halte JPO UIN 1, Halte Legoso 1, Jembatan Penyabangan Orang UIN, Halte Plaza Ciputat dan Halte Living Plaza serta 1 halte dalam kondisi baik yaitu Halte Tip Top dan layak untuk digunakan.

Dari hasil pengamatan diatas sebagian besar permasalahan adalah tindakan vandalisme yang disebabkan tidak adanya pengawasan yang dilakukan terhadap fasilitas dan infrastuktur yang dimiliki, maka dari itu perlu adanya pengawasan lebih lanjut dengan cara pemasangan cctv pada setiap halte tersebut, dan dilakukan penindakan lebih lanjut dengan cara pemberian sanksi berupa pemberian denda.

d. Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimum Stasiun Kereta Api



Gambar III.27 Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimum Stasiun Kereta Api

Sebagai pengawasan dan evaluasi teknis terhadap implementasi SPM Stasiun Penumpang sehingga terselenggara fungsi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dalam pengawasan penyelenggaraan transportasi, terutama dalam hal SPM Stasiun Penumpang di Jabodetabek.

Berikut aspek-aspek dalam monitoring dan evaluasi dari implementasi SPM Stasiun Penumpang di Jabodetabek :

a. KESELAMATAN

No	Item Monitoring	Standar	Hasil	Keterangan
1	Pemadam Api Ringan (APAR)	Ada	Ada	6 unit
2	Petunjuk jalur dan prosedur evakuasi	Ada	Ada	
3	Titik kumpul evakuasi	Ada	Ada	
4	Nomor-nomor telepon darurat	Ada	Ada	
5	Perlengkapan P3K	Ada	Ada	Poskes gabung di Cibitung
6	Kursi Roda	Ada	Ada	2 unit (1 rusak)
7	Tandu	Ada	Ada	1 unit
8	Lampu Penerangan	200-250 lux	-	

b. KEAMANAN

No	Item Monitoring	Standar	Hasil	Keterangan
1	CCTV	Ada	Ada	7 Unit
2	Security	Ada	Ada	23 personil dibagi 3 Shift
3	Stiker no telepon/SMS pengaduan tentang gangguan keamanan	Ada	Ada	

c. KEHANDALAN

No	Item Monitoring	Standar	Hasil	Keterangan
1	Penjualan tiket	max 180 detik per orang	OK	11.44 detik per orang
2	Tersedianya papan informasi tentang ketersediaan tempat duduk penumpang	Ada	Tidak ada	Karena tidak melayani kereta jarak jauh

d. KENYAMANAN

No	Item Monitoring	Standar	Hasil	Keterangan
1	Ruang tunggu penumpang (0,6 m2 per penumpang) dan dilengkapi tempat duduk	0,6 m2 per penumpang	-	
2	Kebersihan ruang tunggu	Bersih	Bersih	
3	Tempat boarding	Ada	Ada	
4	Toilet	Ada	Ada	
5	Mushola	Ada	Ada	
6	Pengatur sirkulasi udara (AC diruang tunggu)	-	-	Tidak tersedia ruang tunggu ber-AC

e. KEMUDAHAN

No	Item Monitoring	Standar	Hasil	Keterangan
1	Layout/denah Stasiun	Ada	Tidak Ada	

2	Tarif KA	Ada	Ada	
3	Peta jaringan KA	Ada	Ada	
4	Tersedianya papan informasi tentang ketersediaan tempat duduk penumpang	Ada	Tidak ada	Karena tidak melayani kereta jarak jauh
5	Ketersediaan informasi gangguan kereta	Ada	Ada	Melalui Announcer
6	Lokasi dan petunjuk arah angkutan lanjutan	Ada	Tidak Ada	
7	Informasi perjalanan KA dan layanan menerima pengaduan	Ada	Ada	
8	Alat bantu naik turun penumpang	Ada	Ada	
9	Tempat parkir	Ada	Ada	
10	Sirkulasi kendaraan keluar masuk	Lancar	Lancar	
11	Suara informasi dari PPKA	min. lebih 20 dBA dari kebisingan yang ada	-	

f. KESETARAAN

No	Item Monitoring	Standar	Hasil	Keterangan
1	Fasilitas untuk penyandang disabilitas	Ada	Ada	Garis Kuning
2	Terdapat ramp dengan kemiringan maks 10 0	Ada	Tidak Ada	
3	Akses jalan penyambung antar peron	Ada	Ada	
4	Ruang ibu menyusui	Ada	Tidak Ada	

g. INTEGRASI ANGKUTAN UMUM

No	Item Monitoring		Standar	Hasil	Kondisi	Selamat	Aman	Handal	Mudah	Setara
1	Park & Ride	Rambu2	Ada	-	-	-	-	-	-	-
		Lahan parkir motor	Ada	√	√	√	√	√	√	√
		Lahan parkir mobil	Ada	√	√	√	√	√	√	√
		Pedestrian	Ada	√	√	√	√	√	√	√
2	Kiss & Ride	Rambu2	Ada	-	-	-	-	-	-	-
		Lahan Drop Zone / Pick up zone motor (Layby)	Ada	√	√	√	√	√	√	√
		Lahan Drop Zone / Pick up zone mobil (Layby)	Ada	√	√	√	√	√	√	√
		Pedestrian	Ada	√	√	√	√	√	√	√
3	Angkutan Umum	Lahan parkir Angkutan umum (motor, mobil)	Ada	√	√	√	√	√	√	√
		Lahan Drop Zone / Pick up zone motor (Layby)	Ada	√	√	√	√	√	√	√
		Lahan Drop Zone / Pick up zone mobil (Layby)	Ada	√	√	√	√	√	√	√
		Transjakarta	Ada	-	-	-	-	-	-	-
		JPO	Ada	-	-	-	-	-	-	-
		Zebra cross	Ada	-	-	-	-	-	-	-
		Pedestrian	Ada	-	-	-	-	-	-	-

No	Item Monitoring		Standar	Hasil	Kondisi	Selamat	Aman	Handal	Mudah	Setara
		Penutup atas	Ada	-	-	-	-	-	-	-
4	Akses jalan penyambung antar peron		Ada	√	√	√	√	√	√	√
5	Peron	Pengaturan turun naik penumpang	Ada	√	√	√	√	√	√	√
		Peron (tempat naik penumpang)	Ada	√	√	√	√	√	√	√

e. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Integrasi Moda dan Pengembangan Kawasan Bertransit Angkutan Umum



Gambar III.28 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Integrasi Moda dan Pengembangan Kawasan Bertransit Angkutan Umum

Sebagai bentuk peningkatan pemahaman terhadap sumber daya manusia di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) terkait Pengembangan Kawasan Berorientasi Angkutan Umum Massal di Jabodetabek. Berdasarkan kegiatan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Integrasi Moda dan Pengembangan Kawasan Bertransit Angkutan Umum yang telah dilaksanakan pada Tanggal 25 September 2019 tersebut diperoleh kesimpulan sebagaimana berikut :

1. Dalam Penanganan transportasi di Jabodetabek, BPTJ tidak dapat berdiri sendiri dan perlu dukungan dari stakeholders lain;
2. Pengembangan Kawasan Berorientasi Angkutan Umum Massal (TOD) merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan di Jabodetabek;
3. Pemerintah Daerah masih menemui berbagai hambatan dalam mengimplementasikan Pengembangan Kawasan Berorientasi Angkutan Umum Massal (TOD);

4. RITJ merupakan pijakan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk merencanakan suatu program atau pelaksanaan kegiatan dan menjadi dasar dalam penentuan target, dan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan dalam rangka percepatan pelaksanaan TOD
5. Perlu pendampingan dari BPTJ berupa pedoman teknis perencanaan dan pelaksanaan TOD yang menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan dokumen agar sesuai dengan apa yang tercantum di dalam RITJ;
6. Terdapat dua permasalahan mendasar mengapa pelaksanaan pengembangan kawasan TOD menemui hambatan. Pertama adalah perlu dipastikan otoritas kelembagaan yang diberikan mandat untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kawasan TOD, dan yang kedua adalah terkait value dari Kawasan TOD itu sendiri;
7. Perlu dibuatkan Grand Design Pengembangan Kawasan Berorientasi Angkutan Umum Massal (TOD) secara 3 dimensi dalam bentuk RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan) untuk memudahkan perhitungan Land Value Capture dan proyeksi keuntungan finansial;
8. Melalui kegiatan Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Berorientasi Angkutan Umum Massal di Jabodetabek diharapkan dapat diperoleh gambaran terkait implementasi seluruh konsep yang tercantum di RITJ serta mendukung percepatan pengembangan kawasan TOD sehingga dapat segera menyelesaikan permasalahan transportasi di Jabodetabek.

f. Bimtek Integrasi Prasarana Transportasi Jalan dan Perkeretaapian



Gambar III.29 Kegiatan Bimbingan Teknis Integrasi Prasarana Transportasi Jalan dan Perkeretaapian

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) terkait Integrasi Prasarana Transportasi Jalan dan Kereta Api, terutama dalam hal pengintegrasian layanan transportasi di Jabodetabek.

Berdasarkan kegiatan Bimbingan Teknis Integrasi Prasarana Jalan dan Kereta Api yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2019 – 1 Februari 2019 tersebut diperoleh kesimpulan sebagaimana berikut :

1. Prasarana, yang mencakup jaringan, terminal dan fasilitasnya berfungsi sebagai penghubung fisik (*physical connector*) antar moda, dimana dari aspek fungsional, tata letak dan operasional dapat memfasilitasi alih moda untuk mewujudkan satu perjalanan tanpa hambatan (*single seamless services*). Keterpaduan prasarana dapat dilakukan dengan mendekatkan atau membangun suatu akses yang menghubungkan kedua prasarana sehingga memudahkan penumpang untuk melakukan perpindahan moda. Desain fasilitas perpindahan moda harus memperhatikan aspek-aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi penumpang.
2. Sistem Informasi, terbagi dalam *sistem informasi in vehicle* (di dalam kendaraan) dan *off vehicle* (di luar kendaraan), dapat berwujud sistem informasi tarif, rute, jadwal keberangkatan dan lain sebagainya. Penggunaan teknologi informatika (*computerized*) sangat mendukung faktor ini. Sebuah perpindahan moda yang didesain baik mesti menyediakan rute yang jelas antara pelayanan atau moda, yang meminimalkan waktu dan usaha ketika melakukan perpindahan. Kondisi ini dapat terjadi apabila sistem informasi didalam fasilitas transfer harus jelas dan mudah dimengerti oleh penumpang. Semua fasilitas perpindahan moda setidaknya harus memiliki satu titik

informasi yang menampilkan informasi mengenai semua jasa yang datang/berangkat pada perpindahan moda itu.

3. Kerjasama antar moda, sangat didukung oleh kompatibilitas sarana dan prasarana masing-masing moda, dengan standar pelayanan yang setara (dimanapun memungkinkan, perpindahan harus mempunyai kesetaraan yang sama dalam kenyamanan di kedua arah layanan/moda transportasi). Kerjasama ini dapat dilakukan antar operator baik publik maupun privat (swasta)
- g. pendampingan *Public Private Partnership* (PPP,) KPBU Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha



Gambar III.30 KPBU dalam Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe A Jabodetabek

Maksud dari kegiatan pendampingan PPP (*Public Privat Partnership*) KPBU kerjasama pemerintah adalah untuk mengawal progres PPP (*Public Privat Partnership*) KPBU kerjasama pemerintah yang dilakukan BPTJ.

Persoalan kemacetan perlu dipahami dalam kerangka pikir (*framework*) sebuah sistem transportasi bahwa secara makro transportasi terbentuk dari sistem kegiatan, sistem jaringan, dan sistem pergerakan orang/barang. Sistem kegiatan yang dimaksud adalah sebaran pusat-pusat kegiatan kota yang diekspresikan melalui sistem penggunaan lahan. Kemudian sistem jaringan adalah infrastruktur atau sarana prasarana transportasi, dan sistem pergerakan adalah karakteristik arus pergerakan barang/orang yang dapat dilihat dari jenis moda yang digunakan, waktu pergerakan, maksud pergerakan, dan sebagainya. Ketiga sistem tersebut memiliki sifat saling mempengaruhi satu sama lain.

Persoalan kemacetan tidak hanya diatasi dengan penyediaan jaringan jalan maupun penyediaan moda angkutan umum (*public transport*) saja, namun perlu diintegrasikan pula sebaran pusat-pusat kegiatan kotanya dengan system transportasi yang melayaninya. Praktek penanganan persoalan kemacetan di

kota-kota di dunia sudah mulai banyak yang meninggalkan cara lama melalui pendekatan suplai jaringan. Berbagai strategi inovatif mulai berkembang dengan konsep-konsep yang mengedepankan integrasi antara penggunaan lahan dengan transportasi.

Berikut merupakan hasil dari progress perkembangan pembangunan Terminal Tipe A Jabodetabek :

1. Terminal Jatijajar Kota Depok

Nama Pembangunan	Deskripsi	Issue Permasalahan	Progress		Hasil	Tindak Lanjut
Terminal Tipe A Jatijajar	Terminal Jatijajar merupakan terminal tipe A yang dikelola oleh BPTJ di Kota Depok. Terminal Jatijajar saat ini sedang dalam proses pembangunan lanjutan terminal (Pembongkaran atap, Pembangunan Arsitektur & Pembangunan Masjid). Pada Tahun 2019 juga dilakukan studi Review DED dengan konsep TOD	- Akses jalan menuju Pintu Tol Cimanggis untuk mengurangi kepadatan di Jalan Raya Bogor	Rapat	30 September 2019	Dirapatkan dengan Biro Perencanaan PUPR dengan diinisiasi Biro Perencanaan Kemenhub mengenai usulan pembangunan akses jalan;	- Bersurat kepada Kementerian PUPR untuk dapat melakukan pembebasan lahan jalan akses Tol sepanjang 4.5 km; - Rapat dengan BPJT untuk menawarkan Jalan Tol akses Terminal
		- Adanya penduduk yang membuat bangunan semi permanen pada lahan akses - Belum adanya Sertifikat Tanah Terminal Jatijajar termasuk sebagian lahan yang sudah dibebaskan untuk jalan akses	Survey	14 Oktober 2019	- Tinjauan lapangan bangunan disekitar Terminal Jatijajar	- Subbag BMN untuk segera menyelesaikan Sertifikat Terminal Jatijajar sekalian balik nama; - Bersurat kepada Pemda Kota Depok untuk klarifikasi IMB ruko dan warung di depan akses jalan Terminal Jatijajar - Menerbitkan surat pemberitahuan larangan pemakaian tanah tanpa izin di Terminal Jatijajar - Koordinasi dengan DPPKAD Kota Depok

Nama Pembangunan	Deskripsi	Issue Permasalahan	Progress		Hasil	Tindak Lanjut
						- Usulan pemagaran lahan yang telah di bebaskan - Menyurati Koordinator Terminal agar menindaklanjuti terkait tinjauan lapangan - Koordinator Terminal agar segera menindaklanjuti pembongkaran 1 warung dan memindahkan 2 warung (Menyurati Pemda Depok terkait izin mendirikan bangunan disekitar terminal).

2. Terminal Baranangsiang

Nama Pembangunan	Deskripsi	Issue Permasalahan	Progress		Hasil	Tindak Lanjut
Terminal Tipe A Baranangsiang	Terminal Tipe A Baranangsiang merupakan terminal tipe A yang dikelola oleh BPTJ di Kota Bogor. saat ini Terminal Baranangsiang sedang dalam proses Bangun Guna Serah dengan PT. PGI	- Lokasi pengendapan bus saat proses pembangunan belum tersedia - PT. PP melakukan perhitungan dengan luas	Rapat	10 Oktober 2019	- Luas lokasi pengendapan bus menyesuaikan dengan luas desain terminal sementara - Desain terminal & desain terminal sementara selama proses pembangunan belum diserahkan oleh PT. PGI	- PT. PGI segera menyerahkan Desain terminal & desain terminal sementara selama proses pembangunan - PT. PGI agar segera menghubungi pemilik lahan untuk segera menyediakan lokasi pengendapan bus;

Nama Pembangunan	Deskripsi	Issue Permasalahan	Progress		Hasil	Tindak Lanjut
		terminal hanya 13.000 m2 apabila mencapai 18.200 m2 maka akan menambah biaya konstruksi			- PT PP untuk menyampaikan terkait studi kelayakan proyek PT. PGI berlanjut atau tidak paling lambat 10 hari	- PT PP memaparkan hasil studi kelayakan proyek PT. PGI
		- PT PGI sampai saat ini belum bisa menyelesaikan desain Terminal dikarenakan belum adanya kesepakatan di internal pemegang saham terkait luasan terminal sebesar 18.200 m2 - PT PGI masih mempermasalahkan pemulihan jangka waktu perjanjian BGS	Rapat	22 Oktober 2019	- Akan dilakukan rapat antara BPTJ dengan seluruh pemegang saham konsorsium PGI untuk menandatangani kesepakatan; - PT. PGI setuju dengan penyerahan secara parsial dalam 2 Tahap, diawali tahap pembangunan Terminal terlebih dahulu; - PT. PGI akan bertemu dengan perwakilan Kejaksaan Agung untuk membahas revisi point 4 & 5 dalam LO No B-505/G/Gtn.2/10/2019	- BPTJ bersurat ke PT. PGI untuk mengkonfirmasi penyelesaian desain Terminal; - Legal Opinion dari Kejaksaan Agung belum dapat diberlakukan dan masih perlu diklarifikasi oleh BPK, BPKP, Biro Keuangan dan Itjen Kemenhub ; - Perlu dilakukan rapat pembahasan dengan pihak PT PGI dan bersurat kepada Kemenko Maritim untuk menindaklanjuti LO tersebut;

Nama Pembangunan	Deskripsi	Issue Permasalahan	Progress		Hasil	Tindak Lanjut
		- Keberatan BPTJ terhadap keluarnya Legal Opinion dari Kejaksaan Agung				
		- Kendala akses menuju lokasi terminal (Akses jalan underpass)	Rapat	30 September 2019	- Dirapatkan dengan Biro Perencanaan PUPR dengan diinisiasi Biro Perencanaan Kemenhub mengenai usulan pembangunan akses jalan;	- Bersurat kepada Kementerian PUPR untuk dapat melakukan pembangunan underpass dari Terminal Baranangsiang menuju jalan Tol;

2) Terminal Poris Plawad

Nama Pembangunan	Deskripsi	Issue Permasalahan	Progress		Hasil	Tindak Lanjut
Terminal Tipe A Poris Plawad	Terminal Poris Plawad merupakan terminal tipe A yang dikelola oleh BPTJ di Kota Tangerang. Terminal Poris Plawad direncanakan untuk dibangun melalui skema KPBU	- Proses sudah berjalan tetapi terhambat dengan permasalahan ijin rekomendasi KKOP (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan)				- Belum ada tindak lanjut sampai dengan saat ini, karena permasalahan ketinggian bangunan yang belum sesuai. - Membuat konsep surat undangan rapat koordinasi dengan calon pengembang dan instansi terkait/ Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

3) Terminal Pondok Cabe

Nama Pembangunan	Deskripsi	Issue Permasalahan	Progress		Hasil	Tindak Lanjut
Terminal Tipe A Pondok Cabe	Terminal Pondok Cabe merupakan terminal tipe A yang dikelola oleh BPTJ di Kota Tangerang Selatan, pada Tahun 2020 telah dianggarkan APBN untuk pembangunan Terminal Pondok Cabe	- Angkutan Kota belum masuk Terminal	Rapat	8 April 2019	- Sesuai kesepakatan, Metrotrans hanya dapat mengangkut penumpang di Terminal Pondok Cabe saja, tidak boleh mengangkut penumpang di sepanjang rute Angkot	- Perlu dilakukan koordinasi dengan Dishub Provinsi Jawa Barat dan Dishub Tangerang Selatan untuk perubahan trayek Angkot dan Direktorat Angkutan Ditjendat untuk trayek AKAP; - Menyurati Direktur Angkutan, BPTJ agar segera melakukan rapat koordinasi penertiban terminal liar di sekitar Lebak Bulus, Pondok Cabe, dll. - Membuat Nota Dinas kepada Direktur Angkutan agar segera mengadakan rapat tindak lanjut dengan UPT Provinsi Banten dan Pemerintah Kota Tangsel
		- Jalan Akses menuju terminal kurang strategis	Rapat	30 September 2019	- Dirapatkan dengan Biro Perencanaan PUPR dengan diinisiasi Biro Perencanaan Kemenhub mengenai usulan pembangunan akses jalan;	- Bersurat kepada Kementerian PUPR untuk dapat melakukan pembangunan Akses terminal langsung menuju Tol;

3.5.4 Direktorat Angkutan BPTJ

a. Penghargaan Pramudi dan Masinis Teladan di Wilayah Jabodetabek

Kegiatan Penghargaan Pramudi dan Masinis Teladan di Wilayah Jabodetabek dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara dan Tim Penilai yang telah ditunjuk dari perwakilan instansi masing-masing dan ditetapkan berdasarkan Surat Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Nomor: SK. 325 BPTJ Tahun 2019 Tentang Tim Penyelenggara Penghargaan Pramudi, Masinis Teladan dan Operator Angkutan Umum Terbaik Di Wilayah Jabodetabek Tahun 2019 dan SK. 324 BPTJ Tahun 2019 Tentang Tim Penilai Penghargaan Pramudi, Masinis Teladan dan Operator Angkutan Umum Terbaik Di Wilayah Jabodetabek Tahun 2019. Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 (empat) bulan mulai bulan Juni dan berakhir pada bulan September 2019. Penghargaan ini dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan Kemnhub kepada awak angkutan umum atas prestasi dan pengabdianya dalam bidang transportasi. Kegiatan ini terbagi menjadi 2 kali acara yaitu :

1. Pemilihan Pramudi dan Masinis Teladan di Wilayah Jabodetabek, dengan *output* dari kegiatan ini diantaranya :
 - a) Hasil Seleksi Tes Tertulis;
 - b) Hasil Seleksi Tes Wawancara; dan
 - c) Hasil Seleksi Tes Praktek.
2. Finalisasi Pemilihan Pramudi dan Masinis Teladan di Wilayah Jabodetabek, dengan kategori pemilihan sebagai berikut :
 - a) Kategori Pramudi Teladan Berbasis Bus,
 - b) Kategori Pramudi Teladan Berbasis Mobil Penumpang Umum/ Taksi,
 - c) Kategori Masinis.



Gambar III.31 Pemberian Penghargaan Pramudi dan Tes Praktek Pramudi

Penetapan Pemenang Penghargaan Pramudi dan Masinis Teladan di Wilayah Jabodetabek berdasarkan Surat Keputusan

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek **Nomor SK. 350 BPTJ Tahun 2019**, sebagai berikut :

1. Kategori Pramudi Teladan Berbasis Bus

No.	Kategori	Nama	Perusahaan	Nilai
1.	Juara I	Agus Kusuma	PO Kosub Transport	8,6129
2.	Juara II	Fernando Hugo R	PT. Hiba Utama	8,6110
3.	Juara III	Sahata	Perum PPD	8,6084
4.	Juara Harapan	Anggun Tria Mayangsari	PT. Mayasari Bhakti	8,5992

2. Kategori Pramudi Teladan Berbasis Mobil Penumpang Umum

No.	Kategori	Nama	Perusahaan	Nilai
1.	Juara I	Sumarmono	Blue Bird	7,7166
2.	Juara II	Yusep Purnomo	PT. Teknologi Pengangkutan	7,5292
3.	Juara III	Erwin Rachmawan	Blue Bird	7,4220
4.	Juara Harapan	Gunawan	PT. Teknologi Pengangkutan	7,3619

3. Kategori Masinis

No.	Kategori	Nama	Perusahaan	Nilai
1.	Juara I	Iwan Fauzi	PT. KCI	45,0000
2.	Juara II	Andik Krisdianto	PT. KCI	44,9778
3.	Juara III	Haruun	PT. KCI	44,7778
4.	Juara Harapan	Eko Purwanto	PT. KAI	44,7556

b. Penghargaan Operator Angkutan Umum Terbaik di Wilayah Jabodetabek

Kegiatan Penghargaan Operator Angkutan Umum Terbaik di Wilayah Jabodetabek dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara dan Tim Penilai yang telah ditunjuk dari perwakilan instansi masing-masing dan ditetapkan berdasarkan Surat Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Nomor: SK. 325 BPTJ Tahun 2019 Tentang Tim Penyelenggara Penghargaan Pramudi, Masinis Teladan dan Operator Angkutan Umum Terbaik Di Wilayah Jabodetabek Tahun 2019 dan SK. 324 BPTJ Tahun 2019 Tentang Tim Penilai Penghargaan Pramudi, Masinis Teladan dan Operator Angkutan Umum Terbaik Di Wilayah Jabodetabek Tahun 2019.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 (empat) bulan mulai bulan Juni dan berakhir pada bulan September 2019. Penghargaan ini dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan

Kemnhub kepada perusahaan operator atas prestasi dan pengabdianannya dalam bidang transportasi. Pelaksanaan terbagi menjadi 2 (dua) acara yaitu :

1. Penilaian Lapangan ke Perusahaan Operator, sebagai berikut :
 - a) Pemeriksaan Dokumen Perusahaan
Para peserta Perusahaan Operator mengirimkan dokumen perusahaan sebagai kelengkapan persyaratan dalam Pemilihan Operator Angkutan Umum Terbaik. Berdasarkan dokumen tersebut dilakukan pemeriksaan dokumen perusahaan oleh Tim Penyelenggara BPTJ sebagai proses administrasi peserta.
 - b) Penilaian Tinjauan Lapangan
Peninjauan Lapangan dilaksanakan kepada peserta yang telah melengkapi dokumen persyaratan yang diminta dan dilaksanakan selama 2 (dua) hari dengan mengunjungi kantor dan pool dari setiap perusahaan operator bersama Tim Penilai didampingi Tim Penyelenggara BPTJ.
2. Finalisasi Penilaian Operator Angkutan Umum Terbaik di Wilayah Jabodetabek, sebagai berikut:
 - a) Paparan oleh Masing-masing Perusahaan Operator dan sesi tanya jawab dengan Tim Penilai.
 - b) Rapat Penetapan Pemenang terhadap peserta Perusahaan Operator berdasarkan Kategori Pemilihan sebagai berikut:
 - (1) Kategori Pelayanan Prima Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek;
 - (2) Kategori Pelayanan Prima Angkutan Umum Dalam Trayek.



Gambar III.32 Pemberian Penghargaan
Kepada Operator Angkutan Terbaik

Penetapan Pemenang Penghargaan Operator Angkutan Umum Terbaik di Wilayah Jabodetabek berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek **Nomor SK. 350 BPTJ Tahun 2019**, sebagai berikut:

1. Kategori Pelayanan Prima Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek

No.	Predikat	Nama Perusahaan	Nilai
1.	Prima Utama	Blue Bird Grup	89,18
2.	Prima Madya	PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia	76,24
3.	Prima Pratama	PT. Ekspress Transindo	69,91
4.	Prima Pratama	Inkoppol	69,14
5.	Prima Pratama	PT. Transportasi Cendikia Bersama	67,40

2. Kategori Pelayanan Prima Angkutan Umum Dalam Trayek

No.	Predikat	Nama Perusahaan	Nilai
1.	Prima Utama	PT. Hiba Utama	86,12
2.	Prima Utama	PT. Sinar Jaya Megah Langgeng	85,05
3.	Prima Madya	PT. Transportasi Jakarta	81,93
4.	Prima Madya	Perum Damri	81,48
5.	Prima Madya	Perum PPD	80,98

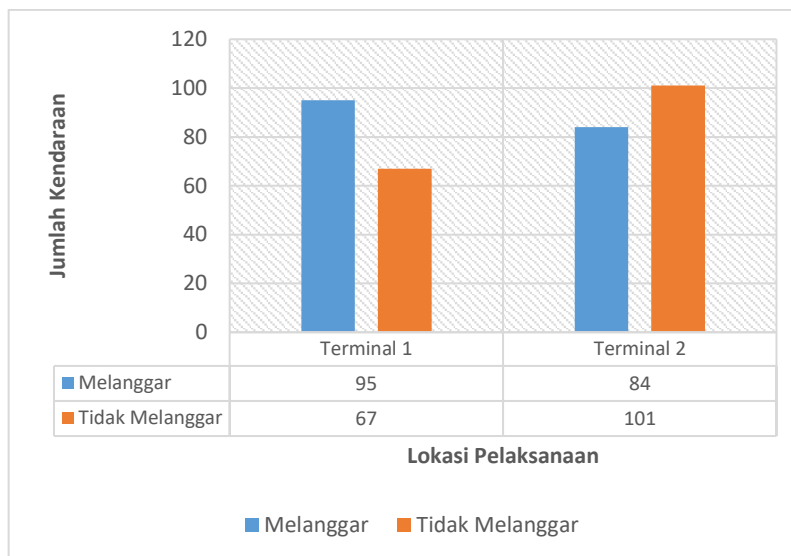
- c. Pengawasan Kinerja Lalu-Lintas dan Angkutan di Wilayah Jabodetabek

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menjaga kualitas dari Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang berorientasi pada aspek, seperti keselamatan, keamanan, kehandalan, kenyamanan, kemudahan, dan kesetaraan.

Fungsi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dalam pengawasan penyelenggaraan transportasi sangatlah diperlukan terutama dalam hal pengawasan keselamatan lalu lintas angkutan jalan bekerjasama dengan instansi terkait sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan SPM yang berlaku. Adapun kegiatan yang dikerjakan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. **Penegakan Hukum Angkutan Umum Bandara Soekarno-Hatta**

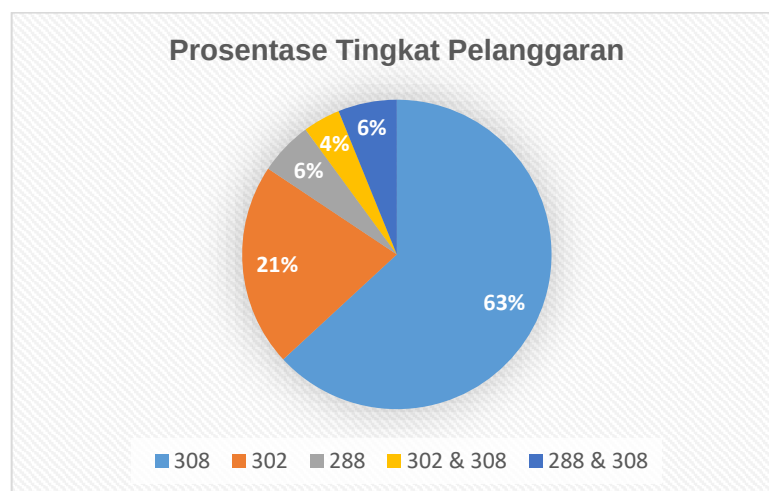
Pelaksanaan Penegakan Hukum Angkutan Umum di kawasan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta menemukan beberapa pelanggaran sebagaimana laporan dari data rekapitulasi operasi penegakan hukum di Terminal 1 dan 2 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta yaitu bisa dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar III.33 Rekap Jumlah Kendaraan yang Melanggar

Sesuai dengan gambar di atas, dari dua lokasi pelaksanaan didapatkan dari hasil operasi angkutan umum sebanyak 95 kendaraan yang masih melanggar di Terminal 1 dan Terminal 2 sebanyak 84 kendaraan.

Berdasarkan data jenis pelanggaran teridentifikasi beberapa pelanggaran, seperti tidak ada Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) dan Kartu pengawasan (KP), habisnya masa berlaku STUK dan KP, Penyimpangan izin operasional dan Penyimpangan Trayek.



Gambar III.34 Diagram Prosentase Pelanggaran

Pelanggaran terbanyak yang terjadi pada pasal 308 atau kendaraan tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan dan membawa izin kendaraan foto copy sebesar 63%.



Gambar III.35 Penegakan Hukum Angkutan Umum
Bandara Soekarno-Hatta

2. Pelaksanaan Kegiatan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (*Ramp Check*) Dalam Mendukung Pelaksanaan Angkutan Lebaran Tahun 2019 (1440H)

Guna meningkatkan pelayanan penumpang khususnya di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (JABODETABEK) perlu dilakukan kegiatan pemeriksaan kendaraan atau *Ramp Check*. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui kelaikan kendaraan angkutan umum untuk menjamin keselamatan penumpang, terutama pada saat kesiapan dalam mendukung pelaksanaan angkutan lebaran.

Monitoring dan pelaksanaan pemeriksaan kelaikan sarana transportasi bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pengoperasian sarana transportasi dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Sesuai kewenangannya melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap sarana transportasi sebelum keberangkatan dan setelah tiba sesuai dengan ketentuan standar keselamatan.
- b) Melakukan pengawasan terhadap perawatan sarana transportasi agar selalu dilaksanakan sesuai dengan tata cara perawatan yang telah ditetapkan.
- c) Mengambil tindakan secara dini, berkoordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait, apabila menemukan kondisi yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan dalam pengoperasian sarana transportasi.

- d) Memberikan pembinaan kepada aparaturnya pemerintah atau operator sarana transportasi untuk selalu memahami tugas dan tanggungjawabnya, serta memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kelayakan serta tata cara pengoperasian sarana dengan selamat dan aman.
- e) Meningkatkan pengawasan terhadap seluruh aparat pada unit-unit pelaksana teknis dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pengoperasian, agar sepenuhnya mematuhi peraturan perundang-undangan.

Kegiatan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Bidang Angkutan Umum (*Ramp Check*) Dalam Mendukung Pelaksanaan Angkutan Lebaran Tahun 2019 (1440H) dilaksanakan oleh Tim Inspeksi dari pegawai Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dan Tim Pemeriksa dari Dinas Perhubungan terkait. Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan sarana dititikberatkan pada armada bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) dan Bus Pariwisata yang akan dipergunakan sebagai armada angkutan lebaran dengan mekanisme sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan pemeriksaan sarana angkutan dilakukan di Pool Bus dan Terminal Utama Jabodetabek.
- b) Waktu pelaksanaan kegiatan pada tanggal 2 Mei s.d 7 Juni 2019.
- c) Kegiatan dilaksanakan dengan pemeriksaan unsur administrasi, unsur teknis utama serta unsur penunjang sesuai dengan ketentuan yang diatur Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.5637/AJ.403/DRJD/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Adapun pelaksanaan pemeriksaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Bidang Angkutan Umum (*Ramp Check*) dilakukan dengan perlengkapan sebagai berikut :

- a) Formulir Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b) Stiker Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c) Alat Tulis.
- d) Alat dokumentasi.

- e) Media pelaporan (WA group, alat komunikasi, dsb) serta input data hasil pemeriksaan inspeksi keselamatan melalui <http://pengawasan-bptj.com>.



Gambar III.36 Rekapitulasi Kegiatan Rampcheck Angkutan Lebaran Tahun 2019/1440 H Periode 29 Mei S.D 13 Juni 2019

Total kendaraan yang dilakukan pemeriksaan inspeksi keselamatan pada Masa Penyelenggaraan Angkutan Lebaran tahun 2019/1440H tanggal 29 Mei s.d 13 Juni 2019 di seluruh lokasi sebanyak 2.385 unit bus, dengan rincian sebanyak 825 unit bus (35%) memenuhi persyaratan inspeksi keselamatan dan sebanyak 1.560 unit bus (65%) tidak memenuhi persyaratan inspeksi keselamatan.

Kesimpulan hasil rekapitulasi rampcheck periode 29 April s.d 13 Juni 2019 wilayah jabodetabek adalah sebagai berikut :

- Kecenderungan yang terjadi adalah perusahaan AKAP kurang responsif, lalai melakukan perawatan serta tidak peduli dalam mempersiapkan armada untuk Angkutan Lebaran.
- Perlu dilakukan pembinaan terhadap operator angkutan umum agar lebih peduli terhadap keselamatan penumpang maupun awak angkutan umumnya.
- Memberikan bantuan subsidi angkutan berupa bantuan perbaikan/penggantian spare part kendaraan kepada perusahaan AKAP.



Gambar III.37 Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan LLAJ yang dilakukan oleh Personil PKB Tangerang Selatan di Terminal Pondok Cabe

3. Inspeksi Keselamatan Kendaraan guna menunjang pelaksanaan Angkutan Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019

Kegiatan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Bidang Angkutan Umum (*Ramp Check*) Dalam Mendukung Pelaksanaan Angkutan Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019 dilaksanakan oleh Tim Inspeksi dari pegawai Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dan Tim Pemeriksa dari Dinas Perhubungan terkait.

Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan sarana dititikberatkan pada angkutan dalam trayek seperti armada bus AKAP yang merupakan angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten / Kota yang melalui lebih dari satu daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek. Selain itu, pemeriksaan sarana juga dilakukan pada angkutan tidak dalam trayek seperti Bus Pariwisata yang merupakan angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar pelayanan angkutan dalam trayek.

Adapun pelaksanaan pemeriksaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Bidang Angkutan Umum (*Ramp Check*) dilakukansama dengan pelaksanaan Pelaksanaan Angkutan Lebaran Tahun 2019. Berdasarkan hasil evaluasi pemeriksaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Bidang Angkutan Umum (*Ramp Check*) Tanggal 12 November s.d 17 Desember 2018 dapat dilaporkan sebagai berikut :

Dari hasil penginputan data inspeksi keselamatan jalan, didapatkan banyaknya jumlah armada atau bus yang telah

diperiksa pada semua lokasi baik yang di terminal maupun di pool sebanyak 1863 unit bus.

Kegiatan inspeksi keselamatan jalan ini dilakukan langsung di lapangan, baik di terminal maupun di pool bus dengan rincian jumlah bus yang diperiksa berdasarkan lokasi pemeriksaan yaitu seperti tabel di bawah ini.

Total kendaraan yang dilakukan pemeriksaan inspeksi keselamatan pada Masa Kesiapan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 tanggal 12 November s.d 17 Desember 2018 di seluruh lokasi sebanyak 1863 unit bus, dengan rincian sebanyak 597 unit bus (32%) memenuhi persyaratan inspeksi keselamatan dan sebanyak 1263 unit bus (68%) tidak memenuhi persyaratan inspeksi keselamatan. Berikut adalah tabel detail dari hasil pemeriksaan secara keseluruhan baik yang diijinkan operasional, peringatan/perbaiki, dilarang operasional, tilang dan dilarang operasional.



Gambar III.38 Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019



Gambar III.39 Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019 di Terminal Pulo Gebang

III.6 REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2019 realisasi anggaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebesar Rp. 168.376.619.059 (99,63%) dari total alokasi anggaran sebesar Rp 168.993.920.000.

3.6.1 Alokasi Total Anggaran Tahun 2019

Sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2019 dana DIPA diperoleh sebesar Rp 168.993.920.000 (Seratus Enam Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2019 Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek mampu melaksanakan penyerapan anggaran 99,63% dari total pagu.

Tabel III.13 Pagu Anggaran BPTJ Tahun 2017-2019
dan Realisasi Anggaran BPTJ Tahun 2017 - 2019

No.	Unit Kerja	2017			2018		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Sekretariat	52.142.866.000	44.179.475.358	84,73	78.406.602.000	72.795.149.039	92,84
2	Direktorat Prasarana	26.963.976.000	26.737.224.804	99,16	62.497.090.000	61.667.097.722	98,67
3	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan	29.835.588.000	29.007.715.971	97,23	50.581.642.000	49.967.649.397	98,79
4	Direktorat Perencanaan dan Pengembangan	11.501.570.000	11.467.028.125	99,7	13.258.921.000	13.139.253.608	99,10
Jumlah		120.444.000.000	111.391.444.258	92,48	204.744.255.000	197.569.149.766	96,50

No.	Unit Kerja	2019		
		Pagu	Realisasi	%
1	Sekretariat	74.215.456.000	73.980.925.114	99,68%
2	Direktorat Prasarana	51.424.015.000	51.126.999.546	99,42%
3	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan	29.914.419.000	29.867.843.167	99,84%
4	Direktorat Angkutan	13.440.030.000	13.400.851.232	99,71%
Jumlah		168.993.920.000	168.376.619.059	99,63%

Apabila dilihat secara terperinci menurut jenis belanja yang terdiri dari Belanja pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal, maka akan didapatkan data sebagaimana ditampilkan pada Tabel III.14 berikut :

Tabel III.14 Penyerapan Keuangan BPTJ Per Jenis Belanja Tahun 2019

No.	Keterangan	Pegawai	Barang	Modal	Total
1	Pagu	18.558.480.000	76.692.346.000	109.493.429.000	204.744.255.000
2	Realisasi	14.008.807.134	74.860.959.124	108.695.727.057	197.565.493.315
3	Persentase	75.48%	97.61%	99.27%	96.49%
Sisa		4.549.672.866	1.831.386.876	797.701.943	7.178.761.685

3.6.1 Analisis Dana Yang Tidak Terserap oleh Unit Kerja

Jumlah anggaran yang tidak terserap oleh Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 220.159.256,00 atau 0.4% dari total alokasi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 0.15 Dana Tidak Terserap pada Sekretariat BPTJ
Berdasarkan Jenis Belanja

NO	JENIS BELANJA	DANA TIDAK TERSERAP (Rp)	PROSENTASE (%)
1	Belanja Pegawai	1.831.437	0,1
2	Belanja Barang	157.067.849	0,33
3	Belanja Modal	41.259.970	0,65
TOTAL		200.159.256	0,27

Tidak terserapnya belanja barang sebesar 0,33% merupakan sisa belanja layanan perkantoran seperti langganan daya dan jasa. Sedangkan tidak terserapnya belanja modal sebesar 0,65% merupakan efisiensi belanja dari sisa kontrak.

Dalam penyerapaan anggaran tahun 2019 yang tidak dapat terserap oleh Direktorat Prasarana sebesar Rp 297.015.454 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 0.16 Analisa Dana yang Tidak Terserap oleh Direktorat Prasarana

JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA DANA	PENYERAPAN ANGGARAN (%)
BELANJA PEGAWAI	-	-	-	-
BELANJA MODAL	46.590.426.000	46.335.039.604	255.386.396	99.4%
BELANJA BARANG	4.851.589.000	4.791.959.942	59.629.058	98.8%

Penyerapan anggaran tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan proses revisi DIPA masih berjalan pada Triwulan 1 yang menyebabkan ketersediaan waktu yang ada tidak cukup untuk melaksanakan penyerapan secara keseluruhan untuk kegiatan Direktorat Prasarana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

Dalam penyerapan anggaran Direktorat Lalu Lintas tahun 2019 terdapat sisa sebesar Rp 46.575.833 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 0.17 Analisa Dana yang Tidak Terserap oleh Direktorat Lalu Lintas

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran	Anggaran Yang Tidak Terserap
SUB DIREKTORAT LALU LINTAS TRANSPORTASI DARAT					
1.	Pengoperasian dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.629.309.000,00	1.623.037.712,00	99,62%	6.271.288
2.	Pembangunan Sistem Perizinan Online Andalalin BPTJ	193.700.000,00	193.462.500,00	99,88%	237.500
3.	Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Perlengkapan Jalan Nasional di wilayah Jabodetabek	350.000.000,00	348.993.772,00	99,71%	1.006.228
4.	Evaluasi Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Jabodetabek	381.350.000,00	379.487.800,00	99,51%	1.862.200
5.	Monitoring Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas	622.651.000,00	621.515.100,00	99,82%	1.135.900
6.	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Nasional Jabodetabek	19.262.169.000,00	9.257.921.575,00	99,98%	4.247.425
7.	Perencanaan Teknis Penerapan Emision Zone di Jabodetabek	790.600.000,00	90.600.000,00	100,00%	0
8.	Peningkatan Kinerja Lalu Lintas Ruas dan Simpang di Jabodetabek	565.040.000,00	55.786.150,00	98,36%	9.253.850

9.	Monitoring dan Evaluasi Dampak Kebijakan di Sektor Transportasi Tahun 2017 - 2018	784.673.000,00	782.462.458,00	99,72%	2.210.542
No.	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran	Anggaran Yang Tidak Terserap
SUB DIREKTORAT LALU LINTAS PERKERETAAPIAN					
1.	Studi Trase LRT Cibubur – Baranangsiang – Kota Bogor	1.750.397.000	1.750.287.000	99,99%	110.000
2.	Pelatihan Sistem Operasi MRT	634.980.000	632.457.000	99,60%	2.523.000
3.	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Jaringan dan Lalu Lintas Kereta Api Perkotaan di Wilayah Jabodetabek	248.000.000	241.725.425	97,47%	6.274.575
SUB DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN INFORMASI TRANSPORTASI					
9.	Pengoperasian ATCS BPTJ dan Monitoring Infrastruktur pada Titik Simpang	966,000,000	963,385,659	99.73%	2.614.341
10.	Pemeliharaan ATCS BPTJ	200,000,000	199,542,016	99.77%	457.984
11.	Pembangunan e-SPT dengan SMS gateway	151,800,000	149,523,000	98.50%	2.277.000
12.	Pengadaan Perangkat SMS Gateway	30,140,000	30,096,000	99.85%	44.000
13.	Perencanaan Teknis Pengembangan Matrik Asal Tujuan Jabodetabek 2019	1,040,000,000	1,039,890,000	99.99%	110.000
14.	Pembangunan Aplikasi E-Ticketing	183,700,000	180,070,000	98.02%	3.630.000
15.	Pengadaan Hardware E-Ticketing	129,910,000	127,600,000	98.22%	2.310.000
JUMLAH		29.914.419.000	29.867.843.167	99.71 %	46.575.833

Berikut ini ditampilkan rekap daya serap anggaran Direktorat Angkutan tahun anggaran 2019 :

Tabel 0.18 Analisa Dana yang Tidak Terserap oleh Direktorat Angkutan

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PAGU PERJENIS KEGIATAN (Rp.)	BOBOT (%)	WAKTU (Bulan)	WAKTU PELAKSANAAN TAHUN 2017												KETERANGAN
					JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	
2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
051	Peningkatan Sarana Penunjang dan Manajemen Pelayanan Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek		100,00														97,23
A	Semiloka Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang di Wilayah Jabodetabek	308.926.000	1,06	7		0,06	0,16	0,16				0,16	0,16	0,16	0,21	0,21	
B	Sosialisasi Peraturan Menteri Terkait Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Massal di Jabodetabek	266.200.000	0,91	7			0,14	0,14				0,14	0,14	0,14	0,14	0,07	
C	Sosialisasi Implementasi Sistem Perizinan Jabodetabek	170.375.000	0,59	6					0,10			0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
D	Penataan Perizinan Angkutan Umum Jabodetabek	217.150.000	0,75	7		0,11	0,11	0,11				0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	
E	Pengadaan Blanko Dokumen Perizinan	400.000.000	1,37	2								0,02		1,36			
F	Pengolah Data dan Komunikasi	900.000.000	3,09	5		0,62	0,62		0,62	0,62				0,62			
G	Studi/Kajian/DED/STD/Amdal/Norma/Standar/Pedoman/Kriteria/Prosedur Bidang Lalu Lintas dan Angkutan BPT J	706.100.000	2,43	8	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30					
052	Manajemen Permintaan Lalu Lintas di Wilayah Jabodetabek																
A	Evaluasi Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas	247.200.000	0,85	10		0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,23
B	Pengawasan dan Monitoring Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas	323.125.000	1,11	10		0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	
C	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Ruas Jalan di Jabodetabek	334.800.000	1,15	8		0,14	0,14	0,14	0,14	0,14		0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	
D	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Simpang di Jabodetabek	324.300.000	1,11	8		0,14	0,14	0,14	0,14	0,14		0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	
E	Monitoring dan Evaluasi Keselamatan Jalan Lalu Lintas di Jabodetabek	327.500.000	1,13	8		0,14	0,14	0,14	0,14	0,14		0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	
F	Pengadaan Alat Uji Fasilitas Perlengkapan Jalan (Marka dan Rambu)	730.000.000	2,51	3			0,04	0,02							2,45		
G	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	16.118.139.000	55,40	4				0,06	0,20	6,66	10,13	12,50		12,50	13,35		
H	Studi/Kajian/DED/STD/Amdal/Norma/Standar/Pedoman/Kriteria/Prosedur Bidang Lalu Lintas dan Angkutan BPT J	1.517.650.000	5,22	6				0,87	0,87	0,87	0,87	0,87		0,87			
I	Pengadaan Alat Survey Lalu Lintas dan Angkutan	516.500.000	1,78	2				0,89						0,89			
053	Pengawasan Operasional Lalu Lintas dan Angkutan di Wilayah Jabodetabek																
A	Koordinasi Teknis Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Se-Jabodetabek	281.449.000	0,97	4		0,02	0,24	0,24	0,24						0,22		
B	Pengawasan Pelaksanaan RITJ Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah Bekasi	141.800.000	0,49	4		0,12	0,12				0,12			0,12			
C	Pengawasan Pelaksanaan RITJ Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah Bogor	192.500.000	0,66	4		0,12	0,12				0,17			0,17			
D	Pengawasan Pelaksanaan RITJ Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah Tangerang	172.500.000	0,59	4		0,12	0,12				0,15			0,15			
E	Pengawasan Pelaksanaan RITJ Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah DKI Jakarta	198.400.000	0,68	4		0,12	0,12				0,17			0,17			
F	Pengawasan Operasional Terminal Tipe A di Wilayah Jabodetabek	234.500.000	0,81	4		0,02	0,20	0,68	0,68	0,68	0,68			0,20	0,18	0,68	
G	Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	1.577.876.000	5,42	8		0,01	0,24	0,68	0,68	0,68	0,68				1,09	0,68	0,68
H	Pencetakan Spanduk Posko Hari Raya Jabodetabek 2017	27.000.000	0,09	2				0,05	0,05								
I	Pencetakan Booklet/ Leaflet Posko Hari Raya Jabodetabek 2017	50.000.000	0,17	2				0,09	0,09								
J	Pencetakan Sticker Kelaikan Sarana Angkutan hari Raya Jabodetabek 2017	200.000.000	0,69	2				0,34	0,34								
K	Pengadaan Tenda Posko Hari Raya Jabodetabek	180.000.000	0,62	2				0,31	0,31								
L	Penataan Ruang Posko Terpadu Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Angkutan Hari Raya Jabodetabek 2017	100.000.000	0,34	2				0,17	0,17								
M	Penggunaan Sistem Media Elektronik SMS/Broadcast Posko Hari Raya Jabodetabek	181.900.000	0,63	2				0,31	0,31								
N	Pengadaan Peralatan Penunjang Pengawasan Lalu Lintas	200.000.000	0,69	1											0,69		
O	Pengadaan Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak	176.000.000	0,60	2				0,30									
P	Pengolah Data dan Komunikasi	1.000.000.000	3,44	2			0,05	1,72							1,67		
Q	Studi/Kajian/DED/STD/Amdal/Norma/Standar/Pedoman/Kriteria/Prosedur Bidang Lalu Lintas dan Angkutan BPT J	772.100.000	2,65	2			0,02	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,42			
		29.093.990.000															
	RENCANA BULAN INI				0,30	2,33	3,36	6,63	5,34	11,04	13,43	15,27	3,30	22,55	15,39	1,08	
	RENCANA KOMULATIF				0,30	2,64	5,99	12,62	17,96	29,00	42,43	57,69	60,99	83,54	98,93	100,00	
	REALISASI KOMULATIF				0,68	1,08	7,64	8,44	23,22	40,69	45,49	76,80	81,77	89,48	92,00	97,23	
	REALISASI BULAN INI				0,68	0,40	7,24	1,20	22,02	18,67	26,82	49,98	31,79	57,69	34,31	62,92	
	DEVIASI				-0,38	1,56	-1,65	4,18	-5,26	-11,69	-3,06	-19,11	-20,78	-5,94	6,93	2,77	

Berdasarkan kurva S daya serap diatas dapat diketahui daya serap anggaran direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebesar

- **Keuangan** : Rp. 13.366.479.602,-
- **Persentase**: 99,5 %
- **Total Pagu** : Rp. 13.440.030.000,-

BAB IV

PENUTUP

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) di dalam menyusun dan melaksanakan program kerja tahun 2019 mengacu pada visi dan misi Kementerian Perhubungan, tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Dalam tahun anggaran 2019, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) secara keseluruhan telah dapat melaksanakan sasaran tugas pokok dan fungsi sesuai dengan yang direncanakan, walaupun masih terdapat beberapa kegiatan yang masih memerlukan perhatian dan penyempurnaan di masa mendatang. Laporan Kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program yang telah disusun dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2019.

Laporan Kinerja ini disusun sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

IV.1 KESIMPULAN

1. Setelah mencermati hasil pengukuran capaian kinerja dari keseluruhan sasaran IK1. *Modal share* (pangsa pasar), IK3. Kecepatan rata – rata kendaraan umum dan IK5. Rasio konektivitas antar wilayah), dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran Indikator Kinerja 1, 3 dan 5 sampai dengan triwulan IV Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
 - a. Tahun 2019 sebesar 32% dengan capaian sampai dengan Triwulan IV Tahun 2019 adalah sebesar 32%,
 - b. IK3. Kecepatan rata – rata kendaraan umum pada jam puncak di wilayah Jabodetabek di tahun 2019 ditargetkan sebesar 17 km/jam. Capaian sampai dengan Triwulan IV tahun 2019 sebesar 22,86 Km/Jam,
 - c. IK5. Rasio konektivitas antar wilayah di wilayah Jabodetabek pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 70%. Capaian sampai dengan Triwulan IV (satu) tahun 2019 sebesar 67%.
2. Sekretariat BPTJ

Pada tahun 2019, seluruh sasaran target di bagian Sekretariat BPTJ yang direncanakan baik rencana kinerja tahunan (RKT dan PK) maupun rencana jangka menengah (Renstra) telah tercapai dan

sebagian diantaranya melebihi 100%. Capaian kinerja di tahun 2019 tidak jauh berbeda dengan pencapaian di tahun 2018, meskipun terdapat sejumlah pencapaian sasaran yang lebih tinggi disaat yang bersamaan pencapaian sasaran lainnya terhitung lebih rendah.

Untuk mencapai target tersebut, Sekretariat BPTJ telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 72.774.546.046,00 atau 99,7% dari total alokasi anggaran yaitu Rp. 78.406.602.000,00. Penyerapan anggaran tersebut lebih tinggi dibandingkan target penyerapan yakni 97% dan lebih tinggi dari penyerapan tahun 2018 yakni 96.49%. Dengan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran didapati bahwa efisiensi kinerja Sekretariat BPTJ mencapai 12.03%.

3. Direktorat Prasarana BPTJ

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi kinerja Direktorat Prasarana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) selama tahun 2019, tugas Direktorat Prasarana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) khususnya di bidang Prasarana Jabodetabek yang menjadi tanggung jawab Direktorat Prasarana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Kegiatan pada Direktorat Prasarana BPTJ T.A 2019 terbagi pada 3 (tiga) Sub Direktorat, yakni Sub Direktorat Prasarana Transportasi Darat, Sub Direktorat Prasarana Transportasi Perkeretaapian, dan Sub Direktorat Integrasi Prasarana Transportasi.
- b. Hasil rata-rata capaian kinerja kegiatan Direktorat Prasarana BPTJ sebesar 99,4%.
- c. Hasil rata-rata capaian keuangan Direktorat Prasarana pada Tahun 2019 sebesar 99,4% atau sebesar Rp. 51.126.999.546,- dari total pagu Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 51.424.015.000 ,.-.

4. Direktorat Lalu Lintas BPTJ

Dari hasil rata-rata pencapaian kinerja berdasarkan sasaran pada indikator kinerja utama serta hasil kegiatan yang telah dilaksanakan di Direktorat Lalu Lintas pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan pada Direktorat Lalu Lintas BPTJ T.A 2019 terbagi pada 3 (tiga) Sub Direktorat, yakni Sub Direktorat Lalu Lintas Transportasi Darat, Sub Direktorat Lalu Lintas Perkeretaapian, dan Sub Direktorat Pengembangan Sistem dan Informasi Transportasi.

- b. Hasil rata-rata capaian keuangan Direktorat Lalu Lintas pada Tahun 2019 sebesar 99,84 % atau sebesar Rp. 29.867.843.167 dari total pagu T.A 2019 sebesar Rp. 29.914.419.000.
5. Direktorat Angkutan BPTJ

Dari hasil rata-rata pencapaian kinerja berdasarkan sasaran pada indikator kinerja utama serta hasil kegiatan yang telah dilaksanakan di Direktorat Angkutan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

 - a. Dari hasil Analisa efisiensi Sumber Daya, Direktorat Angkutan masih kekurangan pegawai sejumlah 7 (tujuh) orang dengan jumlah pegawai saat ini hanya 54 (lima Puluh empat) orang dimana jumlah tersebut termasuk Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPN) berjumlah 23 orang.
 - b. Kegiatan pada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan BPTJ T.A 2019 terbagi pada 3 (tiga) Sub Direktorat, yakni Sub Direktorat AngkutanOrang, Sub Direktorat Angkutan Barang, dan Sub Direktorat Pendanaan dan Pengawasan Angkutan.
 - c. Hasil rata-rata capaian kinerja kegiatan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan BPTJ sebesar 99,5 %.
 - d. Hasil rata-rata capaian keuangan Direktorat Angkutan pada Tahun 2019 sebesar 99,5 % atau sebesar Rp. 13.366.479.602,- dari total pagu T.A 2019 sebesar Rp. 13.440.030.000,-.

IV.2 SARAN

1. Dalam penentuan jumlah target responden sebaiknya harus lebih realistis, karena dari jumlah target responden yang diharapkan sebanyak 260.000 orang, sampai dengan akhir kegiatan pada triwulan IV jumlah responden yang berhasil dihimpun sebanyak 49.756 orang responden, hanya 19% dari jumlah target responden yang diharapkan,

Dari ke tiga Indikator Kinerja (IK) yang ada, Capaian kinerja IK 5. Rasio konektivitas antar wilayah sampai dengan triwulan IV masih belum dapat mencapai dikarenakan beberapa pusat kegiatan di pinggiran wilayah Jabodetabek memiliki tingkat kepadatan rendah dan potensi *demand* yang dinilai kecil sehingga kurang menarik bagi pengusaha *autobus* untuk membuka layanan di daerah tersebut,

Perlunya melakukan pengawasan di lapangan serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam rangka pembukaan trayek baru khususnya pada pusat kegiatan yang belum terjangkau angkutan umum perkotaan dan pada wilayah pinggiran Jabodetabek serta melakukan kajian pemberian subsidi terhadap layanan angkutan umum pada wilayah tersebut sebagai upaya peningkatan capaian Indikator Kinerja Utama (IK) Rasio

Konektivitas antar wilayah, Metode yang dipakai dalam proses pengukuran harus sesuai dengan rumus pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sudah ditentukan didalam Renstra BPTJ dan objek yang menjadi pengukuran harus lebih jelas.

2. Sekretariat BPTJ

- a. Menyusun Dokumen Rencana Strategis yang selaras dengan unit eselon I (BPTJ) disertai dengan reuiu secara berkala sesuai dengan perubahan lingkungan strategis seperti adanya perubahan organisasi dan tata kerja dan tugas pokok dan fungsi organisasi, menyusun Perjanjian Kinerja yang selaras dengan Sasaran dan Indikator tahunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
- b. Memanfaatkan pencapaian kinerja sebagai dasar dalam penilaian kinerja unit kerja maupun individu terkait, hasil pengukuran kinerja mulai dari tingkat eselon IV ke atas dipergunakan untuk penilaian kinerja dalam rangka pemberian *reward & punishment*.
- c. Melaporkan laporan kinerja (LAKIP) Sekretariat BPTJ secara tepat waktu kepada Kepala BPTJ dan diupload ke aplikasi E-SAKIP Reuiu (esr.menpan.go.id) yaitu 30 hari setelah tahun anggaran berakhir, menyajikan laporan kinerja secara detail terkait pencapaian sasaran beserta analisis keberhasilan dan kegagalan serta alternatif solusinya.

3. Direktorat Prasarana BPTJ

Untuk mengatasi permasalahan ini maka pada tahun anggaran 2019 telah diprogramkan untuk optimalisasi fasilitas serta memotivasi tenaga kerja honorer agar dapat membantu kegiatan yang ada di Direktorat Prasarana BPTJ. Peran aktif seluruh jajaran pejabat struktural, fungsional, dan staf di Direktorat Prasarana melakukan kerjasama dan koordinasi yang baik dari semua pihak terkait juga dukungan sumber daya yang memadai sangat diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan tercapainya kegiatan yang telah diprogramkan pada tahun anggaran 2020.

4. Direktorat Lalu Lintas BPTJ

- a. Direktorat Lalu Lintas agar senantiasa meningkatkan kinerja dari tahun ke tahun agar mencapai 100%.
- b. Kegiatan terkait rapat-rapat koordinasi yang sifatnya internal dari Direktorat, Operasional kegiatan Lainnya Internal Direktorat kemudian Konsinyering untuk kegiatan penyusunan Dokumen

Internal Direktorat agar dilakukan dari masing-masing Sub Bagian TU di Direktorat.

- c. Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan pada Jalan Nasional di Jabodetabek perlu diimplementasikan dan database sebagai instrumen evaluasi serta diperlukan teknologi dalam monitoring pemeliharaan seluruh komponen fasilitas perlengkapan jalan dan sesuai Renstra Kegiatan dimaksud diatas sudah harus selesai pada Tahun 2019.
5. Direktorat Angkutan BPTJ
- a. Direktorat Angkutan agar senantiasa meningkatkan kinerja dari tahun ke tahun agar mencapai 100%.
 - b. Kegiatan terkait rapat-rapat koordinasi yang sifatnya internal dari Direktorat, Operasional kegiatan Lainnya Internal Direktorat kemudian Konsinyering untuk kegiatan penyusunan Dokumen Internal Direktorat agar dilakukan dari masing-masing Sub Bagian TU di Direktorat.
 - c. Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan pada Jalan Nasional di Jabodetabek perlu diimplementasikan dan database sebagai instrumen evaluasi serta diperlukan teknologi dalam monitoring pemeliharaan seluruh komponen fasilitas perlengkapan jalan dan sesuai Renstra Kegiatan dimaksud diatas sudah harus selesai pada Tahun 2019.

IV.3 TINDAK LANJUT ATAS HASIL EVALUASI

- 1. Pelaporan hasil penilaian capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) perlu memuat catatan terkait hal yang menjadi faktor keberhasilan dan juga faktor kegagalan dalam mencapai target pengukuran capaian kinerja.
- 2. Upaya yang perlu dilakukan dalam evaluasi kinerja di Lingkungan BPTJ adalah melakukan evaluasi pencapaian kinerja secara bulanan yang diikuti dengan rencana aksi tindak lanjut perbaikan pencapaian kinerja.

LAMPIRAN I

CAPAIAN TAHUN 2019

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
(1)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
SS1 Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas nasional dan peningkatan angkutan.	IKP4 Rasio panjang jalan nasional yang terlayani oleh jaringan angkutan umum perkotaan		%	70	67	95,714%
	IKK43	Tersedianya dokumen perizinan angkutan umum jalan dan perairan di wilayah Jabodetabek	Dokumen (KP Izin)	16.620	16.620	100
	IKK44	Terlaksananya pembinaan perusahaan angkutan umum jalan, perairan dan perkeretaapian di wilayah Jabodetabek	Dokumen	1	1	100
	IKK46	Tersusunnya dokumen monitoring dan evaluasi pengembangan jaringan trayek transportasi jalan dan perairan di Jabodetabek	Dokumen	1	1	100
	IKK47	Tersusunnya dokumen Perencanaan pengembangan jaringan trayek transportasi jalan dan perairan di Jabodetabek	Trayek	20	20	100

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
(1)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
	IKK49	Tersusunnya dokumen monitoring dan evaluasi pengembangan angkutan umum transportasi perkeretaapian di Jabodetabek	Dokumen	1	1	100
	IKK54	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengembangan jaringan lintas angkutan barang jalan, perairan dan perkeretaapian di Jabodetabek	Dokumen	1	1	100
	IKK55	Tersusunnya Dokumen Perencanaan jaringan lintas angkutan barang jalan, perairan dan perkeretaapian di Jabodetabek	Dokumen	1	1	100
SS2 Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi	IKP2 Persentase penurunan jumlah kecelakaan dengan menggunakan angkutan umum di wilayah Jabodetabek		%	10,8	13,65	126,39%
	IKK33	Terselenggaranya Pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan Nasional di wilayah Jabodetabek	Laporan	8	8	100

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
(1)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		Rambu	%	62,50	62,50	100
		Penerangan Jalan	%	62,74	62,74	100
		RPPJ	%	65,71	65,71	100
		Marka	%	60,52	60,52	100
		Warning Light	%	61,40	61,40	100
		Cermin Tikung	%	0,00	0,00	0
		Paku Jalan	%	0,00	0,00	0
	IKK34	Terselenggaranya pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan Nasional di wilayah Jabodetabek	Laporan	1	1	100
	IKK63	Pelaksanaan pengawasan SPM operasional terminal, stasiun, dan pelabuhan angkutan perairan	Dokumen	1	1	100
	IKK64	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan angkutan	Dokumen	1	1	100
	IKK65	Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan angkutan di wilayah Jabodetabek	Dokumen	1	1	100

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
(1)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
	IKK66	Tersedianya Sistem Informasi Manajemen (SIM) pengawasan angkutan di wilayah Jabodetabek	Dokumen	1	1	100
	IKK67	Pembinaan keselamatan sarana angkutan orang dan barang di wilayah Jabodetabek	Dokumen	1	1	100
SS3 Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	IKP3 Kecepatan rata-rata kendaraan umum pada jam puncak di wilayah Jabodetabek		Km/Jam	17	22,86	134,47%
	IKK1	Terlaksananya monitoring dan evaluasi SPM Simpul dan Fasilitas Pendukung Transportasi Darat di wilayah	Dokumen	1	1	100
	IKK2	Terlaksananya peningkatan pengetahuan teknis tentang Transportasi Darat	Dokumen	1	1	100
	IKK3	Tersusunnya dokumen perencanaan Terminal Tipe A di Wilayah Jabodetabek	Dokumen	4	4	100
	IKK4	Terlaksananya pembangunan /perawatan/pekerjaan pembangunan prasarana transportasi darat dan fasilitas	Dokumen	1	1	100

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
(1)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		pendukung di wilayah Jabodetabek				
	IKK5	Tersusunnya dokumen evaluasi atas pembangunan dan pengembangan Transportasi Jalan di wilayah Jabodetabek	Dokumen	1	1	100
	IKK9	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan prasarana dan fasilitas pendukung perkeretaapian di jabodetabek	Dokumen	5	5	100
	IKK10	Tersusunnya dokumen NSPK perkeretaapian di Wilayah Jabodetabek	Dokumen	2	2	100
	IKK11	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelayanan prasarana perkeretaapian di Jabodetabek	Dokumen	1	1	100
	IKK36	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pengembangan Jaringan Kereta Api Perkotaan di Jabodetabek	Dokumen	1	1	100
	IKK37	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Sistem Operasi	Laporan	2	2	100

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
(1)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		dan Lintas Pelayanan KA Perkotaan di Wilayah Jabodetabek				
	IKK29	Tersusunnya Perencanaan; fasilitas perlengkapan jalan Nasional di wilayah Jabodetabek	Laporan	1	1	100
	IKK30	Terlaksana nya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Ruas dan Simpang Jalan Nasional di wilayah Jabodetabek	Laporan	1	1	100
	IKK31	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Lalu Lintas di Jalan Nasional Wilayah Jabodetabek	Laporan	1	1	100
	IKK32	Terlaksana nya pembinaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di wilayah Jabodetabek	Laporan	1	1	100
	IKK27	Tersedianya penilaian dan pemberian rekomendasi analisis dampak lalu lintas di Jalan	Lokasi	18	28	155

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
(1)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		Nasional Wilayah Jabodetabek				
	IKK28	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi analisis dampak lalu lintas di Jabodetabek	Laporan	2	2	100
	IKK41	Terselenggaranya Intelligent Transport System (ITS) di wilayah Jabodetabek	Laporan	2	2	100
	IKK42	Terciptanya Pengembangan teknologi bidang lalu lintas di wilayah Jabodetabek	Laporan	3	3	100
SS4 Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi	IKP1 <i>Modal share</i> (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek		%	32	32	100,005
	IKK19	Tersusunnya dokumen perencanaan Kawasan Berbasis Angkutan Massal di wilayah Jabodetabek	Dokumen	4	4	100
	IKK23	Terlaksananya bimbingan dan bantuan teknis tentang fasilitas integrasi simpul di wilayah Jabodetabek	Dokumen	2	2	100
	IKK24	Tersusunnya dokumen perencanaan Integrasi Simpul Transportasi di	Dokumen	2	2	100

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
(1)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		wilayah Jabodetabek				
	IKK62	Tersusunnya Dokumen Perencanaan sumber, pemanfaatan dan pengelolaan pendanaan angkutan wilayah Jabodetabek	Dokumen	2	1	50

LAMPIRAN II

REKAPITULASI

REALISASI DAYA SERAP TA. 2019

No.	Unit Kerja	2017			2018		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Sekretariat	52.142.866.000	44.179.475.358	84,73	78.406.602.000	72.795.149.039	92,84
2	Direktorat Prasarana	26.963.976.000	26.737.224.804	99,16	62.497.090.000	61.667.097.722	98,67
3	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan	29.835.588.000	29.007.715.971	97,23	50.581.642.000	49.967.649.397	98,79
4	Direktorat Perencanaan dan Pengembangan	11.501.570.000	11.467.028.125	99,7	13.258.921.000	13.139.253.608	99,10
Jumlah		120.444.000.000	111.391.444.258	92,48	204.744.255.000	197.569.149.766	96,50

No.	Unit Kerja	2019		
		Pagu	Realisasi	%
1	Sekretariat	74.215.456.000	73.980.925.114	99,68%
2	Direktorat Prasarana	51.424.015.000	51.126.999.546	99,42%
3	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan	29.914.419.000	29.867.843.167	99,84%
4	Direktorat Angkutan	13.440.030.000	13.400.851.232	99,71%
Jumlah		168.993.920.000	168.376.619.059	99,63%

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	% Realisasi
Belanja Pegawai	18.804.700.000	18.802.861.091	99,99%
Belanja Barang	70.480.996.000	70.211.553.787	99,62%
Belanja Modal	79.708.224.000	79.362.196.709	99,57%
Total	168.993.920.000	168.376.611.587	99,63%

LAMPIRAN III

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2019

LAMPIRAN IV

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2019

LAMPIRAN V

REVISI PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2019



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK**

**RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI
JABODETABEK**

TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PELAKSANAAN ANGGARAN, CAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN.....	4
2.1 PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2018.....	4
2.2 PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TAHUN ANGGARAN 2018.....	6
2.3 CAPAIAN KEGIATAN BPTJ TAHUN 2018.....	8
2.4 PERMASALAHAN	20
2.5 TANTANGAN.....	27
BAB III SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL.....	29
3.1 SASARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019	29
3.2 SASARAN PROGRAM BPTJ.....	32
3.3 TARGET KINERJA BPTJ TAHUN 2016-2019.....	34
3.4 TARGET KINERJA BPTJ TAHUN 2019.....	39
BAB IV PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019	50
4.1 KERANGKA PENDANAAN	51
4.2 PENDANAAN BPTJ TAHUN 2017-2019.....	51
4.3 INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS BPTJ TAHUN 2019	58
4.4 DEVIASI ANGGARAN DENGAN KEBUTUHAN BPTJ TAHUN 2019	65
BAB V PENUTUP.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Realisasi Per Jenis Belanja BPTJ TA 2018.....	5
Gambar 2.2 Realisasi Anggaran Per Kegiatan TA 2018.....	5
Gambar 3.1 Sinkronisasi Sasaran RPJMN Tahun 2015-2019 dengan Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019	31
Gambar 4.1 Deviasi Anggaran BPTJ Tahun 2019	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Detail Realisasi Anggaran BPTJ Tahun 2019	6
Tabel 3.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Program Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2019	33
Tabel 3.2 Tahapan Pencapaian Target Kinerja BPTJ 206-2019.....	36
Tabel 3.3 Target Kinerja BPTJ Tahun 2019	39
Tabel 4.1 Rincian Pendanaan Untuk Setiap Eselon II BPTJ Tahun 2017-2019.....	52
Tabel 4.2 Rincian Kegiatan Prioritas Sekretariat BPTJ TA 2019	63
Tabel 4.3 Kegiatan Prioritas Direktorat Prasarana TA 2019	63
Tabel 4.4 Kegiatan Prioritas Direktorat Lalu Lintas TA 2019	64
Tabel 4.5 Kegiatan Prioritas Direktorat Angkutan TA 2019	65
Tabel 4.6 Deviasi Anggaran BPTJ Tahun 2019	66

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT Rencana Kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Tahun 2019 telah selesai disusun, sebagai pedoman bagi unit-unit kerja di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Kementerian Perhubungan dalam melaksanakan pembangunan transportasi di Tahun Anggaran 2019.

Pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk DKI Jakarta semakin meningkatkan masalah mobilitas perkotaan. Tingginya jumlah penduduk berimplikasi terhadap pemanfaatan sumber daya kota yang terbatas. Ketidakseimbangan antara infrastruktur publik yang tersedia dengan jumlah penduduk yang membutuhkannya menyebabkan kurangnya pelayanan kota termasuk di sektor transportasi. Kondisi ini menyebabkan tingginya jumlah kendaraan pribadi yang tidak seimbang dengan ketersediaan ruas jalan, sehingga permasalahan kemacetan lalu lintas tidak pernah selesai bahkan semakin parah.

Jakarta merupakan pusat bisnis dan pusat pemerintahan. Sudah banyak teori yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan transportasi, namun tetap saja tidak memberikan solusi yang efektif. Bahkan, sampai ada gagasan untuk memindahkan Ibu Kota Indonesia ke tempat lain. Hal ini karena, selama ini pembangunan di Indonesia lebih banyak terpusat di Jakarta atau di Pulau Jawa. Permasalahan-permasalahan transportasi yang sulit dicari jalan keluarnya sampai saat ini adalah cara mengatur pertumbuhan kendaraan pribadi setiap tahun, kurangnya disiplin dari pengguna jalan, buruknya perencanaan dan penataan kota, drainase perkotaan yang buruk di beberapa tempat, kondisi sarana kendaraan umum yang kurang layak, Kurangnya keamanan dan kenyamanan di trotoar maupun badan jalan (adanya penjual di tempat pejalan kaki, adanya pengamen dan pengemis di setiap pemberhentian kendaraan dan lain-lain).

Sedemikian kompleksnya permasalahan transportasi sehingga semakin lama jika permasalahan ini tidak diselesaikan maka semakin banyak jalan yang mengalami kemacetan lalu lintas yang mengakibatkan waktu perjalanan semakin lama. Alih fungsi tata guna lahan dan bertambah banyaknya jumlah penduduk yang memiliki aktivitas yang beragam mengakibatkan sulitnya dilakukan pengaturan lalu lintas. Selain itu dampak lain yang ditimbulkan dari permasalahan lalu lintas adalah polusi udara oleh kendaraan yang menyebabkan lingkungan yang kurang sehat. Agar permasalahan transportasi dapat dipecahkan maka perlu diambil langkah-langkah berani atas dasar kajian-kajian terhadap kota-kota di berbagai belahan dunia yang sukses memecahkan masalah transportasi di kotanya.

Rencana Kerja BPTJ Tahun 2019 dibuat sebagai acuan bagi unit kerja di lingkungan BPTJ dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2019 dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2019, dan secara substansi juga sejalan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) BPTJ Tahun 2016 – 2019, sehingga diharapkan dapat tercapai proses perencanaan pembangunan transportasi yang terpadu, terintegrasi dan akuntabel di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Akhir kata, Rencana Kerja BPTJ Tahun 2019 ini diharapkan dapat berkontribusi dan memberikan manfaat bagi seluruh insan perhubungan dalam menyelenggarakan kegiatan perhubungan yang handal dan berkualitas dalam melayani masyarakat.

**KEPALA
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK**



Ir. BAMBANG PRIHARTONO, MSCE

Pembina Utama (IV/e)

NIP. 19600825 198811 1 001

Keterangan	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
Dikonsep	Tri Adi Bagus Wibowoy	Kabag Perencanaan dan Evaluasi	11/4 '19	
Diperiksa	Hindro Surahmat	Sekretaris Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	12/4 '19	
Diperiksa	Heru Wisnu	Direktur Prasarana	15/04 '19	
Diperiksa	Karlo Manik	Direktur Lalu Lintas	15/04/19	
Diperiksa	Aca Mulyana	Direktur Angkutan	17/4 '19	

Rencana Kerja BPTJ Tahun 2019 dibuat sebagai acuan bagi unit kerja di lingkungan BPTJ dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2019 dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2019, dan secara substansi juga sejalan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) BPTJ Tahun 2016 – 2019, sehingga diharapkan dapat tercapai proses perencanaan pembangunan transportasi yang terpadu, terintegrasi dan akuntabel di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Akhir kata, Rencana Kerja BPTJ Tahun 2019 ini diharapkan dapat berkontribusi dan memberikan manfaat bagi seluruh insan perhubungan dalam menyelenggarakan kegiatan perhubungan yang handal dan berkualitas dalam melayani masyarakat.

**KEPALA
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK**



Ir. BAMBANG PRIHARTONO, MSCE

Pembina Utama (IV/e)

NIP. 19600825 198811 1 001



BAB I

PENDAHULUAN

Memasuki pelaksanaan tahun kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2015-2019, pembangunan infrastruktur di wilayah Jabodetabek menjadi bagian dari salah satu fokus pemerintah. RPJMN Tahun 2015-2019 menjadi dokumen perencanaan nasional yang dipergunakan sebagai pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah, yang selanjutnya dijabarkan secara tahunan pada Rencana Kerja Pemerintah maupun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Rencana Kerja BPTJ merupakan dokumen rencana kerja tahunan yang memuat Sasaran Program BPTJ (SP), Indikator Kinerja Program BPTJ (IKP), Sasaran Kegiatan Sekretariat (SK), indikator kinerja Kegiatan Sekretariat (IKK) dan target pembangunan yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran berjalan, dimana selanjutnya akan dijadikan sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan atau kinerja BPTJ.

Pembentukan Organisasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sedangkan untuk Rencana Induk Transportasi Jabodetabek ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Tahun 2018 – 2029.

Dalam rangka ikut menciptakan kinerja Kementerian Perhubungan yang unggul dan berstandar internasional, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek mempunyai tugas utama mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi dengan menerapkan tata kelola organisasi yang baik. Rencana strategis memuat visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Secara umum Rencana Kerja BPTJ Tahun 2019 memuat kegiatan pendukung kebijakan pembangunan transportasi di wilayah Jabodetabek yang akan dibiayai melalui APBN dimana secara substansi diawali dengan kondisi umum yang menguraikan pencapaian kinerja BPTJ pada tahun 2018 secara singkat, serta masalah dan tantangan yang harus dihadapi pada Tahun 2019.

Berdasarkan cakupan tersebut, sebagai unit kerja yang memiliki kegiatan utama mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi dengan menerapkan tata kelola organisasi yang baik, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, pasal 2 dan 3, fungsi BPTJ terdiri dari :

- 1) Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana umum dan rencana program kegiatan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi berdasarkan Rencana Induk Transportasi Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- 2) Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kebutuhan anggaran dalam rangka pelaksanaan rencana umum dan rencana program kegiatan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- 3) Fasilitasi teknis, pembiayaan, dan/atau manajemen dalam rangka peningkatan penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- 4) Fasilitasi teknis, pembiayaan, dan/atau manajemen dalam rangka pengembangan serta peningkatan sarana dan prasarana penunjang penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- 5) Fasilitasi teknis, pembiayaan, dan/atau manajemen dalam rangka pelaksanaan manajemen permintaan lalu lintas di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- 6) Penyusunan rencana pelaksanaan, perencanaan kebutuhan anggaran, dan pelaksanaan program kegiatan transportasi dalam Rencana Induk

Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang tidak termasuk dalam rencana umum dan rencana program kegiatan transportasi dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

- 7) Penyiapan bahan usulan regulasi dan kebijakan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- 8) Pemberian rekomendasi penataan ruang yang berorientasi angkutan umum massal;
- 9) Pemberian perizinan angkutan umum yang melampaui batas provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, dan pemberian rekomendasi untuk angkutan terusan (*feeder service*);
- 10) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan rencana umum serta program pengembangan dan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- 11) Melakukan koreksi dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang dilakukan oleh instansi, operator, dan pihak lainnya; dan
- 12) Pelaksanaan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.



BAB II

PELAKSANAAN ANGGARAN, CAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

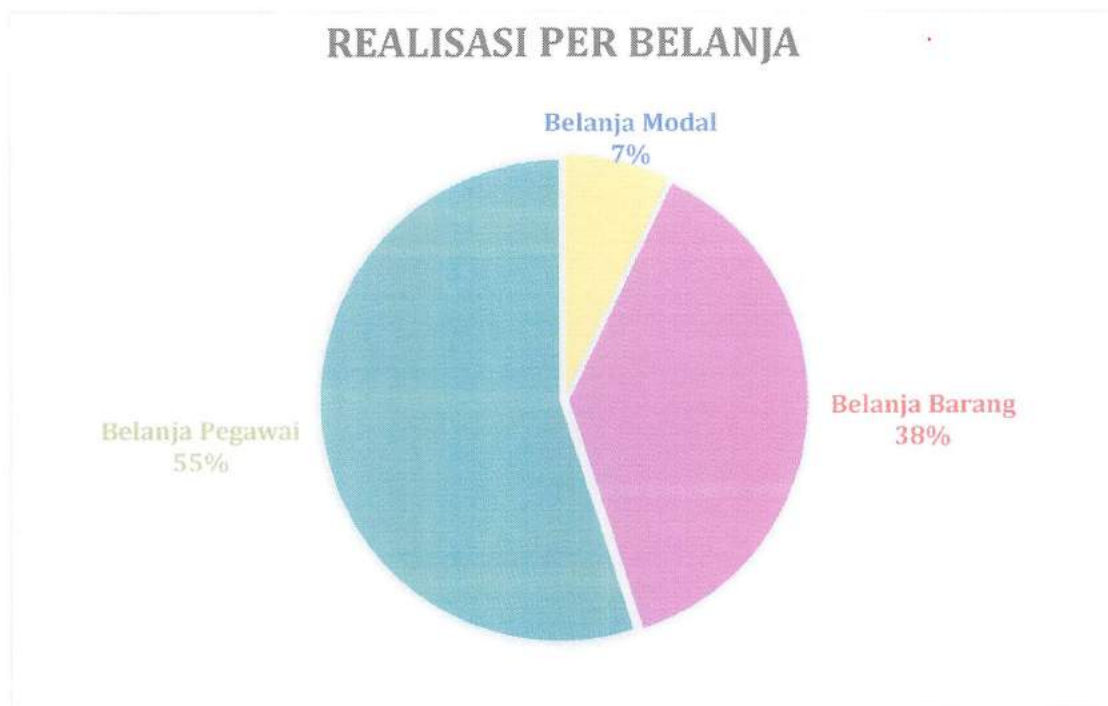
2.1 PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2018

Pada pelaksanaan anggaran tahun 2018 BPTJ mendapatkan pagu alokasi anggaran sebesar **Rp. 204.744.255.000** yang digunakan untuk beberapa kegiatan, diantaranya Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Perencanaan dan Pengembangan Transportasi Jabodetabek, Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Transportasi Jabodetabek, dan Peningkatan, Penyediaan serta Pengembangan Lalu Lintas dan Pelayanan Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek.

Realiasi alokasi anggaran total BPTJ pada tahun anggaran 2018 sebesar **Rp. 197.548.546.773** atau **96,49%** dari pagu alokasi sebesar **Rp. 204.744.255.000** dengan profil alokasi anggaran Tahun 2018 berdasarkan jenis belanja antara lain sebagai berikut:

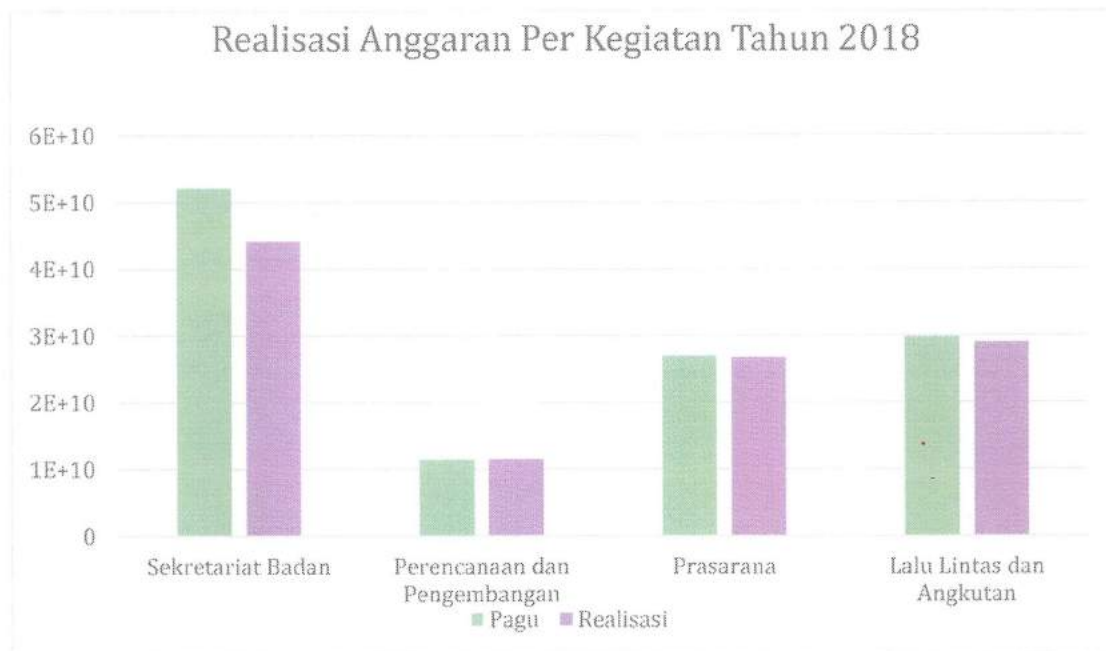
- Belanja Pegawai : Rp. 14.008.807.134,-
- Belanja Barang : Rp. 74.860.959.124,-
- Belanja Modal : Rp. 108.695.727.057,-

Untuk melihat persentase realisasi masing-masing jenis belanja, dapat dilihat pada diagram gambar 2.1 Realisasi Per Belanja. Belanja modal menyumbang sebesar 55% realiasi anggaran Tahun 2018, diikuti dengan realisasi belanja barang sebesar 38%, dan Belanja pegawai berkontribusi sebesar 7% dari total realisasi di BPTJ.



Gambar 2.1 Realisasi Per Jenis Belanja BPTJ TA 2018

Selain realisasi per jenis belanja, realisasi anggaran BPTJ juga dipisahkan berdasarkan kegiatan atau unit eselon 2. Berikut ini ditampilkan realisasi anggaran per kegiatan pada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebagai berikut:



Gambar 2.2 Realisasi Anggaran Per Kegiatan TA 2018

Persentase realisasi anggaran untuk masing-masing unit eselon 2 di BPTJ dibagi menjadi Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Bidang Pengelola Transportasi Jabodetabek dengan persentase 92.82%, Layanan Perencanaan dan Pengembangan Transportasi Jabodetabek sebesar

99.10%, Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Transportasi Jabodetabek sebesar 98.67%, dan Peningkatan, Penyediaan serta Pengembangan Lalu Lintas dan Pelayanan Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek sebesar 98.79%. Untuk lebih jelasnya, detail realisasi anggaran BPTJ Tahun 2018 ditampilkan dalam **Tabel 2.1** berikut ini :

Tabel 2.1 Detail Realisasi Anggaran BPTJ Tahun 2018

Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Bidang Pengelola Transportasi Jabodetabek	78,406,602,000	72,774,546,046	92.82%
Layanan Perencanaan dan Pengembangan Transportasi Jabodetabek	13,258,921,000	13,139,253,608	99.10%
Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Transportasi Jabodetabek	62,497,090,000	61,667,097,722	98.67%
Peningkatan, Penyediaan serta Pengembangan Lalu Lintas dan Pelayanan Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek	50,581,642,000	49,967,649,397	92.82%

2.2 PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TAHUN ANGGARAN 2018

Program/kegiatan yang sudah dilaksanakan pada kurun waktu 2015 – 2016 dan program/kegiatan yang sedang dilaksanakan pada tahun 2018 khususnya untuk capaian pembangunan fisik perhubungan wilayah Jabodetabek, dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pembangunan Terminal Tipe A di Jabodetabek yang terdiri dari :
 - Lanjutan pembangunan dan supervisi terminal Jatijajar Kota Depok;
 - Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas di dalam terminal Jatijajar Kota Depok;
 - Pengadaan paging microfon;
 - Pembuatan ruang kontrol operasi terminal Jatijajar;

- Pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum terminal Jatijajar;
 - Pengadaan AC terminal, pengadaan peralatan instalasi pengelolaan air limbah dan pengadaan furniture, papan informasi terminal Jatijajar.
- b. Lanjutan pembangunan dan integrasi ATCS di Jabodetabek yang terdiri dari :
- Lanjutan pembangunan ATCS terintegrasi di Koridor Bekasi;
 - Lanjutan pembangunan ATCS terintegrasi di Koridor Jalan Raya Bekasi;
 - Lanjutan pembangunan ATCS terintegrasi di Koridor Bogor;
 - Lanjutan pembangunan ATCS terintegrasi di Koridor Jalan Raya Bogor; dan
 - Pembangunan Ruang Pusat Kendali BPTJ Tahap II.
- c. Pengadaan Alat Survey Lalu Lintas dan Angkutan yang terdiri dari :
- Pengadaan kendaraan alat survey lalu lintas;
 - Pengadaan drone; dan
 - Pengadaan peralatan pendeteksi kemacetan lalu lintas.
- d. Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Perlengkapan Jalan yang terdiri dari :
- Pengadaan dan pemasangan faskes perlengkapan jalan Ruas Jalan Nasional Cigugur – Jasinga (Kode Ruas 021);
 - Pengadaan dan pemasangan Faskes Perlengkapan Jalan Ruas Jalan Nasional Bts. Jasinga – Leuwiliang (Kode Ruas 022);
 - Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Perlengkapan Jalan Ruas Jalan Nasional Batas Leuwiliang - Jalan Abd. Bin Nuh (Kode Ruas 023);
 - Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Perlengkapan Jalan Ruas Jalan Nasional Transyogi (Nomor Ruas 097);
 - Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Perlengkapan Jalan Ruas Jalan Nasional Ciawi - Benda (Kode Ruas 025);
 - Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Raya Tajur (Nomor Ruas 024), Jalan Raya Pajajaran (Nomor Ruas 073), Jalan Raya Kedunghalang (Nomor Ruas 073).
- e. Pengadaan Peralatan Penunjang Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri atas :
- Pengadaan peralatan penunjang pengawasan lalu lintas dan angkutan;

- Pemeliharaan aplikasi pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan di terminal Tipe A Jabodetabek
- f. Pengolahan Data Komunikasi yang terdiri atas permbaharuan aplikasi transportasi dalam rangka Evaluasi Analisis dampak lalu lintas;
- g. Pengolahan Data dan Komunikasi yang terdiri dari ;
 - Pengadaan peralatan penunjang perizinan angkutan umum;
 - Pembangunan aplikasi database angkutan umum Jabodetabek;
 - Pengembangan pengadaan sistem monitoring pelayanan perizinan online angkutan dalam trayek;
 - Pengembangan pengadaan sistem monitoring pelayanan perizinan online angkutan tidak dalam trayek.

2.3 CAPAIAN KEGIATAN BPTJ TAHUN 2018

Capaian kegiatan BPTJ Tahun 2018 antara lain:

2.3.1 Sekretariat BPTJ :

- Bagian Perencanaan dan Keuangan :

- 1) Penyusunan Rencana Kerja, Program dan Kegiatan ;
 - Penyusunan dokumen rencana kerja, yang terdiri dari; dokumen Rencana Kerja (Renja/RKT) Sekretariat tahun 2018 tingkat eselon II dan dokumen Rencana Kerja (Renja/RKT) BPTJ tahun 2018 tingkat eselon I;
 - Penyusunan program dan kegiatan, yang terdiri dari penyusunan longlist daftar pagu kebutuhan tahun TA. 2019, pagu anggaran TA 2019 dan pagu alokasi anggaran TA 2019 dan penginputan di aplikasi KRISNA;
- 2) Penyusunan RKA-KL, yang terdiri dari penginputan daftar usulan kegiatan pagu anggaran dan alokasi anggaran TA 2019 di aplikasi RKAKL dan di E-Planning.
- 3) Peningkatan kapasitas penyusun SAKIP yang terdiri koordinasi penyusunan Renja/RKT tahun 2018; koordinasi penyusunan LAKIP tahun 2017, koordinasi penyusunan PK tahun 2018, koordinasi penyusunan Renaksi PK tahun 2018, koordinasi penyusunan LAPTAH tahun 2017 ;
- 4) Penyiapan bahan rapat pimpinan yang terdiri dari; bahan rapat pimpinan (RAPIM), bahan rapat dengar pendapat (RDP) dll;
- 5) Penyusunan Laporan Tahunan (LAPTAH) tahun 2017 yang terdiri dari penyusunan dokumen LAPTAH Sekretariat BPTJ tahun 2017 tingkat eselon II dan LAPTAH BPTJ tahun 2017 tingkat eselon I ;

- 6) Penyusunan LAKIP BPTJ yang terdiri dari penyusunan dokumen LAKIP Sekretariat tahun 2017 tingkat eselon II dan LAKIP BPTJ tahun 2017 tingkat eselon I;
- 7) Penyusunan Perjanjian Kinerja BPTJ yang terdiri dari ; penyusunan dokumen PK Sekretariat tahun 2018 tingkat eselon II dan PK BPTJ tahun 2018 tingkat eselon II serta penyusunan dokumen Rencana Aksi atas PK (Renaksi PK) Sekretariat tahun 2018 tingkat eselon II dan Rencana Aksi atas PK (Renaksi PK) BPTJ tahun 2018 tingkat eselon II;
- 8) Koordinasi kelembagaan;
- 9) Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di Jabodetabek Tahun Anggaran 2018;
- 10) Monitoring dan evaluasi daya serap, pembinaan dan evaluasi hasil pemeriksaan;
- 11) Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak;
- 12) Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN);
- 13) Penginputan SIMAK Barang Milik Negara (BMN);
- 14) Penyusunan dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan melalui aplikasi SAIBA;
- 15) Pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan;
- 16) Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan;
- 17) Pembinaan dan evaluasi hasil pemeriksaan LHP/LHA dan tindak lanjut;

- **Bagian Hukum :**

- 1) Pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari ;
 - Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek;
 - Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Selama masa Pembangunan Proyek Infrastruktur Strategis Nasional di Ruas Jalan Tol Jakarta - Cikampek;
 - Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2018 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Jakarta – Tangerang, Tangerang – Merak, dan Jakarta – Bogor – Ciawi;
 - Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2018 Tentang Pengaturan Waktu Operasi Mobil Barang Pada Ruas Tol Di Wilayah Jakarta dan Bekasi Selama Pelaksanaan ASIAN GAMES Tahun 2018;

- Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 110 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek;
 - Penyusunan Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek;
- 2) Jaringan dokumentasi hukum dan kerjasama;
 - 3) Sosialisasi peraturan/produk hukum;
 - 4) Pemberian bantuan hukum;
 - 5) Kerjasama di bidang transportasi terdiri dari :
 - Kesepakatan Bersama Antara Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kemenhub dengan PT. Kereta Commuter Indonesia (PT. KCI) tentang Penyediaan Data dan Informasi Perjalanan Kereta Rel Listrik (KRL) Untuk Aplikasi Angkutan Umum di Jabodetabek;
 - Kesepakatan Bersama Antara Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kemenhub dengan Perusahaan Umum Damri tentang Penyediaan Data dan Informasi Perjalanan Bus Damri Untuk Aplikasi Angkutan Umum di Jabodetabek;
 - Kesepakatan Bersama Antara Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kemenhub dengan PT. Transportasi Jakarta tentang Penyediaan Data dan Informasi Perjalanan Bus Transjakarta Untuk Aplikasi Angkutan Umum di Jabodetabek;
- **Bagian Kepegawaian dan Umum :**
 - 1) Penyelenggaraan pengadaan CPNS Formasi 2018;
Penyelenggaraan pengadaan CPNS telah dilaksanakan dengan baik, beberapa pegawai BPTJ telah sedikit banyak berpartisipasi dalam kepanitiaan tes CPNS tahun 2018 untuk pengadaan CPNS formasi 2019 di Kementerian Perhubungan
 - 2) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
Administrasi kepegawaian telah dilaksanakan. Bagian Kepegawaian telah mengelola penomoran surat, dan pengarsipan dengan baik.
 - 3) Penataan Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
Telah dibuat struktur organisasi yang baru sesuai dengan kebutuhan organisasi BPTJ
 - 4) Peningkatan Jiwa Korsa;
Telah dilaksanakan kegiatan jiwa korsa di daerah Cikeas. Kegiatan dikemas dengan mengedepankan kerjasama tim, kekompakan dan pencapaian rencana realisasi sesuai target

untuk di tahun 2019. Seperti kegiatan menembak dan game yang lainnya.

- 5) Penyusunan analisis jabatan;
Penyusunan analisis jabatan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan jabatan yang ada di dalam nomenklatur baru Organisasi BPTJ
- 6) Penyertaan pendidikan dan pelatihan teknis;
Beberapa pegawai BPTJ telah ikut serta dalam beberapa Pendidikan dan Pelatihan teknis seperti : manajemen stress, pengadaan barang dan jasa, pelatihan infografis, dan pelatihan lainnya.
- 7) Sosialisasi bidang kepegawaian;
Kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan di BPTJ dengan peserta sosialisasi yaitu pegawai di lingkungan BPTJ.
- 8) Analisis beban kerja;
Analisis beban kerja di BPTJ telah dilaksanakan dengan baik. Saat ini beban kerja masing masing unit kerja telah dipetakan hingga bagian kepegawaian mampu merepresentasikan jumlah pegawai yang ideal agar pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi BPTJ dapat dilaksanakan secara optimal.
- 9) Masterplan pengembangan SDM BPTJ Tahu 2018-2022;
Telah dibuat lanjutan masterplan SDM BPTJ hingga tahun 2022.
- 10) Pengelolaan administrasi penggajian;
Administrasi penggajian telah dibuat secara rapih dan lebih mudah untuk diakses.
- 11) Penyuluhan gerakan anti narkoba;
Penyuluhan gerakan anti narkoba telah dilaksanakan dengan baik. Seluruh pegawai BPTJ telah teredukasi mengenai dampak dan akibat dari penggunaan narkoba.
- 12) Koordinasi kelembagaan pengelolaan Terminal Tipe A di Jabodetabek;
- 13) Penyelenggaraan angkutan lebaran, Natal dan tahun Baru Pengelolaan Terminal Tipe A di Jabodetabek;
- 14) Pengadaan peralatan dan mesin di kantor dan di Terminal Tipe A di Jabodetabek (Terminal Pondok Cabe, Poris Plawad, Baranangsiang, dan Jatijajar);
- 15) Pengaturan Ganjil Genap di Wilayah Jabodetabek;
- 16) Pengelolaan terminal Tipe A di Jabodetabek, terdiri atas; kegiatan operasional perkantoran pengelolaan terminal Tipe A di Jabodetabek, langganan daya dan jasa pengelolaan terminal tipe A di Jabodetabek, pemeliharaan kantor pengelolaan terminal tipe A di Jabodetabek, perawatan dan pemeliharaan gedung dan bangunan pengelolaan terminal tipe A di Jabodetabek.

Beberapa terminal tipe A di Jabodetabek telah dikelola oleh BPTJ seperti Terminal Pondok Cabe, Poris Plawad, Baranangsiang, dan Jatijajar.

- **Bagian Humas dan TIK :**

- 1) Kegiatan kehumasan melalui pemberitaan dan melalui publikasi
Beberapa Kegiatan telah dilakukan dalam rangka publikasi baik yang sifatnya pemberitaan ataupun non pemberitaan, adalah sebagai berikut :
 - FGD Penataan Kawasan Tanah Abang, FGD Pengaturan Sepeda Motor, serta FGD Opini Publik tentang Penerapan PM 108. FGD dilakukan untuk mengetahui masukan ataupun solusi dari para pakar yang berkopeten dibidangnya dan mencapai hasil dengan kesepakatan bersama;
 - Sosialisasi Launching Kebijakan Penanganan Kemacetan Jakarta Cikampek di CFD Kota Bekasi, acara tersebut sukses dengan banyaknya support positif dari Masyarakat sekitar yang terkena dampak Kebijakan Ganjil Genap di GT.Bekasi Barat dan GT. Bekasi Timur;
 - Launching Transjabodetabek Premium di Mall Mega Bekasi dan Grand Dhika Bekasi Timur sebagai salah satu program dari BPTJ dalam rangka mendukung Paket Kebijakan Penangan Kemacetan Jakarta Cikampek untuk mengantisipasi jumlah calon penumpang yang akan berangkat ke beberapa titik di Jakarta;
 - Pameran KAI Expo dilaksanakan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tugas dan peran BPTJ dalam mengintegrasikan kebijakan transportasi yang ada di Jabodetabek. Selain itu dalam pameran tersebut BPTJ juga mensosialisasikan beberapa program-program yang sedang dan akan dilakukan oleh BPTJ. Seperti RITJ, Kebijakan Penanganan Kemacetan di Jakarta Cikampek, serta TOD;
 - di tahun 2018 BPTJ mensosialisasikan Perpres No. 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek ke beberapa Stakeholder terkait. Seperti para pemerintah daerah di wilayah Jabodetabek, dan instansi terkait;
 - untuk pertama kalinya BPTJ melaksanakan kegiatan Jumpa Pers Akhir Tahun sebagai bentuk sosialisasi hasil capaian kinerja BPTJ selama tahun 2018 kepada masyarakat luas melalui media yang diundang untuk hadir pada acara tersebut;
 - Pada bulan November BPTJ berkesempatan untuk melakukan media visit pada kantor media cetak Bisnis

Indonesia. Pada kesempatan tersebut Kepala BPTJ hadir didampingi oleh para pejabat eselon II di lingkungan BPTJ. Pada acara tersebut BPTJ berbincang dengan Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia membicarakan berbagai hal yang terkait dengan kebijakan transportasi di Jabodetabek;

- BPTJ melakukan Publikasi tentang penerapan kebijakan penanganan kemacetan di wilayah Jabodetabek melalui Talkshow On Air di Radio. Seperti Trijaya FM, Iradio, Elshinta.
- Telah dilaksanakan pengelolaan media social pada periode Januari-Desember 2018. dalam pengelolaan Media Sosial BPTJ akan di upload semua kebijakan yang sudah dan akan dikeluarkan oleh BPTJ ataupun Kementerian Perhubungan. Setiap minggunya dilakukan analisis dan evaluasi tentang pemberitaan di kanal Media Sosial apakah itu bersifat positif, netral maupun negative.

2) Hubungan antar lembaga;

3) Pelayanan informasi publik oleh PPID BPTJ;

Penyusunan Buku dan Video BPTJ

- Telah dicetak buku "Ganjil Genap : Katanya dan Ternyata" sebanyak 1000 eksamplar yang telah diberikan kepada para stakeholder;
- Telah dibuat video mengenai isu strategis BPTJ seperti Video 3 Kebijakan Asian Games Jakarta, Hasil Penerapan Kebijakan Penanganan Kemacetan Jakarta Cikampek, Paket Kebijakan Penanganan Kemacetan Jakarta Cikampek, dan Selamat Datang Atlet Asian Games 2018

4) Pengembangan portal BPTJ;

Telah dikelola updating berita dan foto untuk dipublikasikan melalui website BPTJ pada periode Januari-Desember 2018. Berita pada website BPTJ selama tahun 2018 berisikan semua berita mengenai isu strategis BPTJ serta kegiatan yang telah diselenggarakan oleh BPTJ. Website BPTJ dapat diakses melalui: bptj.dephub.go.id. website merupakan salah satu media untuk menyebarkan informasi kepada publik.

5) Pengelolaan e-Newsletter;

Telah dilaksanakan analisis dan evaluasi berita serta opini publik pada periode Januari-Desember 2018. Analisis dan evaluasi berita dilakukan baik pada media cetak maupun elektronik yang kemudian dibuat klipping atas pemberitaan BPTJ. Setiap bulannya dilakukan evaluasi terhadap pemberitaan BPTJ apakah bersifat positif, netral, atau negative. Berdasarkan analisis dan evaluasi terkait pemberitaan dan opini

publik dapat ditentukan langkah-langkah komunikasi yang harus dilakukan;

- 6) Pengelolaan database transportasi Jabodetabek;
- 7) Pemeliharaan Jaringan.

2.3.2 Direktorat Perencanaan dan Pengembangan

- Sub Direktorat Kebijakan dan Pembiayaan :

- 1) Perumusan Perencanaan Teknis Pengelolaan Pelabuhan Penyebrangan / short Sea Shipping Wilayah Jabodetabek;
Berdasarkan kajian kegiatan ini, maka diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu :
 - Kemacetan lalu lintas di wilayah Jabodetabek mengakibatkan kerugian sebesar 2,6 Juta dolar per tahun atau sebanding dengan 67,5 Triliun Rupiah per tahun;
 - Short Sea Shipping adalah salah satu penanganan yang paling sesuai untuk mendukung kebijakan pembatasan kendaraan barang di wilayah Jabodetabek;
 - Dalam kajian ini dilakukan survey di beberapa Dermaga di wilayah Jabodetabek seperti di Dermaga di Kabupaten Tangerang (Cituis, Krenjo dan Tanjung pasir), Dermaga Kabupaten Bekasi (Muara Gebong, Muara Cikarang Bekasi Laut dan Sungai Cikarang Bekasi Laut), dan Dermaga di Provinsi DKI Jakarta dan lokasi ideal untuk pengembangan pelabuhan penyebrangan di wilayah Jabodetabek adalah di Sungai CBL Kabupaten Bekasi;
 - Jarak, waktu dan biaya merupakan faktor utama dalam pengalihan transportasi berbasis *Road-based* ke transportasi berbasis *Sea-based*.
- 2) Studi/Kajian/DED/STD/Amdal/Norma/Standar/Pedoman/Kriteria/Prosedur Bidang Perencanaan dan Pengembangan BPTJ;

- Sub Direktorat Perencanaan Program :

- 1) Koordinasi Perencanaan Transportasi Jabodetabek;
Capaian yang diperoleh dari kegiatan ini adalah :
 - Rencana Aksi RITJ tahun 2018-2024 yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah wilayah DKI Jakarta, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi;
 - Prioritas kegiatan dan waktu pelaksanaan rencana aksi RITJ tahun 2018-2024 yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah wilayah DKI Jakarta, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi;
 - Rumusan skema pembiayaan dan penyelenggaraan rencana aksi RITJ tahun 2018-2024 di wilayah DKI Jakarta, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.
- 2) Studi/Kajian/DED/STD/Amdal/Norma/Standar/Pedoman/Kriteria/Prosedur Bidang Perencanaan dan Pengembangan BPTJ;
- 3) Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pembangunan Transportasi Jabodetabek.

- Sub Direktorat Evaluasi Program :

- 1) Evaluasi Kinerja Lalu Lintas dan Pelayanan Angkutan Umum di Jabodetabek;
Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil; evaluasi kinerja pelayanan angkutan umum koridor JA dan JR Connexion, kajian kebutuhan pelayanan angkutan umum di Bandara Soekarno-Hatta dan kajian pengukuran capaian Indikator Kinerja Program (IKU) , yaitu :
 - Terdapat beberapa armada angkutan umum yang beroperasi belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) sebagaimana tertuang dalam regulasi terkait;
 - Kecepatan rata-rata angkutan umum JA Co dan JR Co sebesar 17,32 Km/jam, memenuhi target sesuai dengan Indikator Kinerja Program (IKP) BPTJ tahun 2018 (target tahun 2018 sebesar 16 Km/jam), hal ini dikarenakan adanya pemberlakuan kebijakan ganjil genap;
 - Capaian *Modal Share* tahun 2018 sebesar 29,90% memenuhi target sesuai dengan Indikator Kinerja Program (IKP) BPTJ (target tahun 2018 sebesar 29%), hal ini dikarenakan kebijakan-kebijakan pemerintah seperti ganjil genap di beberapa ruas jalan di wilayah DKI Jakarta;
 - Hasil analisa pelayanan angkutan umum dengan metode GAP pada JA Co dan JR Co yaitu; waktu tempuh, waktu tunggu, jam operasional, fasilitas informasi, jadwal keberangkatan kedatangan, fasilitas keamanan, dan fasilitas keselamatan merupakan informasi yang sangat dibutuhkan oleh penumpang;
- 2) Penyusunan Formulasi Tarif dan PSO Angkutan Umum di Jabodetabek;

2.3.3 Direktorat Prasarana

- Sub Direktorat Prasarana Jalan :

- 1) Monitoring dan Evaluasi SPM pada Pengelolaan Terminal Penumpang di Jabdetabek;
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi SPM pada Pengelolaan Terminal Penumpang di Jabodetabek dilaksanakan dalam bentuk evaluasi di beberapa terminal yang ada di Jabodetabek sesuai dengan PM 132 tahun 2015.
- 2) Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Jalan Nasional di Jabodetabek;
- 3) Pembangunan Terminal Tipe A di Jabodetabek;
Kegiatan Pembangunan Terminal Tipe A Jatijajar terdiri dari ;
 - Lanjutan Pembangunan Terminal Jatijajar Kota Depok;
 - Supervisi Lanjutan Pembangunan Terminal Jatijajar Kota Depok;

- Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas di dalam Terminal Jatijajar;
 - Pengadaan Paging Microfon Terminal Jatijajar;
 - Pembuatan Ruang Kontrol Operasi Terminal Jatijajar;
 - Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Terminal Jatijajar;
 - Pengadaan AC Terminal Jatijajar;
 - Pengadaan Peralatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah;
 - Pengadaan Furniture Kursi Kepala, Kursi Staff dan Kursi Rapat di Terminal Jatijajar;
 - Pengadaan Papan Informasi di Area Terminal Jatijajar.
- 4) Studi/Kajian/DED/STD/Amdal/Norma/Standar/Pedoman/Kriteria/Prosedur Bidang Prasarana BPTJ

- Sub Direktorat Prasarana Perkeretaapian :

- 1) Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Stasiun Kereta Api Komuter di Jabodetabek;
- 2) In House Training Konsultant;
- 3) Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Stasiun Terintegrasi di Wilayah Jabodetabek.

- Sub Direktorat Integrasi Prasarana :

- 1) Studi/Kajian/DED/STD/Amdal/Norma/Standar/Pedoman/Kriteria/Prosedur Bidang Prasarana BPTJ;
- 2) Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Integrasi Moda dan TOD;
Tujuan kegiatan ini diselenggarakan adalah memberikan arahan secara teknis terhadap implementasi fasilitas integrasi angkutan massal dan pengembangan kawasan berorientasi *transit/ transit Oriented Development* (TOD) secara berkesinambungan sehingga terselenggaranya fungsi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dalam penyelenggaraan fasilitas integrasi terutama dalam hal fasilitas Integrasi Sistem Angkutan Umum Massal dan implementasi TOD di Jabodetabek
- 3) Penataan Lalu Lintas di Simpul-simpul sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) di Jabodetabek;

Tujuan Kegiatan ini diselenggarakan adalah untuk meningkatkan pelayanan dan penyediaan jasa angkutan umum yang cepat, aman, terpadu, tertib, lancar, nyaman, ekonomis, efisien, efektif, dan terjangkau oleh masyarakat di titik simpul yang ada di Jabodetabek, dimana titik yang menjadi prioritas penataan lalu lintas kemacetan yaitu Stasiun Depok Baru, Stasiun Pasar Minggu, Stasiun Duren Kalibata, Stasiun Cawang, Stasiun Tebet, Stasiun Manggarai, Stasiun Jatinegara, Stasiun Dukuh Atas, Stasiun Karet, Stasiun Tanah Abang, Stasiun Palmerah, Stasiun Jakarta Kota, Stasiun Grogol, Stasiun Cikini, Stasiun Juanda, Stasiun Kebayoran, Stasiun Klender serta Terminal; Poris Plawad, Kalideres, Kampung Rambutan, Pulogebang, dan Pondok Cabe.

- 4) Lanjutan Pembangunan dan Integrasi ATCS di Jabodetabek;
Kegiatan lanjutan pembangunan dan integrasi ATCS di Jabodetabek terdiri dari ;
 - Lanjutan pembangunan ATC Terintegrasi Koridor Bekasi;
 - Lanjutan pembangunan ATC Terintegrasi Koridor Jalan Raya Bekasi;
 - Lanjutan pembangunan ATC Terintegrasi Koridor Bogor;
 - Lanjutan pembangunan ATC Terintegrasi Koridor Jalan Raya Bogor;
 - Pembangunan Ruang Pusat Kendali BPTJ Tahap II
- 5) Pengoperasian ATCS di Wilayah Jabodetabek;
- 6) Pemeliharaan ATCS Jabodetabek.

2.3.4 Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan

- Sub Direktorat Angkutan :

- 1) Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan;
Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan angkutan dilaksanakan dengan Sosialisasi Perizinan Online Angkutan Taksi di Wilayah Jabodetabek, dengan tujuan untuk mensosialisasikan serta memberikan pelatihan kepada masyarakat khususnya para operator terkait sistem perizinan online taksi Jabodetabek yang dibuat BPTJ guna peningkatan kinerja pelayanan angkutan umum di Wilayah Jabodetabek;
- 2) Pendataan dan Penataan dalam Rangka Pengembangan Rute Angkutan Umum Jabodetabek;
- 3) Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang di Wilayah Jabodetabek;

Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang di Wilayah Jabodetabek telah dilaksanakan melalui beberapa kegiatan pelaksanaan *Flag Off* Uji Coba Angkutan Umum baik untuk Angkutan Perkotaan maupun Angkutan Pemukiman, yang bertujuan untuk mensosialisasikan pelayanan angkutan penumpang kepada masyarakat. Kegiatan *Flag Off* Uji Coba dilaksanakan sebagai bentuk seremonial pelaksanaan Uji Coba Angkutan Umum yang dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Transportasi dan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung dari waktu pelaksanaan *Flag Off*.

- 4) Penghargaan Pramudi, Masinis dan Operator Angkutan Umum Teladan di Wilayah Jabodetabek;
- 5) Pengadaan Blanko Dokumen Perizinan;
- 6) Pengolahan Data dan Komunikasi;
- 7) Studi/Kajian/DED/STD/Amdal/Norma/Standar/Pedoman/Kriteria/Prosedur Bidang Lalu Lintas dan Angkutan BPTJ;

- Sub Direktorat Manajemen Lalu Lintas :

- 1) Evaluasi Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas;
- 2) Pengawasan dan Monitoring Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
- 3) Peningkatan Kinerja Lalu Lintas Ruas dan Simpang di Jabodetabek;
- 4) Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Keselamatan Jalan Lalu Lintas di Jabodetabek;
- 5) Pengadaan Alat Survey Lalu Lintas dan Angkutan;
- 6) Pengolahan Data dan Komunikasi;
- 7) Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Perlengkapan Jalan.

Kegiatan pemasangan dan pengadaan perlengkapan jalan pada 7 ruas ini berguna untuk meningkatkan keselamatan pada ruas jalan yang dibangun di wilayah Jabodetabek, kegiatan ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Agustus.

- Sub Direktorat Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan :

- 1) Koordinasi Teknis Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Se-Jabodetabek;
Koordinasi teknis pengawasan lalu lintas dan angkutan se-Jabodetabek dimaksudkan untuk mencapai sinergitas kegiatan operasional transportasi Jabodetabek yang menjadi wilayah tugas Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dengan Kementerian/Lembaga serta dukungan penuh dari Pemerintah daerah.
- 2) Pengawasan lalu Lintas dan Angkutan di 9 (Sembilan) Wilayah Jabodetabek;
- 3) Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru;
Kegiatan ini terdiri dari ;

- Melakukan pemantauan penyelenggaraan angkutan Lebaran tahun 2018, Natal 2018 dan Tahun Baru 2019, danantisipasi libur panjang serta berkoordinasi dengan instansi terkait, khususnya dengan Pemerintah Daerah terutama pada wilayah Jabodetabek.
 - Melakukan koordinasi dalam upaya pemeriksaan kelaikan sarana dan prasarana transportasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan angkutan umum.
- 4) Pemeriksaan Kelaikan Sarana Angkutan Umum Wilayah Jabodetabek;
 - 5) Pengadaan Peralatan Penunjang Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan;
 - 6) Sosialisasi, Publikasi BPTJ dan Kampanye Keselamatan dan Ketertiban Transportasi Jalan di Wilayah Jabodetabek.

2.4 PERMASALAHAN

Transportasi merupakan salah satu roda pendorong pertumbuhan ekonomi dan tulang punggung dari proses distribusi orang maupun barang serta berperan sebagai pembuka keterisolasian wilayah. Ketersediaan infrastruktur transportasi merupakan salah satu aspek dalam meningkatkan daya saing produk nasional sehingga harus didukung dengan sumber daya manusia yang profesional, tanggap terhadap perkembangan teknologi dan kondisi sosial masyarakat. Di masa mendatang Kementerian Perhubungan khususnya BPTJ berupaya untuk dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat atas kualitas transportasi baik dari aspek keselamatan, keamanan, pelayanan dan ketersediaan kapasitas.

Meskipun telah dicapai kemajuan di berbagai bidang pada pelayanan jasa sarana dan prasarana transportasi, permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan keamanan dan keselamatan, kehandalan pelayanan jasa transportasi dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dalam kondisi pendanaan pemerintah yang terbatas dan di tengah situasi perekonomian nasional yang terimbas krisis keuangan global. Adapun beberapa permasalahan transportasi yang dihadapi saat ini yang terbagi atas aspek keselamatan dan kemananan transportasi, aspek pelayanan, serta aspek peningkatan kapasitas.

A. Aspek Keselamatan dan Keamanan Transportasi di Wilayah Jabodetabek

Beberapa permasalahan dari aspek keselamatan dan keamanan transportasi antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya fungsi kelembagaan dalam peningkatan keselamatan transportasi secara terintegrasi

Saat ini fungsi lembaga keselamatan moda transportasi ditangani oleh masing-masing unit kerja moda transportasi, padahal

keselamatan transportasi saling berkaitan antar moda transportasi, dan juga terkait dengan unit K/L lain karena keselamatan transportasi bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan. Termasuk pada tahap pencegahan kecelakaan maupun setelah terjadinya kecelakaan, misalnya pendataan kecelakaan yang terjadi.

2. Minimnya kesadaran dan peran serta masyarakat akan keselamatan dan keamanan transportasi di Jabodetabek

Keselamatan dan keamanan transportasi merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan transportasi yang khususnya angkutan jalan. Jumlah kejadian dan fatalitas kecelakaan lalu lintas jalan merupakan yang paling tinggi bila dibandingkan moda lainnya. Masih tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan ini akibat kurangnya disiplin pengguna jalan dan rendahnya tingkat kelaikan amada. Di sisi lain, masih banyaknya pengguna transportasi umum yang belum mengikuti standar keselamatan dan keamanan transportasi. Sedangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan perkeretaapian terlihat dari pemanfaatan jalur kereta api untuk berjualan dan mendirikan bangunan pada daerah larangan. Pada Komuter Line (KRL) Jabodetabek, saat naik dan turunnya penumpang, masih banyak pengguna yang memaksakan untuk masuk walaupun kapasitas nya sudah sangat padat, perilaku ini akan meningkatkan tingkat kecelakaan KRL.

3. Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum dalam pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi di Jabodetabek

Pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi dianggap belum optimal banyak disebabkan karena keterbatasan personil dan lebih pada aspek keterbatasan kapasitas sumberdaya manusia. Apabila dilihat dari aspek penegakan hukum dalam pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi, saat ini masih tingginya tingkat toleransi aparaturnya dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Sebagai contoh pengguna alat elektronik di dalam pesawat tentunya perlu ditindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, demikian juga pelaku pelanggaran terhadap lalu lintas di jalan, maupun pengguna jasa layanan transportasi laut, dan perkeretaapian.

4. Belum optimalnya pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi di Jabodetabek

Saat ini tingkat kecukupan dan kehandalan sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan transportasi sesuai dengan perkembangan teknologi tergolong masih kurang, dimana masih

terdapat daerah rawan kecelakaan yang belum dipasang pagar pengaman jalan, masih belum ada pembatasan kapasitas pada tiap kereta di KRL, serta masih terdapatnya kinerja yang kurang pada transportasi jalan seperti bus dan angkot. Hal ini menjadi permasalahan yang harus ditangani untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi yang ditujukan dalam rangka meningkatkan rasa aman dan kenyamanan pengguna transportasi serta menurunkan jumlah dan tingkat kecelakaan transportasi yang meliputi transportasi jalan, kereta api, pelayaran, dan penerbangan dalam menuju target *zero accident*.

5. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM Transportasi yang sesuai kompetensi standar keselamatan dan keamanan transportasi di Jabodetabek

Saat ini kualitas SDM pelaku transportasi masih rendah dan kualitas SDM yang ada belum sesuai dengan perkembangan teknologi transportasi. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan peningkatan peran pemerintah dalam rangka pengembangan SDM Transportasi, pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana diklat serta pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar serta pengembangan metode pembelajaran.

6. Tingginya tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas jalan Jabodetabek

Fatalitas korban kecelakaan khususnya pada lalu lintas jalan disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan kendaraan setiap tahun. Hal ini memberikan pengaruh terhadap semakin meningkatnya kepadatan lalu lintas khususnya pada kawasan perkotaan. Dominasi pengguna sepeda motor di jalan menjadi salah satu bagian penyumbang permasalahan lalu lintas di ruas jalan khususnya kemacetan dan kesemerawutan lalu lintas jalan yang berdampak pada meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas karena banyak diantaranya terjadi karena ketidaktertiban terhadap aturan maupun rambu, serta marka lalu lintas. Dominasi kecelakaan lalu lintas pada sepeda motor adalah paling tinggi jika dibandingkan dengan moda transportasi lainnya di Jabodetabek;

B. Aspek Pelayanan

Beberapa permasalahan dari aspek pelayanan antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya skema multi operator dalam penyelenggaraan transportasi di Jabodetabek

Permasalahan mendasar yang dihadapi sektor transportasi selama ini terutama adalah masih kurang memadainya sarana dan prasarana

transportasi jika dibandingkan dengan permintaan akan pelayanan jasa transportasi. Penyediaan, kepemilikan, pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana transportasi selama ini masih didominasi oleh Pemerintah dan BUMN. Peran swasta dalam skema penyelenggaraan transportasi sampai saat ini masih perlu peningkatan, karena masih minimnya minat swasta sebagai operator dalam penyelenggaraan transportasi. Hal ini menyebabkan kurangnya kompetisi dalam penyediaan pelayanan transportasi oleh operator.

2. Kurang optimalnya pelaksanaan perlindungan lingkungan yang diakibatkan penyelenggaraan transportasi di Jabodetabek

Kaitannya perlindungan lingkungan terhadap penyelenggaraan transportasi adalah peningkatan emisi gas buang kendaraan akibat pertumbuhan kendaraan bermotor, serta peningkatan volume limbah B3 dari sisa oli kendaraan. Perlindungan lingkungan terkait dengan penyelenggaraan transportasi saat ini dapat dikatakan belum optimal, mengingat peningkatan emisi gas buang kendaraan tidak diiringi dengan usaha mereduksi pengaruh emisi gas buang, misalnya melalui pengembangan Ruang Terbuka Hijau, mekanisme *punishment* untuk kendaraan yang tidak lolos uji emisi maupun penyediaan lokasi pengolahan limbah B3 yang dapat mengakomodir limbah pembuangan oli bekas tersebut.

3. Tingginya penggunaan bahan bakar minyak berbasis fosil dalam penyelenggaraan transportasi di Jabodetabek

Masalah lain yang dihadapi sektor transportasi adalah besarnya jumlah penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai sumber energi transportasi. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2004 hampir separuh (48 persen) konsumsi BBM nasional digunakan oleh sektor transportasi. Penggunaan BBM untuk pengoperasian kendaraan/angkutan saat ini menjadi beban berat bagi pemerintah. Dengan semakin menipisnya cadangan minyak bumi dan meningkatnya harga BBM di pasar dunia, penggunaan energi alternatif/bahan bakar non BBM yang ramah lingkungan untuk pengoperasian kendaraan/angkutan saat ini merupakan suatu keharusan. Selain mempunyai keuntungan ekonomis penggunaan energi alternatif non BBM juga dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Tingginya penggunaan bahan bakar minyak berbasis fosil memunculkan permasalahan lebih lanjut kaitannya dengan pencemaran lingkungan dari emisi gas buang kendaraan yang berkorelasi dengan masalah lingkungan. Pembakaran bahan bakar fosil juga menghasilkan pencemar lain, seperti nitrogen oksida, sulfur dioksida, senyawa organik berbau, dan logam berat.

4. Belum optimalnya pelayanan transportasi multimoda dan antarmoda yang terintegrasi di Jabodetabek

Tidak bisa dipungkiri bahwa ongkos transportasi publik di Indonesia masih mahal, yang disebabkan oleh belum terwujudnya integrasi antar moda transportasi secara menyeluruh yang dapat mengefisienkan waktu, biaya, dan tenaga. Saat ini sudah terdapat beberapa moda transportasi yang terkoneksi dengan moda lainnya, seperti Bus Damri yang menghubungkan antara Bandar Udara Soekarno Hatta dengan Stasiun Gambir, serta beberapa lokasi terminal bus di wilayah Jakarta, demikian juga dengan *Bus Rapid Transit (BRT)* yang dikembangkan di beberapa kota di Indonesia, sudah terkoneksi dengan Bandar Udara, Stasiun, maupun Terminal Bus Reguler. Konektivitas antar dan intermodal tersebut masih terkendala dengan belum terbentuknya sistem *feeder* dari bus-bus reguler yang beroperasi pada ruas-ruas jalan, sehingga beberapa diantaranya masih tercampur.

5. Belum optimalnya pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi di Jabodetabek

Saat ini kondisi sarana dan prasarana transportasi masih banyak yang belum memenuhi standar pelayanan, yang tercermin dari kondisi kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi yang ada. Ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan dan kondisi angkutan umum sebagai bagian dari pelayanan dasar (*public service*) tentu sangat maksimal, yaitu : aman (*safety and secure*), nyaman (bersih, tidak pengap, dan tidak berdesakan), tarif terjangkau (tarif yang pantas), tepat waktu (*on schedule*), bahkan *door to door* (sedikit mungkin pergantian moda angkutan), dan memiliki fasilitas penunjang yang memadai (misalnya jumlah toilet di simpul transportasi yang cukup). Namun, secara faktual kondisi pelayanan sarana dan prasarana transportasi masih belum memenuhi harapan masyarakat tersebut.

6. Rendahnya tingkat pelayanan angkutan umum perkotaan dan tingginya penggunaan kendaraan pribadi di Jabodetabek

Tingginya penggunaan kendaraan pribadi sebagai bagian dari dampak peningkatan pertumbuhan penduduk, serta belum optimalnya penyediaan sarana transportasi dalam melayani kebutuhan penduduk. Kebutuhan masyarakat akan moda transportasi yang cukup, aman, nyaman, dan handal masih belum terpenuhi sehingga masih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi. Selain lebih aman dan nyaman, menggunakan kendaraan pribadi dianggap dapat menempuh perjalanan lebih cepat dibandingkan menggunakan angkutan umum. Pertumbuhan kendaraan pribadi juga menimbulkan kerentanan kaitannya dengan keamanan dan keselamatan transportasi, salah satunya sepeda motor yang menjadi bagian moda

transportasi pribadi dengan pelayanan nyaman, fleksibel, cepat, namun dari aspek keselamatan cukup rendah.

7. Terbatasnya kualitas, kuantitas, standar kompetensi SDM Transportasi dan tenaga pendidik transportasi

Meningkatnya pembangunan infrastruktur transportasi menimbulkan konsekuensi akan pemenuhan sumber daya manusia transportasi yang berdaya saing. Pemenuhan akan sumber daya manusia transportasi (regulator dan operator) yang berdaya saing menemui beberapa hambatan antara lain adalah kurangnya standar kompetensi SDM transportasi, terbatasnya ketersediaan kesempatan sekolah dan diklat transportasi, keterbatasan sarana dan prasarana serta kurangnya tenaga pendidik transportasi. Selain itu, perkembangan teknologi yang cepat dalam penyelenggaraan transportasi menyebabkan sumber daya manusia transportasi perlu ditingkatkan agar tetap memiliki daya saing.

C. Aspek Kapasitas Transportasi

Beberapa permasalahan dari aspek kapasitas transportasi antara lain sebagai berikut :

1. Kurangnya tingkat kesesuaian, kecukupan dan keandalan sarana dan prasarana transportasi di Jabodetabek

Kurangnya tingkat kesesuaian, kecukupan dan keandalan sarana dan prasarana transportasi dalam hal ini sangat terkait dengan upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi. Keterbatasan dalam penyediaan sarana transportasi menyebabkan masyarakat beralih menggunakan kendaraan pribadi yang menyebabkan kemacetan di jalan, sehingga menyebabkan sistem distribusi barang dan penumpang menjadi terhambat. Kurangnya tingkat kesesuaian, kecukupan dan keandalan sarana dan prasarana transportasi banyak direpresentasikan tidak hanya pada aspek kuantitas, melainkan juga terkait dengan kualitas (kemudahan, keamanan, serta kenyamanan) dalam menggunakan sarana dan prasarana transportasi.

2. Belum memadainya ketersediaan fasilitas penunjang dalam optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana transportasi di Jabodetabek

Belum memadainya ketersediaan fasilitas penunjang dalam optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana transportasi, seperti pengembangan *transfer point* (transfer moda), lokasi *park and ride*, maupun terminal dan stasiun *feeder* akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan kinerja transportasi. Fasilitas penunjang akan membantu pengguna dalam memberikan kenyamanan dan

kemudahan pemanfaatan sarana dan prasarana transportasi. Selain itu, fasilitas penunjang seperti jalan akses pada simpul transportasi masih ada beberapa yang belum terbangun, sehingga memerlukan koordinasi dengan pemerintah daerah maupun Kementerian PUPR.

3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan bidang perhubungan di Jabodetabek

Teknologi bidang transportasi pada prinsipnya memberikan dampak signifikan terhadap penataan dan pengaturan sistem transportasi di Indonesia. Beberapa konsep pengembangan teknologi melalui *Intelligent Transport System (ITS)* akan memberikan kemudahan dalam manajemen transportasi. Namun kendala yang dihadapi saat ini bahwa permasalahan transportasi di Indonesia tidak serta merta karena masalah teknologi, melainkan lebih pada masalah sosial dan ekonomi.

4. Masih rendahnya minat swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi

Masih rendahnya minat swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi dipengaruhi oleh faktor komitmen pemerintah dalam memberikan *road map*, penataan transportasi, serta kepastian investasi yang akan dilakukan oleh swasta dan pertimbangan ekonomi. Pola pengembangan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPBU) terkait dengan prosedur dan komitmen pembangunan maupun *sharing* sampai saat ini masih memerlukan perbaikan terkait dengan usaha mewujudkan kemudahan prosedur KPBU dan kemudahan dalam berinvestasi di Indonesia.

Di dalam kerangka perencanaan pembangunan nasional yang tertuang di RPJMN Tahun 2015-2019, *Public Private Partnership (PPP)* atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi salah satu alternatif dalam pembiayaan infrastruktur yang melibatkan peran badan usaha. Permasalahan dalam penyediaan infrastruktur melalui skema PPP dan KPBU adalah (1) Masih kurangnya informasi mengenai proyek baik dari sisi detail teknis maupun informasi keuangan serta analisis terhadap berbagai macam risiko dan jaminan pemerintah untuk pengelolaan resiko tersebut; (2) Masih sulitnya penerapan peraturan terkait dengan KPBU oleh para Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK); (3) Masalah pengadaan lahan yang terkadang belum terlihat di awal pengusulan proyek; (4) Kapasitas aparatur dan kelembagaan dalam melaksanakan KPBU masih belum sesuai kebutuhan; (5) Belum optimalnya dokumen perencanaan proyek KPBU bidang infrastruktur mengakibatkan pilihan strategi pelaksanaan proyek yang kurang memihak pada KPBU sehingga proyek infrastruktur yang menarik bagi pihak swasta dilaksanakan melalui pembiayaan APBN/APBD,

sedangkan proyek infrastruktur yang tidak menarik justru ditawarkan kepada pihak swasta.

5. Belum optimalnya dukungan hasil penelitian untuk menunjang kebutuhan sektor transportasi di Jabodetabek

Peningkatan kinerja penelitian/pengkajian transportasi membutuhkan peran aktif dari setiap sub-sektor khususnya untuk merumuskan kebutuhan penelitian/ pengkajian sehingga hasil penelitian/kajian memiliki nilai pemanfaatan yang tinggi. Namun dalam pelaksanaannya hasil penelitian yang dilakukan belum optimal untuk menunjang kebutuhan sektor transportasi, yang disebabkan banyak kegiatan penelitian/kajian masih bersifat sektoral dan belum memberikan nuansa lintas sektor. Hal ini menyebabkan penanganan permasalahan transportasi yang pada prinsipnya membutuhkan keterlibatan lintas sektor untuk mewujudkan peran transportasi yang maju, handal, dan produktif menjadi kurang optimal.

Selain permasalahan yang muncul dalam mencapai target pembangunan pada tahun 2017-2019, terdapat beberapa permasalahan baru diantaranya dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Dengan adanya perubahan nomenklatur maka akan terdapat penyesuaian dalam target pencapaian output dari masing masing sektor sesuai dengan perubahan yang terjadi.

2.5 TANTANGAN

Beberapa tantangan yang dihadapi BPTJ dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan transportasi Jabodetabek yang lancar dan terintegrasi antara lain:

1. Ego Sektoral yang tinggi

Tugas utama BPTJ untuk mengkoneksikan transportasi di wilayah Jabodetabek bukanlah tugas yang mudah. BPTJ perlu melakukan negosiasi di beberapa pihak agar bisa menyerahkan beberapa kewenangannya untuk selanjutnya akan dilaksanakan oleh BPTJ. Namun, hal ini tentu memerlukan keluwesan masing-masing para pihak terkait, agar terwujudnya transportasi yang lancar dan terintegrasi di wilayah Jabodetabek.

2. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di BPTJ minim

Saat ini PNBP menjadi pilihan alternatif untuk pembiayaan sektor perhubungan. Di BPTJ, PNBP yang diterima hanya bersal dari perizinan

taksi dan angkutan umum yang dilaksanakan secara online. Namun, seiring perkembangan zaman, dan masuknya taksi online di wilayah Jabodetabek, seharusnya BPTJ juga mampu mencakupi perizinan untuk taksi online. Sampai saat ini, jumlah taksi online di BPTJ belum bisa di hitung secara jelas dan pasti.

3. Masuknya Taksi Online di Wilayah Jabodetabek

Taksi online merupakan angkutan umum berbasis online yang saat ini ramai digunakan oleh masyarakat Jabodetabek. Jumlahnya yang sudah sangat banyak dan belum bisa diketahui jumlah pastinya menjadi tantangan tersendiri bagi BPTJ. Dibutuhkan pembatasan sistem recruitment taksi online dan pemenuhan standar angkutan umum khususnya bagi taksi online berbasis kendaraan roda empat. Perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut antara Kementerian Perhubungan aka BPTJ dengan instansi lain yang bersangkutan seperti perusahaan angkutan online dan Kemenkominfo.



BAB III

SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

3.1 SASARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019

Sesuai rumusan sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2010-2014, maka sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dijabarkan dalam 3 aspek yaitu (i) keselamatan dan keamanan, (ii) pelayanan transportasi, dan (iii) kapasitas transportasi sesuai tugas dan tupoksi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah. Adapun penjelasan terkait handal, berdaya saing dan nilai tambah yaitu sebagai berikut :

- **Handal** diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh pelosok tanah air;
- **Berdaya Saing** diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang berdaya saing internasional, profesional, mandiri, dan produktif;
- **Nilai tambah** diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional (*national security dan sovereignty*) di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan (*sustainable development*).

Adapun sasaran pembangunan infrastruktur transportasi Tahun 2015-2019, dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Aspek keselamatan dan keamanan transportasi, meliputi:

1. Menurunnya angka kecelakaan transportasi;
2. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi;

B. Pelayanan Transportasi

Aspek pelayanan transportasi, meliputi :

1. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
2. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan;
3. Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan;
4. Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan *good governance*;
5. Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan;
6. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi;
7. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan *clean governance*;

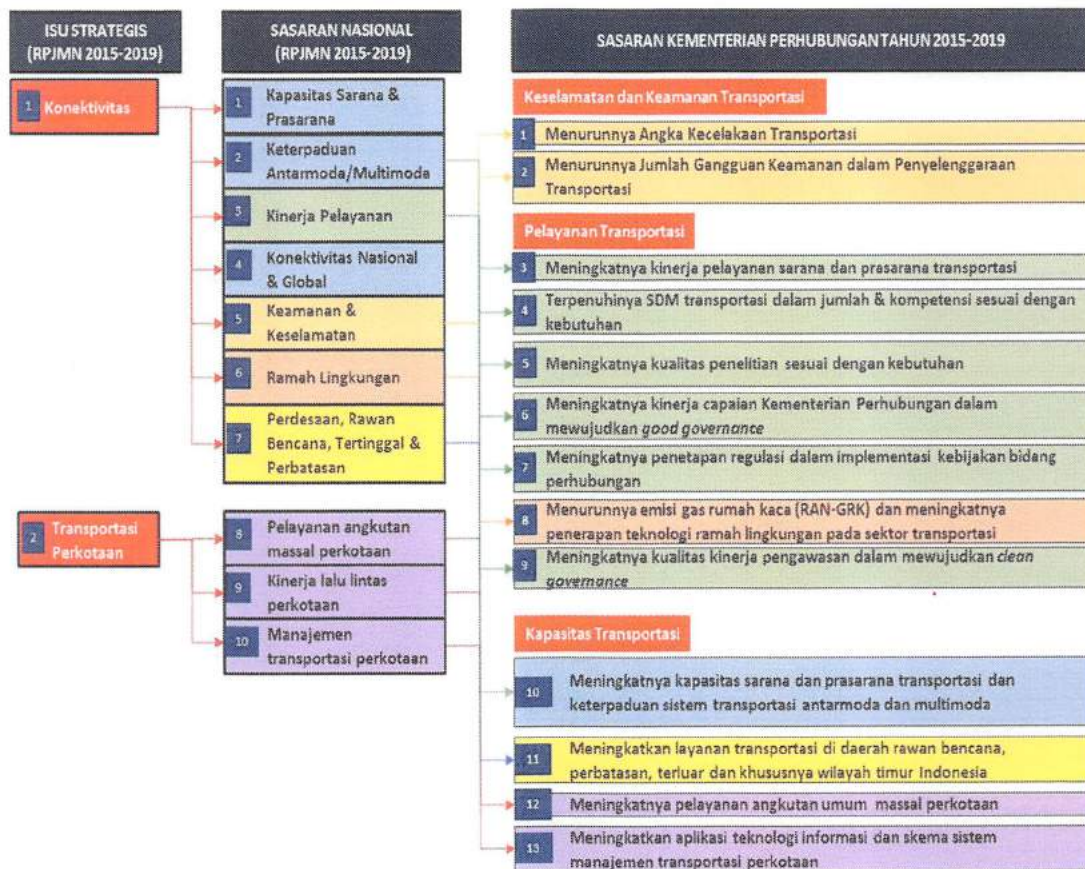
C. Kapasitas Transportasi

Aspek kapasitas transportasi, meliputi :

1. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda;
2. Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang;
3. Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan khususnya wilayah timur Indonesia;
4. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan;
5. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

Sasaran pembangunan transportasi Kementerian Perhubungan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan pada prinsipnya sejalan dengan sasaran pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Hal ini tentunya memiliki keselarasan dan interkoneksi yang memberikan pemahaman bahwa sasaran pembangunan nasional dapat dijabarkan kembali menjadi sasaran pada Kementerian Perhubungan yang secara khusus difokuskan pada perencanaan dan pembangunan transportasi. Adapun untuk secara lebih jelasnya korelasi antara sasaran pembangunan

nasional dengan sasaran Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 sebagaimana pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Sinkronisasi Sasaran RPJMN Tahun 2015-2019 dengan Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

Interkoneksi antara isu strategis dan sasaran Kementerian Perhubungan diperlukan sebagai dasar dalam mengidentifikasi alur pikir perencanaan pembangunan transportasi tahun 2015-2019, sehingga hubungan linearitas antara isu strategis dan sasaran pembangunan transportasi ke depan dapat terarah dan sejalan dengan agenda prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, sehingga sasaran Kementerian Perhubungan memiliki interkoneksi secara langsung dengan 9 agenda prioritas nasional (Nawa Cita). Hal ini memberikan konsekuensi logis dalam bidang transportasi bahwa konsep perencanaan dan pendekatan pembangunan bidang transportasi akan mendukung 9 (sembilan) agenda prioritas nasional selama 5 (lima) tahun ke depan.

Pendekatan isu strategis transportasi dalam perumusan sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 menjadi penting untuk lebih menata dan mengelola transportasi dengan baik, serta berbasis

pendekatan multidimensi/multisektor termasuk dalam hal ini kaitannya dengan aspek tata ruang, gender, sosial, lingkungan, dan budaya. Pendekatan tersebut akan membawa sinergitas pembangunan transportasi secara lebih terpadu, mewujudkan pembangunan dan penanganan permasalahan transportasi secara lebih komprehensif dan membawa perubahan pada karakteristik masyarakat, maupun perilaku masyarakat dalam menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana transportasi secara lebih baik dan bijaksana. Demikian juga Pemerintah menjadi bagian penting sebagai pihak yang akan selalu hadir dalam mengupayakan pembangunan dan pengembangan transportasi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3.2 SASARAN PROGRAM BPTJ

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden, maka visi dan misi tersebut dijabarkan dalam sasaran pembangunan nasional Kementerian Perhubungan. Dalam sasaran pembangunan nasional Kementerian Perhubungan, BPTJ mengambil beberapa peran, antara lain Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda untuk mengurangi *backlog* maupun *bottleneck* kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda dengan indikator Menurunnya waktu tempuh rata-rata per koridor untuk koridor utama dari 2,6 jam per 100 km menjadi 2,2 jam per 100 km pada lintas-lintas utama; Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan dengan indikator *Modal share* (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di kota megapolitan/metropolitan/besar minimal 32 %; dan Meningkatkan kinerja lalu lintas jalan Perkotaan dengan indikator Meningkatnya kecepatan lalu lintas jalan nasional di kota-kota metropolitan/besar menjadi minimal 20 km/jam.

Dengan memperhatikan sasaran strategis dan indikator kinerja utama di tingkat Kementerian Perhubungan, maka ditetapkan sasaran strategis BPTJ dalam Review Renstra 2016-2019 dalam menyelenggarakan transportasi di kawasan Jabodetabek:

1. Meningkatnya peran moda angkutan umum perkotaan di Wilayah Jabodetabek;
2. Menurunnya angka kecelakaan yang melibatkan angkutan umum di wilayah Jabodetabek;
3. Meningkatnya kecepatan rata-rata kendaraan umum pada jam puncak di wilayah Jabodetabek;
4. Meningkatnya kinerja pelaksanaan RITJ;

5. Meningkatnya cakupan pelayanan angkutan umum di kawasan perkotaan Jabodetabek;
6. Meningkatnya integrasi antarmoda transportasi di kawasan perkotaan Jabodetabek;
7. Meningkatnya pengawasan atas izin/rekomendasi yang dikeluarkan BPTJ;
8. Meningkatnya kinerja peningkatan kompetensi pegawai BPTJ;
9. Tersedianya informasi valid, handal, dan mudah diakses di Lingkungan BPTJ;
10. Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan BPTJ;
11. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan di lingkungan BPTJ.

Suatu sasaran kegiatan strategis dapat dikatakan tercapai atau tidak tentu saja memerlukan tolak ukur yang relevan. Berikut merupakan indikator kinerja utama BPTJ sebagai tolak ukur pelaksanaan sasaran BPTJ.

Tabel 3.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Program Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2019

SASARAN PROGRAM BPTJ (SP)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ (IKP)
SP1. Meningkatnya peran moda angkutan umum perkotaan di Wilayah Jabodetabek	IKP1. <i>Modal share</i> (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di Wilayah Jabodetabek
SP2. Menurunnya angka kecelakaan yang melibatkan angkutan umum di wilayah Jabodetabek	IKP2. Persentase penurunan jumlah kecelakaan dengan menggunakan angkutan umum di wilayah Jabodetabek
SP3. Meningkatnya kecepatan rata-rata kendaraan umum pada jam puncak di wilayah Jabodetabek	IKP3. Kecepatan rata-rata kendaraan umum pada jam puncak di wilayah Jabodetabek
SP4. Meningkatnya kinerja pelaksanaan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ)	IKP4. Persentase muatan RITJ yang telah dilaksanakan
SP5. Meningkatnya cakupan pelayanan angkutan umum di kawasan perkotaan Jabodetabek	IKP5. Rasio panjang jalan nasional yang terlayani oleh jaringan angkutan umum perkotaan

SASARAN PROGRAM BPTJ (SP)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ (IKP)
SP6. Meningkatnya integrasi antarmoda transportasi di kawasan perkotaan Jabodetabek	IKP6. Rasio jumlah fasilitas integrasi antarmoda transportasi yang telah selesai direncanakan
SP7. Meningkatnya pengawasan atas izin/rekomendasi yang dikeluarkan BPTJ	IKP7. Persentase izin/ rekomendasi yang telah diawasi
SP8. Meningkatnya kinerja peningkatan kompetensi pegawai BPTJ	IKP8. Rasio jumlah pegawai BPTJ yang telah mengikuti diklat
SP9. Tersedianya informasi valid, handal, dan mudah diakses di Lingkungan BPTJ	IKP9. Persentase sistem informasi yang telah dikembangkan di lingkungan BPTJ
SP10. Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan BPTJ	IKP10. Nilai AKIP BPTJ
SP11. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan di lingkungan BPTJ	IKP 11. Prosentase penyerapan anggaran BPTJ

3.3 TARGET KINERJA BPTJ TAHUN 2016-2019

Indikator Kinerja Program (IKP) BPTJ tahun 2016-2019 diupayakan sebagai indikator *outcome* dan bukan merupakan indikator *output*, yang dijabarkan dari sasaran strategis yang dibagi dalam empat *perspective* yaitu *stakeholder perspective*, *costumer perspective*, *internal process perspective* dan *learning and growth perspective*, dengan uraian detail target kinerja sebagai berikut:

1. Stakeholder Perspective

Sasaran Program pertama (SP1) berupa meningkatnya peran moda angkutan umum perkotaan di Wilayah Jabodetabek dengan Indikator Kinerja Program (IKP1) *Modal share* (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di Wilayah Jabodetabek ditargetkan pada Tahun 2019 sebesar 32%.

2. Costumer Perspectives

- Sasaran Program kedua (SP2) berupa menurunnya angka kecelakaan yang melibatkan angkutan umum di wilayah Jabodetabek dengan Indikator Kinerja Program (IKP2) persentase penurunan jumlah kecelakaan dengan menggunakan angkutan umum di wilayah Jabodetabek ditargetkan pada Tahun 2019 sebesar 10,8%.
- Sasaran Program ketiga (SP3) berupa meningkatnya kecepatan rata-rata kendaraan umum pada jam puncak di wilayah Jabodetabek dengan Indikator Kinerja Program (IKP3) kecepatan rata-rata kendaraan umum

pada jam puncak di wilayah Jabodetabek ditargetkan pada Tahun 2019 sebesar 17 km/jam.

3. Internal Process Perspectives

- a. Sasaran Program keempat (SP4) berupa meningkatnya kinerja pelaksanaan RITJ dengan Indikator Kinerja Program (IKP4) persentase muatan RITJ yang telah dilaksanakan ditargetkan pada Tahun 2019 sebesar 26%.
- b. Sasaran Program kelima (SP5) berupa meningkatnya cakupan pelayanan angkutan umum di kawasan perkotaan Jabodetabek dengan Indikator Kinerja Program (IKP5) rasio panjang jalan nasional yang terlayani oleh jaringan angkutan umum perkotaan ditargetkan pada Tahun 2019 sebesar 70%.
- c. Sasaran Program keenam (SP6) berupa meningkatnya integrasi antarmoda transportasi di kawasan perkotaan Jabodetabek dengan Indikator Kinerja Program (IKP6) rasio jumlah fasilitas integrasi antarmoda transportasi yang telah selesai direncanakan ditargetkan pada Tahun 2019 sebesar 15%.
- d. Sasaran Program ketujuh (SP7) berupa meningkatnya pengawasan atas izin/rekomendasi yang dikeluarkan BPTJ dengan Indikator Kinerja Program (IKP7) persentase izin/ rekomendasi yang telah diawasi ditargetkan pada Tahun 2019 sebesar 90%.

4. Learning & Growth Perspectives

- a. Sasaran Program kedelapan (SP8) berupa meningkatnya kinerja peningkatan kompetensi pegawai BPTJ dengan Indikator Kinerja Program (IKP8) rasio jumlah pegawai BPTJ yang telah mengikuti diklat ditargetkan pada Tahun 2019 sebesar 25%.
- b. Sasaran Program kesembilan (SP9) berupa tersedianya informasi valid, handal, dan mudah diakses di Lingkungan BPTJ dengan Indikator Kinerja Program (IKP9) persentase sistem informasi yang telah dikembangkan di lingkungan BPTJ ditargetkan pada Tahun 2019 sebesar 20%.
- c. Sasaran Program kesepuluh (SP10) berupa meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan BPTJ dengan Indikator Kinerja Program (IKP10) nilai AKIP BPTJ ditargetkan pada Tahun 2019 sebesar 88.
- d. Sasaran Program kesebelas (SP11) berupa meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan di lingkungan BPTJ dengan Indikator Kinerja Program (IKP11) prosentase penyerapan anggaran BPTJ ditargetkan pada Tahun 2019 sebesar 95%.

Adapun runtutan target kinerja untuk setiap tahun dari Tahun 2017 hingga Tahun 2019 bagi masing-masing indikator kinerja disampaikan secara lengkap di **Tabel 3.2**.

Tabel 3.2 Tahapan Pencapaian Target Kinerja BPTJ 2016-2019

TUJUAN BPTJ (T)	SASARAN PROGRAM BPTJ (SP)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ (IKP)	BASE LINE 2016	TARGET CAPAIAN		
				2017	2018	2019
T1. Mewujudkan pelayanan angkutan umum yang handal, berdaya saing; dan memberikan nilai tambah di wilayah Jabodetabek secara berkelanjutan	SP1. Meningkatnya peran moda angkutan umum perkotaan di Wilayah Jabodetabek	IKP1. <i>Modal share</i> (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di Wilayah Jabodetabek	24%	26%	29%	32%
T2. Meningkatkan keselamatan dalam pelayanan angkutan umum di wilayah jabodetabek	SP2. Menurunnya angka kecelakaan yang melibatkan angkutan umum di wilayah Jabodetabek	IKP2. Persentase penurunan jumlah kecelakaan dengan menggunakan angkutan umum di wilayah Jabodetabek	8,2%	8,9%	9,7%	10,8%
T3. Meningkatkan kinerja pelayanan angkutan umum di wilayah Jabodetabek	SP3. Meningkatnya kecepatan rata-rata kendaraan umum pada jam puncak di wilayah Jabodetabek	IKP3. Kecepatan rata-rata kendaraan umum pada jam puncak di wilayah Jabodetabek	14 km/jam	15 km/jam	16 km/jam	17 km/jam
T4. Melaksanakan perumusan kebijakan transportasi	SP4. Meningkatnya kinerja pelaksanaan Rencana	IKP4. Persentase muatan RITJ yang telah dilaksanakan	1%	3%	22%	24%

TUJUAN BPTJ (T)	SASARAN PROGRAM BPTJ (SP)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ (IKP)	BASE LINE 2016	TARGET CAPAIAN		
				2017	2018	2019
di wilayah Jabodetabek	Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ)					
T5. Meningkatkan aksesibilitas, kapasitas dan integrasi sistem angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek	SP5. Meningkatnya cakupan pelayanan angkutan umum di kawasan perkotaan Jabodetabek	IKP5. Rasio panjang jalan nasional yang terlayani oleh jaringan angkutan umum perkotaan	55%	57%	63%	70%
	SP6. Meningkatnya integrasi antarmoda transportasi di kawasan perkotaan Jabodetabek	IKP6. Rasio jumlah fasilitas integrasi antarmoda transportasi yang telah selesai direncanakan	5%	7%	10%	15%
T6. Meningkatkan efektivitas pengawasan dalam penyelenggar aan transportasi di wilayah Jabodetabek	SP7. Meningkatnya pengawasan atas izin/rekomend asi yang dikeluarkan BPTJ	IKP7. Persentase izin/ rekomendasi yang telah diawasi	30%	60%	75%	90%
T7. Mewujudkan SDM BPTJ yang kompeten dan professional	SP8. Meningkatnya kinerja peningkatan kompetensi pegawai BPTJ	IKP8. Rasio jumlah pegawai BPTJ yang telah mengikuti diklat	-	20%	25%	25%
T8. Mewujudkan <i>good, clean, and open government</i> di BPTJ	SP9. Tersedianya informasi valid, handal, dan mudah diakses di	IKP9. Persentase sistem informasi yang telah dikembangkan	100%	60%	20%	20%

TUJUAN BPTJ (T)	SASARAN PROGRAM BPTJ (SP)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ (IKP)	BASE LINE 2016	TARGET CAPAIAN		
				2017	2018	2019
	Lingkungan BPTJ	di lingkungan BPTJ				
	SP10. Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan BPTJ	IKP10. Nilai AKIP BPTJ	42,28	83	88	88
	SP11. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan di lingkungan BPTJ	IKP 11. Prosentase penyerapan anggaran BPTJ	-	90	92	95

3.4 TARGET KINERJA BPTJ TAHUN 2019

Target Kinerja BPTJ tahun 2019 merupakan target tahunan yang telah tercantum dalam Rencana Program 2016-2019 dalam rangka mendukung target pencapaian kinerja BPTJ pada tahun 2019. Adapun rincian rumusan target kinerja pada Rencana Program BPTJ untuk tahun 2019 adalah seperti **Tabel 3.3** berikut:

Tabel 3.3 Target Kinerja BPTJ Tahun 2019

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(SP) SASARAN PROGRAM BPTJ	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SS1 Mewujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas nasional dan peningkatan angkutan.	SP5 Meningkatnya cakupan pelayanan angkutan umum di kawasan perkotaan Jabodetabek	IKP5 Rasio panjang jalan nasional yang terlayani oleh jaringan angkutan umum perkotaan		%	70
		IKK1	Terlaksananya monitoring dan evaluasi SPM simpul dan Fasilitas Pendukung transportasi darat di Jabodetabek	Dokumen	1
		IKK2	Terlaksananya peningkatan pengetahuan teknis tentang Transportasi Darat	Dokumen	1
		IKK3	Tersusunnya dokumen perencanaan	Dokumen	4

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(SP) SASARAN PROGRAM BPTJ	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
			Terminal Tipe A di wilayah Jabodetabek		
		IKK4	Terlaksananya pembangunan/ perawatan/pengembangan prasarana transportasi darat dan fasilitas pendukung di wilayah Jabodetabek	Dokumen	1
		IKK5	Tersusunnya dokumen evaluasi atas pembangunan dan pengembangan Transportasi Jalan di wilayah Jabodetabek	Dokumen	1
		IKK11	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelayanan prasarana perkeretaapian di Jabodetabek	Dokumen	1
		IKK18	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi atas pembangunan dan pengembangan kawasan berorientasi transit di wilayah Jabodetabek	Dokumen	1
		IKK54	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengembangan jaringan lintas angkutan barang jalan, perairan dan perkeretaapian di Jabodetabek	Dokumen	2

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(SP) SASARAN PROGRAM BPTJ	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
		IKK55	Tersusunnya Dokumen Perencanaan jaringan lintas angkutan barang jalan, perairan dan perkeretaapian di Jabodetabek	Dokumen	1
SS2 Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi	SP2 Menurunnya angka kecelakaan yang melibatkan angkutan umum di wilayah Jabodetabek	IKP2 Persentase penurunan jumlah kecelakaan dengan menggunakan angkutan umum di wilayah Jabodetabek		%	10,8
		IKK33	Terselenggaranya Pengadaan, pemasangan fasilitas perlengkapan jalan Nasional di wilayah Jabodetabek	Laporan	12
			Rambu	%	62,50
			Penerangan Jalan	%	62,74
			RPPJ	%	65,71
			Marka	%	60,52
			Warning Light	%	61,40
			Cermin Tikung	%	0,00
			Paku Jalan	%	0,00
		IKK34	Terselenggaranya pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan Nasional di wilayah Jabodetabek	Laporan	1
		IKK44	Terlaksananya pembinaan pengusaha	Laporan	2

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(SP) SASARAN PROGRAM BPTJ	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
			angkutan umum jalan, perairan dan perkeretaapian di wilayah Jabodetabek		
		IKK63	Pelaksanaan pengawasan SPM operasional terminal, stasiun, dan pelabuhan angkutan perairan	Kegiatan	1
		IKK64	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan angkutan	Laporan	2
		IKK67	Pembinaan keselamatan sarana angkutan orang dan barang di wilayah Jabodetabek	Laporan	1
SS3 Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	SP3 Meningkatnya kecepatan rata-rata kendaraan umum pada jam puncak di wilayah Jabodetabek	IKP3 Kecepatan rata-rata kendaraan umum pada jam puncak di wilayah Jabodetabek		Km/Jam	17
		IKK29	Tersusunnya Perencanaan; fasilitas perlengkapan jalan Nasional di wilayah Jabodetabek	Laporan	1
		IKK30	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Ruas dan Simpang Jalan Nasional di wilayah Jabodetabek	Laporan	1



BAB IV PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019

4.1 KERANGKA PENDANAAN

Aspek pendanaan merupakan salah satu kunci utama dalam tercapainya pembangunan infrastruktur karena memerlukan dana yang besar. Pembangunan infrastruktur transportasi membutuhkan pembiayaan yang terstruktur dalam periode yang panjang. Pemerintah dapat meningkatkan pembelanjaan sektor publik hingga mencapai 5% bahkan hingga 7% PDB. Pemerintah mempunyai kewajiban *Public Sector Obligation* (PSO) membangun infrastruktur dasar yang layak secara ekonomi tetapi tidak layak secara komersial. Kemitraan pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership*) diperlukan untuk mendukung proyek-proyek yang layak secara ekonomi namun kurang layak secara finansial.

4.2 PENDANAAN BPTJ TAHUN 2017-2019

Kerangka pendanaan transportasi di BPTJ disusun berdasarkan kebutuhan capaian kinerja BPTJ yang direpresentasikan melalui Indikator Kinerja Program BPTJ, serta Kerangka Regulasi BPTJ tahun 2017 sejumlah Rp. 120.444.000.000,- pada tahun 2017, pendanaan BPTJ berjumlah Rp. 204.744.255.000,- pada tahun 2018 sedangkan pada tahun 2019 penganggaran jumlah pendanaan ditargetkan sebesar Rp. 2.306.834.138,-. Total Pendanaan BPTJ yang direncanakan antara tahun 2016-2019 mencapai Rp. 2.061.274.269.000,-. Adapun rincian pendanaan untuk tiap unit kerja di BPTJ pada tahun 2017-2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rincian Pendanaan Untuk Setiap Eselon II BPTJ Tahun 2017-2019

NO	Unit Kerja	PAGU ALOKASI (Rp.000,-)				PAGU KEBUTUHAN (Rp.000,-)
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Sekretariat BPTJ	-	-	52.142.866	78.406.602	647.784.281
2	Direktorat Perencanaan dan Pengembangan	-	-	11.501.570	13.258.921	268.949.615
3	Direktorat Prasarana	-	-	26.963.976	62.497.090	934.688.953
4	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan	-	-	29.835.588	50.581.642	209.851.421
	Total			120.444.000	204.744.255	2.061.274.269

Rencana pendanaan di BPTJ tersebut direncanakan untuk penyelenggaraan kegiatan Sekretariat Badan sebesar Rp. 647.784.281.000,- dengan rincian penggunaannya untuk penyusunan rencana program dan pengelolaan keuangan, pelayanan hukum, pengelolaan kepegawaian dan administrasi perkantoran, pelayanan hubungan masyarakat dan teknologi informasi dan komunikasi, layanan sarana dan prasarana internal, dan layanan perkantoran.

Kerangka pendanaan BPTJ yang direncanakan untuk penyelenggaraan kegiatan Direktorat Perencanaan dan Pengembangan sistem transportasi di wilayah Jabodetabek adalah sebesar Rp. 268.949.615.000,- dengan rincian penggunaan Penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan pembiayaan pengembangan transportasi jabodetabek, Penyusunan rencana umum dan teknis pengembangan transportasi jabodetabek, dan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan dan pengembangan transportasi jabodetabek.

Dalam usaha pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bidang transportasi di wilayah Jabodetabek, kerangka pendanaan yang direncanakan untuk Direktorat Prasarana adalah sebesar Rp. 934.688.953.000,- dengan rincian penggunaan dana antara lain Pengembangan dan peningkatan prasarana jalan di wilayah Jabodetabek, Pengembangan dan peningkatan prasarana perkeretaapian di wilayah Jabodetabek, dan Pengembangan dan peningkatan integrasi prasarana penunjang penyediaan pelayanan angkutan umum di wilayah Jabodetabek.

Lebih lanjut kerangka pendanaan yang direncanakan untuk Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan di wilayah Jabodetabek adalah sebesar Rp. 209.851.421.000,-. Total anggaran tersebut digunakan untuk membiayai rincian kegiatan, meliputi Peningkatan sarana penunjang dan manajemen pelayanan angkutan umum di wilayah jabodetabek, Manajemen permintaan lalu lintas di wilayah jabodetabek, dan Pengawasan operasional lalu lintas dan angkutan di wilayah.

Dalam rangka mewujudkan sasaran dalam Renstra BPTJ tahun 2017-2019, ditetapkan target Program Pengelolaan Transportasi Jabodetabek meliputi kegiatan pada kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Layanan Perencanaan dan Pengembangan Transportasi Jabodetabek, Layanan Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Transportasi Jabodetabek dan Layanan Peningkatan , Penyediaan serta Pengembangan.

Dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh BPTJ pada kurun waktu 2017-2019, berikut adalah kegiatan-kegiatan prioritas yang telah dilaksanakan oleh BPTJ dari tahun 2017-2018, antara lain:

4.2.1 Sekretariat BPTJ :

- Bagian Perencanaan dan Keuangan:

- 1) Penyusunan Rencana Kerja, Program dan Kegiatan;
- 2) Penyusunan RKA-KL;
- 3) Rakornis Pengembangan Transportasi se Jabodetabek;
- 4) Peningkatan Kapasitas Penyusunan SAKIP BPTJ;
- 5) Penyiapan Bahan Pimpinan;
- 6) Penyusunan Perjanjian Kinerja BPTJ;
- 7) Penyusunan Laporan Tahunan BPTJ;
- 8) Penyusunan LAKIP;
- 9) Rapat Koordinasi Kelembagaan;
- 10) Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di Jabodetabek Tahun anggaran 2018;
- 11) SIMAK Barang Milik Negara (BMN);
- 12) Monitoring dan Evaluasi Daya Serap Anggaran;
- 13) Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak;
- 14) Pengelolaan Administrasi Pembendaharaan;
- 15) Penyusunan dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan melalui Aplikasi SAIBA;
- 16) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan;
- 17) Pembinaan dan Evaluasi Hasil Pemeriksaan LHA/LHP dan Tindak Lanjut;
- 18) Evaluasi, Perencanaan dan Pengembangan TOD di Jabodetabek.

- **Bagian Hukum :**
 - 1) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 2) Jaringan Dokumentasi Hukum dan Kerjasama;
 - 3) Sosialisasi Peraturan/Produk Hukum;
 - 4) Pemberian Bantuan Hukum;
 - 5) Kerjasama di Bidang Transportasi;

- **Bagian Kepegawaian dan Umum :**
 - 1) Penyelenggaraan Pengadaan CPNS Formasi 2017;
 - 2) Penyelenggaraan Pengadaan CPNS Formasi 2018;
 - 3) Updating Database Kepegawaian;
 - 4) Penyelesaian Administrasi Kepegawaian;
 - 5) Penataan Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
 - 6) Peningkatan Jiwa Kerja;
 - 7) Penyertaan Pendidikan dan Pelatihan Struktural;
 - 8) Penyertaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
 - 9) Penyusunan Analisis Jabatan;
 - 10) Sosialisasi Bidang Kepegawaian;
 - 11) Analisis Beban Kerja;
 - 12) *Master Plan* Pengembangan Sumber Daya Manusia BPTJ Tahun 2018-2022;
 - 13) Pengelolaan Administrasi Penggajian;
 - 14) Penyuluhan Gerakan Anti Narkoba;
 - 15) Koordinasi Kelembagaan Pengelolaan Terminal Tipe A di Jabodetabek;
 - 16) Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Pengelolaan Terminal Tipe A di Jabodetabek;

- **Bagian Humas dan TIK :**
 - 1) Updating Data Info Booth;
 - 2) Penyusunan Buku dan Video BPTJ;
 - 3) Pengelolaan Website BPTJ;
 - 4) Kegiatan Kehumasan Melalui Pemberitaan;
 - 5) Kegiatan Kehumasan Melalui Publikasi (Non Pemberitaan);
 - 6) Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat;
 - 7) Disseminasi Informasi Melalui Publikasi Pemberitaan/Non Pemberitaan;
 - 8) Disseminasi Informasi Melalui Talk Show;
 - 9) Hubungan Antar Lembaga;
 - 10) Analisis dan Evaluasi Berita dan Opini Publik;
 - 11) Pengelolaan E-Newsletter;
 - 12) Pelayanan Informasi Publik oleh PPID BPTJ;
 - 13) Pengembangan Portal BPTJ;
 - 14) Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri;

- 15) *Hardware* untuk Portal Server;
- 16) Pengelolaan Database Transportasi Jabodetabek;
- 17) Pemeliharaan Jaringan/Peralatan Pengelolaan Jaringan Komputer;
- 18) Peralatan Sistem Informasi;
- 19) Pengadaan Software Pendukung Opreasional Kerja.

4.2.2 Direktorat Perencanaan dan Pengembangan :

- Sub Direktorat Kebijakan dan Pembiayaan :

- 1) Evaluasi Sasaran Pembangunan Transportasi Terintegrasi Jabodetabek;
- 2) Penyusunan Metode Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengembangan Transportasi Jabodetabek;
- 3) Perumusan Perencanaan Teknis Pengelolaan Pelabuhan Penyebrangan/ Short Sea Shipping Wilayah Jabodetabek;
- 4) Studi/Kajian/ DED/ STD/ Amdal/ Norma/ Standar/ Pedoman/ Kriteria/ Prosedur Bidang Perencanaan dan Pengembangan BPTJ

- Sub Direktorat Perencanaan Program :

- 1) Koordinasi Perencanaan Transportasi Jabodetabek;
- 2) Studi/ Kajian/ DED/ STD/ Amdal/ Norma/ Standar/ Pedoman/ Kriteria/ Prosedur Bidang Perencanaan dan Pengembangan BPTJ;
- 3) Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pembangunan Transportasi Jabodetabek

- Sub Direktorat Evaluasi Program :

- 1) Evaluasi Kinerja Lalu Lintas dan Pelayanan Angkutan Umum di Jabodetabek;
- 2) Penyusunan Formulasi Tarif dan PSO Angkutan Umum di Jabodetabek.

4.2.3 Direktorat Prasarana :

- Sub Direktorat Prasarana Jalan :

- 1) Monitoring dan Evaluasi SPM Terminal Penumpang Angkutan Jalan di Jabodetabek;
- 2) Studi/ Kajian/ DED/ STD/ Amdal/ Norma/ Standar/ Pedoman/ Kriteria/ Prosedur Bidang Prasarana BPTJ;
- 3) Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Jalan Nasional di Jabodetabek;

- 4) Pembangunan Terminal Tipe A di Jabodetabek (Terminal Tipe Jatijajar di Kota Depok).

- **Sub Direktorat Prasarana Perkeretaapian :**

- 1) Monitoring dan Evaluasi Stasiun KA Commuter dan Perlintasan pada Lintas *Double-Double Track* (DDT) Manggarai-Cikarang di Jabodetabek;
- 2) Pengadaan Peralatan Penunjang Pemantauan SPM Stasiun;
- 3) Studi/ Kajian/ DED/ STD/ Amdal/ Norma/ Standar/ Pedoman/ Kriteria/ Prosedur Bidang Prasarana BPTJ;
- 4) Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Stasiun Kereta Api Komuter di Jabodetabek;
- 5) In House Training Konsultant;
- 6) Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Stasiun Terintegrasi di Wilayah Jabodetabek.

- **Sub Direktorat Integrasi Prasarana :**

- 1) Bimbingan Teknis Perencanaan Integrasi Simpul Transportasi Jabodetabek;
- 2) Studi/ Kajian/ DED/ STD/ Amdal/ Norma/ Standar/ Pedoman/ Kriteria/ Prosedur Bidang Prasarana BPTJ;
- 3) Pembangunan dan Integrasi ATCS di Jabodetabek;
- 4) Pengoperasian ATCS di Wilayah Jabodetabek;
- 5) Pemeliharaan ATCS Jabodetabek;
- 6) Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Integrasi Moda dan TOD;
- 7) Penataan Lalu Lintas di Simpul-simpul Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) di Jabodetabek.

4.2.4 Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan :

- **Sub Direktorat Angkutan :**

- 1) Semiloka Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang di Wilayah Jabodetabek;
- 2) Sosialisasi Peraturan Menteri Terkait Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Massal di Jabodetabek;
- 3) Sosialisasi Implementasi Sistem Perizinan Jabodetabek;
- 4) Penataan Perizinan Angkutan Umum Jabodetabek;
- 5) Pengadaan Blanko Dokumen Perizinan;
- 6) Pengolah Data dan Komunikasi;
- 7) Studi/ Kajian/ DED/ STD/ Amdal/ Norma/ Standar/ Pedoman/ Kriteria/ Prosedur Bidang Lalu Lintas dan Angkutan BPTJ;
- 8) Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan;
- 9) Pendataan dan Penataan dalam Rangka Pengembangan Rute Angkutan Umum Jabodetabek;

- 10) Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang di Wilayah Jabodetabek;
- 11) Penghargaan Pramudi, Masinis dan Operator Angkutan Umum Teladan di Wilayah Jabodetabek.

- **Sub Direktorat Manajemen Lalu Lintas :**

- 1) Evaluasi Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas
- 2) Pengawasan dan Monitoring Hasil analisis Dampak Lalu Lintas
- 3) Monitoring dan Evaluasi Kinerja Ruas Jalan di Jabodetabek;
- 4) Monitoring dan Evaluasi Kinerja Simpang di Jabodetabek;
- 5) Monitoring dan Evaluasi Keselamatan Jalan Lalu Lintas di Jabodetabek;
- 6) Pengadaan Alat Uji Fasilitas Perlengkapan Jalan (Marka dan Rambu);
- 7) Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan;
- 8) Studi/ Kajian/ DED/ STD/ Amdal/ Norma/ Standar/ Pedoman/ Kriteria/ Prosedur Bidang Lalu Lintas dan Angkutan BPTJ;
- 9) Pengadaan Alat Survey Lalu Lintas dan Angkutan;
- 10) Peningkatan Kinerja Lalu Lintas Ruas dan Simpang di Jabodetabek;
- 11) Pengolahan Data dan Komunikasi;
- 12) Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Perlengkapan Jalan.

- **Sub Direktorat Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan :**

- 1) Koordinasi Teknis Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Se-Jabodetabek;
- 2) Pengawasan Pelaksanaan RITJ Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah Bekasi;
- 3) Pengawasan Pelaksanaan RITJ Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah Bogor;
- 4) Pengawasan Pelaksanaan RITJ Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah Tangerang;
- 5) Pengawasan Pelaksanaan RITJ Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah DKI Jakarta;
- 6) Pengawasan Operasional Terminal Tipe A di Wilayah Jabodetabek;
- 7) Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru;
- 8) Pengadaan Media Komunikasi dan Sosialisasi Angkutan Hari Raya;
- 9) Pengadaan Peralatan Penunjang Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan;
- 10) Pengadaan Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak;
- 11) Pengolahan Data dan Komunikasi;

- 12) Studi/ Kajian/ DED/ STD/ Amdal/ Norma/ Standar/ Pedoman/ Kriteria/ Prosedur Bidang Lalu Lintas dan Angkutan BPTJ;
- 13) Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan di 9 (Sembilan) Wilayah Jabodetabek;
- 14) Pemeriksaan Kelaikan Sarana Angkutan Umum Wilayah Jabodetabek;
- 15) Sosialisasi, Publikasi BPTJ dan Kampanye Keselamatan dan Ketertiban Transportasi Jalan di Wilayah Jabodetabek.

4.3 INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS BPTJ TAHUN 2019

Pada tanggal 12 November 2018 telah ditetapkan PM 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, hal ini menyebabkan terjadi resutrukturisasi dalam organisasi dalam BPTJ. Akibatnya Ada 1 (satu) Direktorat yang hilang yaitu Direktorat Perencanaan dan Pengembangan dan ada 1 (satu) Direktorat yang dipecah menjadi 2 (dua) yaitu; Direktorat Lalu Lintas Angkutan (semula) menjadi Direktorat Lalu Lintas dan Direktorat Angkutan dan perubahan pada Sekretariat Bagian Humas dan TIK (semula) menjadi Bagian Humas (Hubungan Masyarakat).

Berikut ini daftar kegiatan Badan Pengelola Transportasi (BPTJ) pada tahun 2019 sesuai dengan organisasi baru

A. Sekretariat BPTJ :

- Bagian Perencanaan dan Keuangan :

- 1) Penyusunan Rencana Kerja, Program dan Kegiatan;
- 2) Penyusunan RKA-KL;
- 3) Peningkatan Kapasitas Penyusunan SAKIP BPTJ;
- 4) Penyiapan Bahan Rapat Pimpinan;
- 5) Penyusunan Laporan Tahunan BPTJ;
- 6) Penyusunan LAKIP BPTJ;
- 7) Penyusunan Perjanjian Kinerja BPTJ;
- 8) Penyusunan SPIP;
- 9) Koordinasi Kelembagaan;
- 10) Monitoring dan Evaluasi Daya Serap Anggaran;
- 11) Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak;
- 12) Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN);
- 13) Penyusunan Laporan SIMAK BMN;
- 14) Penyusunan dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan melalui Aplikasi SAIBA;
- 15) Pengelolaan Administrasi Pembendaharaan;
- 16) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan;

- 17) Pembinaan dan Evaluasi Hasil Pemeriksaan LHP/LHA dan Tindak Lanjut; .
- 18) Monitoring Pelaksanaan Rencana dan Program;
- 19) Rapat Koordinasi Teknis RAKORNIS Pembangunan Transportasi Jabodetabek;

- **Bagian Hukum :**

- 1) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 2) Jaringan Dokumentasi Hukum dan Kerjasama;
- 3) Sosialisasi Peraturan/Produk Hukum;
- 4) Pemberian Bantuan Hukum;
- 5) Kerjasama di Bidang Transportasi.

- **Bagian Kepegawaian dan Umum;**

- 1) Penataan Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
- 2) Capacity Building Sumber Daya Manusia BPTJ;
- 3) Sosialisasi Bidang Kepegawaian;
- 4) Pelaksanaan Penyelegaraan Pengadaan CPNS Formasi Tahun 2019;
- 5) Peningkatan Jiwa Korsa;
- 6) Penyuluhan Gerakan Anti Narkoba;
- 7) Kegiatan Pelaksanaan Seleksi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
- 8) Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
- 9) Kegiatan Pindah Pensiun dan Mutasi Pegawai;
- 10) Pengembangan Sumber Daya Manusia BPTJ dengan Output Pola Diklat.

- **Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) :**

- 1) Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat;
- 2) Penyelenggaraan Kegiatan Penyusunan Materi Publikasi (Non Pemberitaan);
- 3) Penyelenggaraan Kegiatan Penyusunan Dokumentasi;
- 4) Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan Website BPTJ;
- 5) Penyelenggaraan Kegiatan Hubungan Media;
- 6) Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan Media Sosial dan Jejaring Komunikasi;
- 7) Penyelenggaraan Analisis Berita dan Opini Publik .

B. Direktorat Prasarana :

- **Sub Direktorat Prasarana Transportasi Darat :**

- 1) Monitoring dan Evaluasi SPM Terminal Penumpang Angkutan Jalan di Jabodetabek;
- 2) Bimtek Terminal Tipe A di Jabodetabek;

- 3) Penyusunan Naskah Akademik Penyelenggaraan Terminal Tipe A Terintegrasi di Jabodetabek;
- 4) Supervisi Lanjutan Pembangunan Terminal Tipe A Jatijajar;
- 5) Reviu DED Lanjutan Pembangunan Terminal Jatijajar untuk Pembangunan TOD;
- 6) Perencanaan Teknis Penanganan Missing Link di Wilayah Jabodetabek;
- 7) Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Jalan Nasional di Jabodetabek;
- 8) Lanjutan Pembangunan Terminal Tipe A Jatijajar.

- **Sub Direktorat Prasarana Transportasi Perkeretaapian :**

- 1) Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Stasiun Kereta Api Komuter di Jabodetabek;
- 2) Penyusunan SPM Aksesibilitas dan Fasilitas Bagi Orang Berkebutuhan Khusus di Simpul LRT, MRT dan KA Bandara di Jabodetabek;
- 3) FS dan Basic Desain Pembangunan Jalur Ganda Lintas Citayam-Parung Panjang di Kabupaten Bogor;
- 4) FS dan DED Gardu Traksi Sisipan Jatinegara- Tanjung Priuk dan Lintas Bekasi – Cikarang;
- 5) Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Stasiun KA dan LRT di Jabodetabek;
- 6) Review DED Perlintasan tidak Sebidang pada Lintas Jatinegara s.d. Cikarang di Kabupaten Bekasi;
- 7) Review DED Perlintasan tidak Sebidang pada Lintas Bogor s.d. Manggarai di Kota Kabupaten Bogor;
- 8) DED Peningkatan Persinyalan pada Lintas Tanah Abang s.d. Rangkas Bitung.

- **Sub Direktorat Integrasi Prasarana Transportasi :**

- 1) Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Integrasi Moda dan Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (*Transit Oriented Development*) TOD;
- 2) Penyusunan pedoman penilaian pemenuhan SPM Fasilitas Integrasi pada Simpul Transportasi dan TOD di Jabodetabek;
- 3) Pendampingan PPP *Public Private Patnership*, KPBU Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha;
- 4) Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Stasiun Terintegrasi di Wilayah Jabodetabek;
- 5) *In House Consultant* Prasarana;
- 6) Penataan Lalu Lintas Titik Simpul Transportasi di Jabodetabek;
- 7) Pembangunan ATCS Koridor DKI Tangerang;
- 8) Supervisi Pembangunan ATCS Koridor DKI Tangerang.

C. Direktorat Lalu Lintas :

- Sub Direktorat Lalu Lintas Transportasi Darat :

- 1) Pengoperasian dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan;
- 2) Pembangunan Sistem Perizinan Online Andalalin BPTJ;
- 3) Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Perlengkapan Jalan Nasional di Wilayah Jabodetabek;
- 4) Evaluasi Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Jabodetabek;
- 5) Monitoring Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
- 6) Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Perlengkapan jalan di Ruas Jalan Nasional Jabodetabek;
- 7) Perencanaan Teknis Penerapan Emision Zone di Jabodetabek;
- 8) Peningkatan Kinerja Lalu Lintas Ruas dan Simpang di Jabodetabek;
- 9) Monitoring dan Evaluasi Dampak Kebijakan di Sektor Transportasi Tahun 2017 s.d 2018 di Wilayah Jabodetabek;
- 10) Bimbingan Teknis Pengawasan dalam Pemberian Prioritas Kendaraan Khusus atau Kegiatan Insidentil;

- Sub Direktorat Lalu Lintas Perkeretaapian :

- 1) Studi Trase LRT Cibubur s.d. Baranangsiang s.d Kota Bogor;
- 2) Pelatihan Sistem MRT.

- Sub Direktorat Pengembangan Sistem dan Informasi Transportasi :

- 1) Pengoperasian ATCS BPTJ dan Monitoring Infrastruktur pada Titik Simpang;
- 2) Pemeliharaan ATCS BPTJ;
- 3) Pembangunan e-SPT dan SMS gateway;
- 4) Pengadaan Perangkat SMS gateway;
- 5) Perencanaan Teknis Pengembangan Matriks Asal Tujuan Jabodetabek 2019.

D. Direktorat Angkutan :

- Sub Direktorat Angkutan Orang :

- 1) Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan *Online* Angkutan Umum;
- 2) Pengadaan Peralatan Penunjang Perizinan Angkutan Umum;
- 3) Pencetakan Blanko Perizinan Angkutan Umum dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek;
- 4) Pengadaan Stiker Angkutan Umum;
- 5) Pengembangan 20 Trayek Utama Prioritas Jabodetabek;
- 6) Pembangunan *Database* Perizinan Angkutan Umum Berbasis Digital;

- 7) Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal SPM Angkutan Umum dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek di Wilayah Jabodetabek;
- 8) Penghargaan Pramudi dan Masinis Teladan di Wilayah Jabodetabek;
- 9) Penghargaan Operator Angkutan Umum Terbaik di Wilayah Jabodetabek;
- 10) Koordinasi Kelembagaan Pengelolaan Terminal Tipe A di Jabodetabek.

- **Sub Direktorat Angkutan Barang :**

- 1) Pendataan, Penataan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan;
- 2) Evaluasi Kinerja Lalu Lintas dan Pelayanan Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek Tahun 2019;
- 3) Rencana Induk Terminal Barang Jabodetabek.

- **Sub Direktorat Pendanaan dan Pengawasan Angkutan :**

- 1) Rencana Teknis Pengembangan Dana ERP;
- 2) Kajian DAK Dana Alokasi Khusus untuk Angkutan Umum dan Peningkatan Keselamatan Jabodetabek;
- 3) Pengawasan dan Monitoring Pelaksanaan Perizinan Angkutan Umum di 9 (sembilan) Wilayah Jabodetabek;
- 4) Koordinasi Teknis Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Se-Jabodetabek;
- 5) Pengawasan dan Monitoring Kelaikan Sarana Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek;
- 6) Pengawasan dan Monitoring Kinerja Operasional Terminal Tipe A di Wilayah Jabodetabek;
- 7) Pengadaan Peralatan Penunjang Pengawasan Angkutan;
- 8) Pemeliharaan Aplikasi Pengawasan Angkutan Jalan di Terminal Tipe A Jabodetabek;
- 9) Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru.

4.3.1 INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS SEKRETARIAT BPTJ TAHUN 2019

Kegiatan prioritas Sekretariat BPTJ merupakan kegiatan bidang yang mendukung baik yang berperan langsung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPTJ untuk mengatasi masalah transportasi di wilayah Jabodetabek, maupun kegiatan non teknis yang mendukung tetap berjalannya kegiatan selama tahun anggaran 2019. Berikut adalah tabel yang menyajikan rincian kegiatan prioritas Sekretariat BPTJ tahun 2019 beserta jumlah pagu anggarannya:

Tabel 4.2 Rincian Kegiatan Prioritas Sekretariat BPTJ TA 2019

No.	KEGIATAN	PAGU ALOKASI (Rp.)
1	Koordinasi Kelembagaan	3.536.268.000
2	Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	1.542.149.000
3	Penyelenggaraan Kegiatan Penyusunan Materi Publikasi (Non Pemberitaan)	2.169.766.000
4	Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan Media Sosial dan Jejaring Komunikasi	1.734.536.000
5	Kegiatan Operasional Perkantoran Pengelolaan Terminal Tipe A di Jabodetabek	11.354.781.000

Pada tahun 2019, dengan jumlah pagu alokasi BPTJ sebesar Rp. 67.782.100.000,-, Sekretariat memiliki 5 kegiatan prioritas, diantaranya Rapat Koordinasi Kelembagaan, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Kegiatan Penyusunan Materi Publikasi (Non Pemberitaan), Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan Media Sosial dan Jejaring Komunikasi serta Kegiatan Operasional Perkantoran Pengelolaan Terminal Tipe A di Jabodetabek. Kelimat kegiatan ini ditujukan untuk mendukung kegiatan teknis dan non teknis di BPTJ pada tahun 2019.

4.3.2 INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS DIREKTORAT PRASARANA TAHUN 2019

Kegiatan prioritas Direktorat Prasarana dijelaskan dalam **Tabel 4.3** dibawah ini, meliputi :

Tabel 4.3 Kegiatan Prioritas Direktorat Prasarana TA 2019

No.	KEGIATAN	PAGU ALOKASI (Rp.)
1	Lanjutan Pembangunan Terminal Tipe A Jatijajar	11.400.000.000
2	Supervisi Lanjutan Pembangunan Terminal Tipe A Jatijajar	855.000.000
3	Reviu DED Lanjutan Pembangunan Terminal Jatijajar Untuk Pembangunan TOD	1.835.000.000
4	FS dan Basic Desain Pembangunan Jalur Ganda Lintas Citayam-Parung Panjang di Kabupaten Bogor	3.700.000.000

No.	KEGIATAN	PAGU ALOKASI (Rp.)
5	FS dan DED Gardu Traksi Sisipan Jatinegara-Tj. Priuk dan Lintas Bekasi – Cikarang	2.000.000.000
6	Review DED Perlintasan tidak Sebidang pada Lintas Jatinegara - Cikarang di Kabupaten Bekasi	2.800.000.000
7	Review DED Perlintasan tidak Sebidang pada Lintas Bogor - Manggarai di Kota / Kabupaten Bogor	2.800.000.000
8	DED Peningkatan Persinyalan Pada Lintas Tn.abang-Rangkas Bitung	2.750.000.000
9	In House Consultant Prasarana	2.100.000.000
10	Pembangunan ATCS Koridor DKI – Tangerang	14.500.000.000
11	Supervisi Pembangunan ATCS Koridor DKI – Tangerang	260.000.000

4.3.3 INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS DIREKTORAT LALU LINTAS TAHUN 2019

Kegiatan prioritas Direktorat Lalu Lintas pada tahun 2019, antara lain:

Tabel 4.4 Kegiatan Prioritas Direktorat Lalu Lintas TA 2019

NO	KEGIATAN	PAGU ALOKASI (Rp.)
1	Pengoperasian dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.629.309.000
2	Monitoring Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas	622.651.000
3	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Nasional Jabodetabek	19.174.753.000
4	Perencanaan Teknis Penerapan Emision Zone di Jabodetabek	878.768.000
5	Monitoring dan Evaluasi Dampak Kebijakan di sektor Transportasi tahun 2017-2018 di Wilayah Jabodetabek	1.268.260.000
6	Studi Trase LRT Cibubur - Baranangsiang - Kota Bogor	2.000.000.000

NO	KEGIATAN	PAGU ALOKASI (Rp.)
7	Pengoperasian ATCS BPTJ dan Monitoring Infrastruktur pada Titik Simpang	985.000.000
8	Pemeliharaan ATCS BPTJ	200.000.000
9	Perencanaan Teknis Pengembangan Matrik Asal Tujuan Jabodetabek 2019	1.102.255.000

4.3.3 INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS DIREKTORAT ANGKUTAN TAHUN 2019

Indikasi kegiatan prioritas Direktorat Angkutan terdiri dari beberapa kegiatan, antara lain :

Tabel 4.5 Kegiatan Prioritas Direktorat Angkutan TA 2019

No.	KEGIATAN	PAGU ALOKASI (Rp.)
1.	Evaluasi Kinerja Lalu lintas dan Pelayanan Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek Tahun 2019	1.244.371.000
2.	Rencana Induk Terminal Barang Jabodetabek	945.835.000
3.	Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	2.500.000.000

4.4 DEVIASI ANGGARAN DENGAN KEBUTUHAN BPTJ TAHUN 2019

Kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan tugas dan fungsi BPTJ untuk mengurai berbagai macam masalah transportasi di Jabodetabek memerlukan pendanaan yang tidak sedikit. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi kedepannya diharapkan mampu memperbaiki konektivitas antar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, agar tercipta transportasi umum yang terintegrasi serta mampu bersinergi untuk pemerataan pembangunan serta mendorong sektor ekonomi yang lebih pesat di wilayah Jabodetabek.

Namun, sebagai entitas yang baru, terdapat hal yang menjadi tantangan pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan tugas dan fungsi BPTJ di Jabodetabek. Diantaranya adalah besarnya gap kebutuhan pendanaan BPTJ dengan alokasi anggaran yang ditetapkan untuk memenuhi kegiatan BPTJ.

Berdasarkan data anggaran belanja infrastruktur transportasi secara garis besar, gap/deviasi anggaran antara alokasi anggaran dengan kebutuhan dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 justru semakin besar, dimana pada TA.2015 terdapat gap / deviasi pembiayaan sebesar 30,82%, TA.2016 gap/deviasi anggaran bertambah besar menjadi 52,56%, dan TA.2017 gap/deviasi anggaran bertambah menjadi 55,86%, serta TA.2018 gap/deviasi anggaran semakin besar 62,11%.

Saat ini, BPTJ masih diharapkan untuk tetap mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tidak hanya mengandalkan alokasi anggaran yang ditetapkan, namun juga mampu mencari sumber pendanaan lain selain APBN.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan deviasi anggaran BPTJ pada tahun 2019

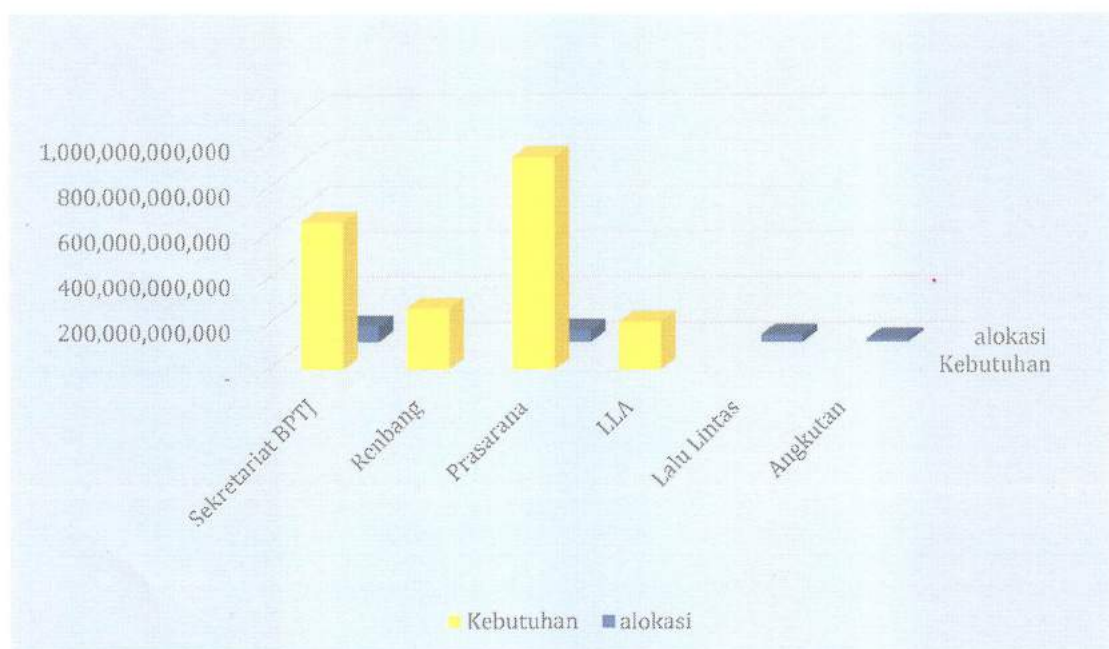
Tabel 4.6 Deviasi Anggaran BPTJ Tahun 2019

PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU KEBUTUHAN (Rp.)	PAGU ALOKASI (Rp.)	DEVIASI	KETERANGAN
Program Pengelolaan Transportasi Jabodetabek	2.061.274.269.000	162.690.564.000	92,11%	
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di BPTJ (Sekretariat BPTJ)	647.784.281.000	67.782.100.000	89,53 %	
Perencanaan dan Pengembangan Transportasi Jabodetabek (Direktorat Perencanaan dan Pengembangan)	268.949.615.000	-	-	Nilai Deviasi tidak dapat dihitung karena Kegiatan ini (Direktorat) hilang sesuai PM 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi

PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU KEBUTUHAN (Rp.)	PAGU ALOKASI (Rp.)	DEVIASI	KETERANGAN
Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Transportasi Jabodetabek (Direktorat Prasarana)	934.688.953.000	51.424.015.000	94,50%	
Peningkatan, Penyediaan serta Pengembangan Lalu Lintas dan Pelayanan Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek (Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan)	209.851.421.000	-	-	Nilai Deviasi tidak dapat dihitung karena Kegiatan ini (Direktorat) tepecah menjadi 2 kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan, Penyediaan serta Pengembangan Lalu Lintas di Wilayah Jabodetabek (Direktorat Lalu Lintas) dan kegiatan Peningkatan, Penyediaan Pelayanan Angkutan Orang, Angkutan Barang serta Pengawasan Angkutan di Wilayah Jabodetabek (Direktorat Angkutan) sesuai PM 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi
Peningkatan, Penyediaan serta Pengembangan Lalu Lintas di Wilayah Jabodetabek	-	30.428.026.000	-	Nilai Deviasi tidak bisa dihitung karena merupakan Kegiatan Baru (Direktorat Baru) sesuai PM 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata

PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU KEBUTUHAN (Rp.)	PAGU ALOKASI (Rp.)	DEVIASI	KETERANGAN
(Direktorat Lalu Lintas)				Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi
Peningkatan, Penyediaan Pelayanan Angkutan Orang, Angkutan Barang serta Pengawasan Angkutan di Wilayah Jabodetabek (Direktorat Angkutan)	-	13.056.423.000	-	Nilai Deviasi tidak bisa dihitung karena merupakan Kegiatan Baru (Direktorat Baru) sesuai PM 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi

Deviasi anggaran BPTJ Tahun 2019, digambarkan ke dalam grafik sebagai berikut:



Gambar 4.1 Deviasi Anggaran BPTJ Tahun 2019



BAB V

PENUTUP

Dalam Rencana Kerja BPTJ Tahun 2019 masih terdapat tantangan berupa belum optimalnya jumlah sumber daya manusia yang berkualitas dan mumpuni dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPTJ hingga saat ini. Selain itu, kurang nya ruang kerja yang cukup juga menjadi tantangan tersendiri seiring dengan kebutuhan pegawai yang masih jauh dari status ideal. Hal ini terjadi sebagai akibat adanya keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah khususnya melalui sumber pembiayaan APBN (Rp. Murni) dalam menyediakan sarana dan prasarana tersebut. Oleh karena itu ke depan diarahkan untuk mencari potensi pembiayaan lainnya melalui sumber pembiayaan Non APBN.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja BPTJ Tahun 2019 ini tergantung pada komitmen, sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin dari para penyelenggara pemerintahan di sektor transportasi dan dukungan dari para penyelenggara negara lainnya serta masyarakat secara umum untuk meningkatkan pelayanan transportasi bagi masyarakat di wilayah Jabodetabek.

Dalam kaitan itu, seluruh penyelenggara pemerintahan, masyarakat dan seluruh stakeholder di bidang perhubungan harus secara bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2019 sehingga mampu memberikan hasil pembangunan sektor transportasi yang optimal dan dapat dinikmati secara adil dan merata di seluruh wilayah Jabodetabek.

KATA PENGANTAR

Sebagai upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, maka disusunlah dokumen Revisi Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2019. Revisi Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan Tahun 2019 disusun dengan memperhatikan dokumen Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2016-2019 dan dokumen Revisi DIPA Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2019 sehubungan dengan Reorganisasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek berdasarkan PM 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Dokumen Revisi Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2019 ini merupakan dokumen pernyataan kesepakatan kinerja antara Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dan Menteri Perhubungan untuk mewujudkan target kinerja di Tahun 2019. Dokumen ini memuat sasaran strategis, program/kegiatan utama beserta target kinerja dan anggaran.

Diharapkan Revisi Perjanjian Kinerja ini dapat menjadi pedoman untuk pelaksanaan kegiatan program tahun 2019 di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

Jakarta, 2019

KEPALA
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK



Ir. BAMBANG PRIHARTONO, MSCE

Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19600825 198811 1 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. BAMBANG PRIHARTONO, MSCE

Jabatan : Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : BUDI KARYA SUMADI

Jabatan : Menteri Perhubungan

Selaku atasan langsung Pihak pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2019

Pihak Kedua,

Menteri Perhubungan

Budi Karya Sumadi

Pihak Pertama

**Kepala
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek**


Ir. Bambang Prihartono, MSCE

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK
TAHUN 2019

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(SP) SASARAN PROGRAM BPTJ	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SS1 Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas nasional dan peningkatan angkutan.	SP4 Meningkatnya cakupan pelayanan angkutan umum di kawasan perkotaan Jabodetabek	IKP4 Rasio panjang jalan nasional yang terlayani oleh jaringan angkutan umum perkotaan		%	70
		IKK1	Terlaksananya monitoring dan evaluasi SPM Simpul dan Fasilitas Pendukung Transportasi Darat di wilayah	Dokumen	1
		IKK2	Terlaksananya peningkatan pengetahuan teknis tentang Transportasi Darat	Dokumen	1
		IKK3	Tersusunnya dokumen perencanaan Terminal Tipe A di Wilayah Jabodetabek	Dokumen	3
		IKK4	Terlaksananya pembangunan /perawatan/pengembangan prasarana transportasi darat dan fasilitas pendukung di wilayah Jabodetabek	Dokumen	1
		IKK5	Tersusunnya dokumen evaluasi atas pembangunan dan pengembangan Transportasi Jalan di wilayah Jabodetabek	Dokumen	1

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(SP) SASARAN PROGRAM BPTJ	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
		IKK9	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan prasarana dan fasilitas pendukung perkeretaapian di jabodetabek	Dokumen	7
		IKK10	Tersusunnya dokumen NSPK perkeretaapian di Wilayah Jabodetabek	Dokumen	1
		IKK11	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelayanan prasarana perkeretaapian di Jabodetabek	Dokumen	1
		IKK43	Tersedianya dokumen perizinan angkutan umum jalan dan perairan di wilayah Jabodetabek	Dokumen	4
		IKK44	Terlaksananya pembinaan perusahaan angkutan umum jalan, perairan dan perkeretaapian di wilayah Jabodetabek	Dokumen	1
		IKK46	Tersusunnya dokumen monitoring dan evaluasi pengembangan jaringan trayek transportasi jalan dan perairan di Jabodetabek	Dokumen	1
		IKK47	Tersusunnya dokumen Perencanaan pengembangan jaringan trayek transportasi jalan dan perairan di Jabodetabek	Dokumen	1
		IKK49	Tersusunnya dokumen monitoring dan evaluasi pengembangan angkutan umum transportasi perkeretaapian di	Dokumen	1

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(SP) SASARAN PROGRAM BPTJ	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
			Jabodetabek		
		IKK54	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengembangan jaringan lintas angkutan barang jalan, perairan dan perkeretaapian di Jabodetabek	Dokumen	1
		IKK55	Tersusunnya Dokumen Perencanaan jaringan lintas angkutan barang jalan, perairan dan perkeretaapian di Jabodetabek	Dokumen	1
SS2 Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi	SP2 Menurunnya angka kecelakaan yang melibatkan angkutan umum di wilayah Jabodetabek	IKP2 Persentase penurunan jumlah kecelakaan dengan menggunakan angkutan umum di wilayah Jabodetabek		%	10,8
		IKK33	Terselenggaranya Pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan Nasional di wilayah Jabodetabek	Laporan	8
			- Rambu	%	62,50
			- Penerangan Jalan	%	62,74
			- RPPJ	%	65,71
			- Marka	%	60,52
			- Warning Light	%	61,40
			- Cermin Tikung	%	0,00
			- Paku Jalan	%	0,00

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(SP) SASARAN PROGRAM BPTJ	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
		IKK34	Terselenggaranya pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan Nasional di wilayah Jabodetabek	Laporan	1
		IKK63	Pelaksanaan pengawasan SPM operasional terminal, stasiun, dan pelabuhan angkutan perairan	Dokumen	1
		IKK64	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan angkutan	Dokumen	1
		IKK65	Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan angkutan di wilayah Jabodetabek	Dokumen	1
		IKK66	Tersedianya Sistem Informasi Manajemen (SIM) pengawasan angkutan di wilayah Jabodetabek	Dokumen	1
		IKK67	Pembinaan keselamatan sarana angkutan orang dan barang di wilayah Jabodetabek	Dokumen	1
SS3 Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	SP3 Meningkatnya kecepatan rata-rata kendaraan umum pada jam puncak di wilayah Jabodetabek	IKP3 Kecepatan rata-rata kendaraan umum pada jam puncak di wilayah Jabodetabek		Km/Jam	17
		IKK29	Tersusunnya Perencanaan; fasilitas perlengkapan jalan Nasional di wilayah	Laporan	1

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(SP) SASARAN PROGRAM BPTJ	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
			Jabodetabek		
		IKK30	Terlaksana nya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Ruas dan Simpang Jalan Nasional di wilayah Jabodetabek	Laporan	1
		IKK36	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pengembangan Jaringan Kereta Api Perkotaan di Jabodetabek	Dokumen	1
		IKK37	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Sistem Operasi dan Lintas Pelayanan KA Perkotaan di Wilayah Jabodetabek	Laporan	2
		IKK31	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Lalu Lintas di Jalan Nasional Wilayah Jabodetabek	Laporan	1
		IKK32	Terlaksana nya pembinaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di wilayah Jabodetabek	Laporan	1
		IKK27	Tersedianya penilaian dan pemberian rekomendasi analisis dampak lalu lintas di Jalan Nasional Wilayah Jabodetabek	Lokasi	18

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(SP) SASARAN PROGRAM BPTJ	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
		IKK28	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi analisis dampak lalu lintas di Jabodetabek	Laporan	2
		IKK41	Terselenggaranya Intelligent Transport System (ITS) di wilayah Jabodetabek	Laporan	2
		IKK42	Terciptanya Pengembangan teknologi bidang lalu lintas di wilayah Jabodetabek	Laporan	3
SS4 Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi	SP1 Meningkatnya peran moda angkutan umum perkotaan di Wilayah Jabodetabek	IKP1 <i>Modal share</i> (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek		%	32
		IKK19	Tersusunnya dokumen perencanaan Kawasan Berbasis Angkutan Massal di wilayah Jabodetabek	Dokumen	4
		IKK23	Terlaksananya bimbingan dan bantuan teknis tentang fasilitas integrasi simpul di wilayah Jabodetabek	Dokumen	2
		IKK24	Tersusunnya dokumen perencanaan Integrasi Simpul Transportasi di wilayah Jabodetabek	Dokumen	1
		IKK62	Tersusunnya Dokumen Perencanaan sumber, pemanfaatan dan pengelolaan pendanaan angkutan wilayah Jabodetabek	Dokumen	9

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)
NO	PROGRAM PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK	168.993.920.000
1	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	74.085.456.000
2	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Transportasi Jabodetabek	51.424.015.000
3	Peningkatan, Penyediaan serta Pengembangan Lalu Lintas di Wilayah Jabodetabek	29.914.419.000
4	Peningkatan, Penyediaan Pelayanan Angkutan Orang, Angkutan barang serta Pengawasan Angkutan di Wilayah Jabodetabek	13.570.030.000

Jakarta, 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Menteri Perhubungan

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek



Budi Karya Sumadi

Ir. Bambang Prihartono, MSCE

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)
NO	PROGRAM PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK	168.993.920.000
1	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	74.085.456.000
2	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Transportasi Jabodetabek	51.424.015.000
3	Peningkatan, Penyediaan serta Pengembangan Lalu Lintas di Wilayah Jabodetabek	29.914.419.000
4	Peningkatan, Penyediaan Pelayanan Angkutan Orang, Angkutan barang serta Pengawasan Angkutan di Wilayah Jabodetabek	13.570.030.000

Jakarta,

2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Menteri Perhubungan

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek



Budi Karya Sumadi

Ir. Bambang Prihartono, MSCE

KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANGGAL	PARAF
Dikonsep	Joko Santoso	Kabag Perencanaan dan Evaluasi	10/9-19	
Diperiksa	Hindro Surahmat	Sekretaris Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	10/9/19	
Diperiksa	Edi Nur Salam	Direktur Prasarana	10/9-19	
Diperiksa	Karlo Manik	Direktur Lalu Lintas	12/9-19	
Diperiksa	Aca Mulyana	Direktur Angkutan	12/9/19	

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(SP) SASARAN PROGRAM BPT	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPT/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB
						T1	T2	T3	T4		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
SS1	Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas nasional dan peningkatan angkutan.	Meningkatnya cakupan pelayanan angkutan umum di kawasan perkotaan Jabodetabek	BKP4	Rasio panjang jalan nasional yang terlayani oleh jaringan angkutan umum perkotaan	%	70					
			BKK1	Terlaksananya monitoring dan evaluasi SPM Simpul dan Fasilitas Pendukung Transportasi Darat di wilayah Jabodetabek	Dokumen	1				150,000,000	Seksi Tata Kelola Prasarana Transportasi Darat
			BKK2	Terlaksananya peningkatan pengetahuan teknis tentang Transportasi Darat	Dokumen	1				200,000,000	Seksi Tata Kelola Prasarana Transportasi Darat
			BKK3	Tersusunnya dokumen perencanaan Terminal Tipe A di Wilayah Jabodetabek	Dokumen	3				855,000,000	Seksi Rancang Bangun Prasarana Transportasi Darat
										1,835,000,000	Seksi Rancang Bangun Prasarana Transportasi Darat
										635,426,000	Seksi Tata Kelola Prasarana Transportasi Darat
			BKK4	Terlaksananya pembangunan /perawatan/pengembangan prasarana transportasi darat dan fasilitas pendukung di wilayah Jabodetabek	Dokumen	1				11,685,000,000	Seksi Rancang Bangun Prasarana Transportasi Darat
			BKK5	Tersusunnya dokumen evaluasi atas pembangunan dan pengembangan Transportasi Jalan di wilayah Jabodetabek	Dokumen	1				199,972,000	Seksi Tata Kelola Prasarana Transportasi Darat
			BKK9	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan prasarana dan fasilitas pendukung perkeretaapian di Jabodetabek	Dokumen	7				6,000,000,000	Seksi Rancang Bangun Prasarana Transportasi Perkeretaapian
										2,000,000,000	Seksi Rancang Bangun Prasarana Transportasi Perkeretaapian
										500,000,000	Seksi Rancang Bangun Prasarana Transportasi Perkeretaapian
										500,000,000	Seksi Rancang Bangun Prasarana Transportasi Perkeretaapian
										3,100,000,000	Seksi Rancang Bangun Prasarana Transportasi Perkeretaapian
										1,750,000,000	Seksi Rancang Bangun Prasarana Transportasi Perkeretaapian
										460,000,000	Seksi Rancang Bangun Prasarana Transportasi Perkeretaapian
										855,000,000	Seksi Tata Kelola Prasarana Transportasi Perkeretaapian
			BKK10	Tersusunnya dokumen RSPK perkeretaapian di Wilayah Jabodetabek	Dokumen	1					
			BKK11	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelayanan prasarana perkeretaapian di Jabodetabek	Dokumen	1				200,000,000	Seksi Tata Kelola Prasarana Transportasi Perkeretaapian

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN		(SP) SASARAN PROGRAM BPTJ		(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	T1	T2	T3	T4	(11)	(12)
								(7)	(8)	(9)	(10)		
				BK66	Tersedianya Sistem Informasi Manajemen (SIM) pengawasan angkutan di wilayah Jabodetabek	Dokumen	1	Pengadaan Siller Angkutan Umum				200,000,000	Seksi Angkutan Orang Transportasi Jalan dan Perairan
				BK67	Pembinaan keselamatan sarana angkutan orang dan barang di wilayah Jabodetabek	Dokumen	1	Pengembangan 20 Trayek Utama Prioritas Jabodetabek				300,000,000	Seksi Angkutan Orang Transportasi Jalan dan Perairan
SS3	Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	SP3	Meningkatnya kecepatan rata-rata kendaraan umum pada jam puncak di wilayah Jabodetabek	BK68	Kecepatan rata-rata kendaraan umum pada jam puncak di wilayah Jabodetabek	Km/jam	17						
				BK36	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pengembangan Jaringan Kereta Api Perkotaan di Jabodetabek	Dokumen	1	Studi Trans LRT Obubar - Baranangsiang - Kota Bogor				2,000,000,000	Seksi Jaringan Perkeretaapian
				BK37	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Sistem Operasi dan Lintas Pelayanan KA Perkotaan di Wilayah Jabodetabek	Laporan	2	Pelatihan Sistem Operasi MRT				800,000,000	Seksi Lalu Lintas Kereta Api Perkotaan
								Monitoring dan Evaluasi Kinerja Jaringan dan Lalu Lintas Kereta Api Perkotaan di Wilayah Jabodetabek				250,000,000	Seksi Jaringan Perkeretaapian
				BK29	Tersusunnya Perencanaan, fasilitas perlengkapan jalan Nasional di wilayah Jabodetabek	Laporan	1	Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Perlengkapan Jalan Nasional di Wilayah Jabodetabek				350,000,000	Seksi Manajemen dan Relayasa Lalu Lintas
				BK30	Terlaksananya Manajemen dan Relayasa Lalu Lintas Ruas dan Simpang Jalan Nasional di wilayah Jabodetabek	Laporan	1	Peningkatan Kinerja Lalu Lintas Ruas dan Simpang di Jabodetabek				400,040,000	Seksi Manajemen dan Relayasa Lalu Lintas
				BK31	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Lalu Lintas di Jalan Nasional Wilayah Jabodetabek	Laporan	1	Monitoring dan Evaluasi Dampak Kebjaksanaan di sektor Transportasi tahun 2017-2018 di Wilayah Jabodetabek				754,653,000	Seksi Manajemen dan Relayasa Lalu Lintas
				BK32	Terlaksananya pembinaan Manajemen dan Relayasa Lalu Lintas di wilayah Jabodetabek	Laporan	1	Perencanaan Teknis Penerapan Emission Zone di Jabodetabek				878,768,000	Seksi Manajemen dan Relayasa Lalu Lintas
				BK27	Tersedianya penilaian dan pemberian rekomendasi analisis dampak lalu lintas di Jalan Nasional Wilayah Jabodetabek	Lokasi	18	Evaluasi Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Jabodetabek				390,350,000	Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas
				BK28	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi analisis dampak lalu lintas di Jabodetabek	Laporan	2	Monitoring Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas				622,651,000	Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas
								Pembangunan Sistem Perishon Online BPTJ				194,700,000	Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas
				BK41	Terselektornya Intelligent Transport System (ITS) di wilayah Jabodetabek	Laporan	2	Pengoperasian ATCS BPTJ dan Monitoring Infrastruktur pada Titik Simpang				985,000,000	Seksi Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi
								Pemeliharaan ATCS BPTJ				200,000,000	Seksi Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi
				BK42	Terciptanya Pengembangan teknologi bidang lalu lintas di wilayah Jabodetabek	Laporan	3	Perencanaan Teknis Pengembangan Matrik Asal Tujuan Jabodetabek 2019				1,102,255,000	Seksi Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi
								Pembangunan e-SPT dengan SMS gateway				151,800,000	Seksi Pengolahan Data dan Informasi
								Pengadaan Perangkat SMS Gateway				30,140,000	Seksi Pengolahan Data dan Informasi

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN		(SP) SASARAN PROGRAM BPTJ		(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	KEGIATAN		RENCANA PELAKSANAAN				ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB
(1)		(2)		(3)		(4)	(5)	(6)		T1	T2	T3	T4	(11)	(12)
SS4	Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi	SP1	Meningkatnya peran moda angkutan umum perkotaan di Wilayah Jabodetabek	IKP1	Modal share (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek	%	32								
				IKK19	Tersusunnya dokumen perencanaan Kawasan Berbasis Angkutan Massal di wilayah Jabodetabek	Dokumen	4	Penyusunan Pedoman Penilaian Pemenuhan SPM Fasilitas Integrasi pada Simpul Transportasi dan TOD di Jabodetabek						855,000,000	Seksi Integrasi Kawasan Berbasis Angkutan Massal
								Optimalisasi Implementasi Rencana Induk Transportasi Jabodetabek						2,100,000,000	Seksi Integrasi Kawasan Berbasis Angkutan Massal
								Pendampingan PPP Public Private Partnership, KPBU Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha						534,593,000	Seksi Integrasi Kawasan Berbasis Angkutan Massal
								Pembangunan dan Supervisi Pembangunan ATCS Koridor DKI - Tangerang						14,760,000,000	Seksi Integrasi Simpul Transportasi
				IKK23	Terlaksananya bimbingan dan bantuan teknis tentang fasilitas integrasi simpul di wilayah Jabodetabek	Dokumen	2	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Integrasi Moda & Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit/ Transit Oriented Development (TOD)						424,874,000	Seksi Integrasi Kawasan Berbasis Angkutan Massal
								Bimtek Integrasi Prasarana Transportasi Jalan dan Perkeretaapian						200,000,000	Seksi Integrasi Simpul Transportasi
				IKK24	Tersusunnya dokumen perencanaan Integrasi Simpul Transportasi di wilayah Jabodetabek	Dokumen	1	Penataan Integrasi di Titik Simpul SAUM (Sistem Angkutan Umum Massal) di Jabodetabek						824,150,000	Seksi Integrasi Simpul Transportasi
				IKK62	Tersusunnya Dokumen Perencanaan sumber, pemanfaatan dan pengelolaan pendanaan angkutan wilayah Jabodetabek	Dokumen	9	Rencana Teknis Pengembangan Dana ERP						898,755,000	Seksi Pendanaan
								Kajian DAK Dana Alokasi Khusus untuk Angkutan Umum dan Peningkatan Keselamatan Jabodetabek						938,707,000	Seksi Pendanaan
								Pengawasan dan Monitoring Pelaksanaan Perizinan Angkutan Umum di 9 (sembilan) Wilayah Jabodetabek						690,000,000	Seksi Pengawasan Angkutan
								Koordinasi Teknis Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Se Jabodetabek						253,000,000	Seksi Pengawasan Angkutan
								Pengawasan dan Monitoring Kelaikan Sarana Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek						680,000,000	Seksi Pengawasan Angkutan
								Pengawasan dan Monitoring Kinerja Operasional Terminal Tipe A di Wilayah Jabodetabek						770,000,000	Seksi Pengawasan Angkutan
								Pengadaan Peralatan Pemanjang Pengawasan Angkutan Jabodetabek						100,000,000	Seksi Pengawasan Angkutan
								Pemeliharaan Aplikasi Pengawasan Angkutan Jalan di Terminal Tipe A Jabodetabek						100,000,000	Seksi Pengawasan Angkutan
								Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru						2,710,000,000	Seksi Pengawasan Angkutan

KEPALA
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK

Dr. BAMBANG PRIHARTONO, MSCE
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19600825 198811 1 001

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN		(SP) SASARAN PROGRAM BPTJ		(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	KEGIATAN		RENCANA PELAKSANAAN				ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB
(1)		(2)		(3)		(4)	(5)	(6)		T1	T2	T3	T4	(11)	(12)
SS4	Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi	SP1	Meningkatnya peran moda angkutan umum perkotaan di Wilayah Jabodetabek	IKP1	Modal share (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek	%	32								
				IKK19	Tersusunnya dokumen perencanaan Kawasan Berbasis Angkutan Massal di wilayah Jabodetabek	Dokumen	4		Penyusunan Pedoman Penilaian Penemuan SPM Fasilitas Integrasi pada Simpul Transportasi dan TOD di Jabodetabek					855,000,000	Seksi Integrasi Kawasan Berbasis Angkutan Massal
									Optimalisasi Implementasi Rencana Induk Transportasi Jabodetabek					2,100,000,000	Seksi Integrasi Kawasan Berbasis Angkutan Massal
									Pendampingan PPP Public Private Partnership, KPBU Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha					534,593,000	Seksi Integrasi Kawasan Berbasis Angkutan Massal
									Pembangunan dan Supervisi Pembangunan ATCS Koridor DKI - Tangerang					14,760,000,000	Seksi Integrasi Simpul Transportasi
				IKK23	Terlaksananya bimbingan dan bantuan teknis tentang fasilitas integrasi simpul di wilayah Jabodetabek	Dokumen	2		Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Integrasi Moda & Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit/ Transit Oriented Development (TOD)					424,874,000	Seksi Integrasi Kawasan Berbasis Angkutan Massal
									Bimtek Integrasi Prasarana Transportasi Jalan dan Perkeretaapian					200,000,000	Seksi Integrasi Simpul Transportasi
				IKK24	Tersusunnya dokumen perencanaan Integrasi Simpul Transportasi di wilayah Jabodetabek	Dokumen	1		Penataan Integrasi di Titik Simpul SAUM (Sistem Angkutan Umum Massal) di Jabodetabek					824,150,000	Seksi Integrasi Simpul Transportasi
				IKK62	Tersusunnya Dokumen Perencanaan sumber, pemanfaatan dan pengelolaan pendanaan angkutan wilayah Jabodetabek	Dokumen	9		Rencana Teknis Pengembangan Dana ERP					898,755,000	Seksi Pendanaan
									Kajian DAK Dana Alokasi Khusus untuk Angkutan Umum dan Peningkatan Keselamatan Jabodetabek					938,707,000	Seksi Pendanaan
									Pengawasan dan Monitoring Pelaksanaan Perizinan Angkutan Umum di 9 (Sembilan) Wilayah Jabodetabek					690,000,000	Seksi Pengawasan Angkutan
									Koordinasi Teknis Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Se Jabodetabek					253,000,000	Seksi Pengawasan Angkutan
									Pengawasan dan Monitoring Kelainan Sarana Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek					680,000,000	Seksi Pengawasan Angkutan
									Pengawasan dan Monitoring Kinerja Operasional Terminal Tipe A di Wilayah Jabodetabek					770,000,000	Seksi Pengawasan Angkutan
									Pengadaan Peralatan Penunjang Pengawasan Angkutan Jabodetabek					100,000,000	Seksi Pengawasan Angkutan
									Pemeliharaan Aplikasi Pengawasan Angkutan Jalan di Terminal Tipe A Jabodetabek					100,000,000	Seksi Pengawasan Angkutan
									Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru					2,710,000,000	Seksi Pengawasan Angkutan

KEPALA
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK



Ir. BAMBANG PRIHARTONO, MSCE
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19600825 198811 1 001

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN		(SP) SASARAN PROGRAM BPTJ		(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ / (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	KEGIATAN		RENCANA PELAKSANAAN				ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB
(1)		(2)		(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
SS4	Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi	SP1	Meningkatnya peran moda angkutan umum perkotaan di Wilayah Jabodetabek	IKP1	Modal share (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek	%	32								
				IKK19	Tersusunnya dokumen perencanaan Kawasan Berbasis Angkutan Massal di wilayah Jabodetabek	Dokumen	4	Penyusunan Pedoman Pemilahan Pemenuhan SPM Fasilitas Integrasi pada Simpul Transportasi dan TOD di Jabodetabek						855,000,000	Seksi Integrasi Kawasan Berbasis Angkutan Massal
								Optimalisasi Implementasi Rencana Induk Transportasi Jabodetabek						2,100,000,000	Seksi Integrasi Kawasan Berbasis Angkutan Massal
								Pendampingan PPP Public Private Partnership, KPBU Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha						534,593,000	Seksi Integrasi Kawasan Berbasis Angkutan Massal
								Pembangunan dan Supervisi Pembangunan ATCS Koridor DKI - Tangerang						14,760,000,000	Seksi Integrasi Simpul Transportasi
				IKK23	Terlaksananya bimbingan dan bantuan teknis tentang fasilitas integrasi simpul di wilayah Jabodetabek	Dokumen	2	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Integrasi Moda & Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit/ Transit Oriented Development (TOD)						424,874,000	Seksi Integrasi Kawasan Berbasis Angkutan Massal
								Bintek Integrasi Prasarana Transportasi jalan dan Perkeretaapian						200,000,000	Seksi Integrasi Simpul Transportasi
				IKK24	Tersusunnya dokumen perencanaan Integrasi Simpul Transportasi di wilayah Jabodetabek	Dokumen	1	Penataan Integrasi di Titik Simpul SAUM (Sistem Angkutan Umum Massal) di Jabodetabek						824,150,000	Seksi Integrasi Simpul Transportasi
				IKK62	Tersusunnya Dokumen Perencanaan sumber, pemanfaatan dan pengelolaan pendanaan angkutan wilayah Jabodetabek	Dokumen	9	Rencana Teknis Pengembangan Dana ERP						898,755,000	Seksi Pendanaan
								Kajian DAK Dana Alokasi Khusus untuk Angkutan Umum dan Peningkatan Keselamatan Jabodetabek						938,707,000	Seksi Pendanaan
								Pengawasan dan Monitoring Pelaksanaan Perizinan Angkutan Umum di 9 (sembilan) Wilayah Jabodetabek						690,000,000	Seksi Pengawasan Angkutan
								Koordinasi Teknis Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Se Jabodetabek						253,000,000	Seksi Pengawasan Angkutan
								Pengawasan dan Monitoring Kelainan Sarana Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek						680,000,000	Seksi Pengawasan Angkutan
								Pengawasan dan Monitoring Kinerja Operasional Terminal Tipe A di Wilayah Jabodetabek						770,000,000	Seksi Pengawasan Angkutan
								Pengadaan Peralatan Penunjang Pengawasan Angkutan Jabodetabek						100,000,000	Seksi Pengawasan Angkutan
								Pemeliharaan Aplikasi Pengawasan Angkutan Jalan di Terminal Tipe A Jabodetabek						100,000,000	Seksi Pengawasan Angkutan
								Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru						2,710,000,000	Seksi Pengawasan Angkutan

KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANGGAL	PARAF
Dikonep	Joko Santoso	Kabag Perencanaan dan Evaluasi	9-9-19	
Diperiksa	Hindro Surahmat	Sekretaris Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	12-9-19	
Diperiksa	Edi Nur Salam	Direktur Prasarana	10-9-19	
Diperiksa	Karlo Manik	Direktur Lalu Lintas	12-9-19	
Diperiksa	Aca Mulyana	Direktur Angkutan	12-9-19	

KEPALA
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK


Ir. BAMBANG PRIHARTONO, MSCE
Pemhina Utama (IV/e)
NIP. 19600825 198811 1 001

KATA PENGANTAR

Sebagai upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, maka disusunlah dokumen Revisi Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2019. Revisi Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan Tahun 2019 disusun dengan memperhatikan dokumen Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2016-2019 dan dokumen Revisi DIPA Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2019 sehubungan dengan Reorganisasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek berdasarkan PM 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Dokumen Revisi Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2019 ini merupakan dokumen pernyataan kesepakatan kinerja antara Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dan Menteri Perhubungan untuk mewujudkan target kinerja di Tahun 2019. Dokumen ini memuat sasaran strategis, program/kegiatan utama beserta target kinerja dan anggaran.

Diharapkan Revisi Perjanjian Kinerja ini dapat menjadi pedoman untuk pelaksanaan kegiatan program tahun 2019 di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

Jakarta, 2019

KEPALA
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK



Ir. BAMBANG PRIHARTONO, MSCE

Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19600825 198811 1 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. BAMBANG PRIHARTONO, MSCE

Jabatan : Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : BUDI KARYA SUMADI

Jabatan : Menteri Perhubungan

Selaku atasan langsung Pihak pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2019

Pihak Kedua,

Menteri Perhubungan


Budi Karya Sumadi

Pihak Pertama

**Kepala
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek**


Ir. Bambang Prihartono, MSCE

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK
TAHUN 2019**

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(SP) SASARAN PROGRAM BPTJ	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SS1 Mewujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas nasional dan peningkatan angkutan.	SP5 Meningkatnya cakupan pelayanan angkutan umum di kawasan perkotaan Jabodetabek	IKP5 Rasio panjang jalan nasional yang terlayani oleh jaringan angkutan umum perkotaan		%	70
		IKK1	Terlaksananya monitoring dan evaluasi SPM simpul dan Fasilitas Pendukung transportasi darat di Jabodetabek	Dokumen	1
		IKK2	Terlaksananya peningkatan pengetahuan teknis tentang Transportasi Darat	Dokumen	1
		IKK3	Tersusunnya dokumen perencanaan Terminal Tipe A di wilayah Jabodetabek	Dokumen	4
		IKK4	Terlaksananya pembangunan/ perawatan/pengembangan prasarana transportasi darat dan fasilitas pendukung di wilayah Jabodetabek	Dokumen	1
		IKK5	Tersusunnya dokumen evaluasi atas pembangunan dan pengembangan Transportasi Jalan di wilayah Jabodetabek	Dokumen	1

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(SP) SASARAN PROGRAM BPTJ	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
		IKK11	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelayanan prasarana perkeretaapian di Jabodetabek	Dokumen	1
		IKK18	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi atas pembangunan dan pengembangan kawasan berorientasi transit di wilayah Jabodetabek	Dokumen	1
		IKK54	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengembangan jaringan lintas angkutan barang jalan, perairan dan perkeretaapian di Jabodetabek	Dokumen	2
		IKK55	Tersusunnya Dokumen Perencanaan jaringan lintas angkutan barang jalan, perairan dan perkeretaapian di Jabodetabek	Dokumen	1
SS2 Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi	SP2 Menurunnya angka kecelakaan yang melibatkan angkutan umum di wilayah Jabodetabek	IKP2 Persentase penurunan jumlah kecelakaan dengan menggunakan angkutan umum di wilayah Jabodetabek		%	10,8
		IKK33	Terselenggaranya Pengadaan, pemasangan fasilitas perlengkapan jalan Nasional di wilayah Jabodetabek	Laporan	12
			Rambu	%	62,50
			Penerangan Jalan	%	62,74
			RPPJ	%	65,71

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(SP) SASARAN PROGRAM BPTJ	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
			Marka	%	60,52
			Warning Light	%	61,40
			Cermin Tikung	%	0,00
			Paku Jalan	%	0,00
		IKK34	Terselenggaranya pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan Nasional di wilayah Jabodetabek	Laporan	1
		IKK44	Terlaksananya pembinaan pengusaha angkutan umum jalan, perairan dan perkeretaapian di wilayah Jabodetabek	Laporan	2
		IKK63	Pelaksanaan pengawasan SPM operasional terminal, stasiun, dan pelabuhan angkutan perairan	Kegiatan	1
		IKK64	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan angkutan	Laporan	2
		IKK67	Pembinaan keselamatan sarana angkutan orang dan barang di wilayah Jabodetabek	Laporan	1
SS3 Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	SP3 Meningkatnya kecepatan rata-rata kendaraan umum pada jam puncak di wilayah Jabodetabek	IKP3 Kecepatan rata-rata kendaraan umum pada jam puncak di wilayah Jabodetabek		Km/Jam	17
		IKK29	Tersusunnya Perencanaan; fasilitas perlengkapan jalan Nasional di wilayah Jabodetabek	Laporan	1

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(SP) SASARAN PROGRAM BPTJ	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
		IKK30	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Ruas dan Simpang Jalan Nasional di wilayah Jabodetabek	Laporan	1
		IKK31	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Lalu Lintas di Jalan Nasional Wilayah Jabodetabek.	Laporan	1
		IKK32	Terlaksana nya pembinaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di wilayah Jabodetabek.	Laporan	2
SS4 Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi	SP1 Meningkatnya peran moda angkutan umum perkotaan di Wilayah Jabodetabek	IKP1 <i>Modal share</i> (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek		%	32
		IKK9	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan prasarana dan fasilitas pendukung perkeretaapian di Jabodetabek	Dokumen	5
		IKK10	Tersusunnya dokumen NSPK perkeretaapian di Wilayah Jabodetabek	Dokumen	2
		IKK47	Tersusunnya dokumen Perencanaan pengembangan jaringan trayek transportasi jalan dan perairan di Jabodetabek	Trayek	20

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(SP) SASARAN PROGRAM BPTJ	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
	SP6 Meningkatnya integrasi antarmoda transportasi di Kawasan perkotaan Jabodetabek	IKP6 Rasio jumlah fasilitas integrasi antarmoda transportasi yang telah selesai direncanakan		%	15
		IKK19	Tersusunnya dokumen perencanaan Kawasan Berbasis Angkutan Massal di wilayah Jabodetabek.	Dokumen	4
		IKK23	Terlaksananya bimbingan dan bantuan teknis tentang fasilitas integrasi simpul di wilayah Jabodetabek	Dokumen	2
		IKK24	Tersusunnya dokumen perencanaan Integrasi Simpul Transportasi di wilayah Jabodetabek	Dokumen	1
		IKK36	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pengembangan Jaringan Kereta Api Perkotaan di Jabodetabek	Dokumen	1
		IKK37	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Sistem Operasi dan Lintas Pelayanan KA Perkotaan di Wilayah Jabodetabek	Laporan	1
SS6 Terlaksananya perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan transportasi	SP4 Meningkatnya kinerja pelaksanaan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ)	IKP4 Persentase muatan RITJ yang telah dilaksanakan		%	24
		IKK94	Jumlah dokumen evaluasi terkait pelaksanaan perencanaan dan program	Laporan	1

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(SP) SASARAN PROGRAM BPTJ	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SS9 Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemenhub	SP7 Meningkatnya pengawasan atas izin/rekomendasi yang dikeluarkan BPTJ	IKP7 Persentase izin/rekomendasi yang telah diawasi		%	90
		IK27	Tersedianya penilaian dan pemberian rekomendasi analisis dampak lalu lintas di Jalan Nasional Wilayah Jabodetabek	Lokasi	22
		IK28	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi analisis dampak lalu lintas di Jabodetabek	Laporan	2
		IKK43	Tersedianya dokumen perizinan angkutan umum jalan dan perairan di wilayah Jabodetabek	Dokumen (KP izin)	16.620
		IKK65	Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan angkutan di wilayah Jabodetabek	Laporan	1
SS11 Terwujudnya <i>Good & Clean Government</i> di Kemenhub	SP8 Meningkatnya kinerja peningkatan kompetensi pegawai BPTJ	IKP8 Rasio jumlah pegawai BPTJ yang telah mengikuti diklat		Orang	25
		IKK77	Jumlah kepersertaan pegawai dalam mengikuti diklat/bimtek sesuai bidangnya	Orang	25
		IKK78	Jumlah pegawai yang memperoleh sertifikat kelulusan mengikuti diklat/bimtek sesuai bidang	Orang	25

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(SP) SASARAN PROGRAM BPTJ	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
	SP9 Tersedianya informasi valid, handal, dan mudah diakses di Lingkungan BPTJ	IKP9 Persentase sistem informasi yang telah dikembangkan di lingkungan BPTJ		%	20
		IKK41	Terselenggaranya Intelligent Transport System (ITS) di wilayah Jabodetabek.	Laporan	2
		IKK42	Terciptanya Pengembangan teknologi bidang lalu lintas di wilayah Jabodetabek	Laporan	3
		IKK46	Tersusunnya dokumen monitoring dan evaluasi pengembangan jaringan trayek transportasi jalan dan perairan di Jabodetabek	Dokumen	2
		IKK45	Terlaksananya Pengelolaan operasional terminal angkutan umum berbasis jalan dan perairan	Laporan	1
		IKK66	Tersedianya Sistem Informasi Manajemen (SIM) pengawasan angkutan di wilayah Jabodetabek	Dokumen	2
		IKK79	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Bagi Masyarakat Umum	Kegiatan	1
		IKK80	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Penyusunan Materi Publikasi (Non Pemberitaan)	Laporan	1

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(SP) SASARAN PROGRAM BPTJ	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
		IKK81	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Penyusunan Dokumentasi	Laporan	1
		IKK82	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan Website BPTJ	Kegiatan	1
		IKK83	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Hubungan Media	Laporan	1
		IKK84	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan Media Sosial dan Jejaring Komunikasi	Laporan	1
		IKK85	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Analisis Berita dan Opini Publik dan Penyelenggaraan Strategi Komunikasi	Laporan	1
	SP10 Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan BPTJ	IKP10 Nilai AKIP BPTJ		Nilai	88
		IKK86	Jumlah rancangan peraturan perundangundangan yang disusun	Peraturan	5
		IKK87	Tersusunnya himpunan peraturan di bidang transportasi Jabodetabek	Laporan	1
		IKK88	Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundangan	Laporan	3

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(SP) SASARAN PROGRAM BPTJ	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
		IKK89	Jumlah rancangan kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama dala negeri dan luar negeri dalam rangka kerjasama di bidang transportasi	Dokumen	6
		IKK90	Jumlah kegiatan advokasi hukum di bidang transportasi	Kegiatan	2
		IKK91	Pemenuhan kebutuhan layanan perkantoran BPTJ	Bulan	12
		IKK92	Nilai AKIP BPTJ	Nilai	88
		IKK93	Jumlah dokumen yang disusun untuk melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan jangka pendek, menengah, jangka panjang, serta program	Laporan	6
		IKK94	Jumlah dokumen evaluasi terkait pelaksanaan perencanaan dan program	Laporan	4
	SP11 Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan di lingkungan BPTJ	IKP11 Persentase penyerapan anggaran BPTJ		%	97
		IKK62	Tersusunnya Dokumen Perencanaan sumber, pemanfaatan dan pengelolaan pendanaan angkutan wilayah Jabodetabek	Dokumen	2
		IKK95	Jumlah dokumen yang disusun untuk memenuhi	Laporan	2

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(SP) SASARAN PROGRAM BPTJ	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
			kebutuhan laporan SIMAK BMN		
		IKK96	Jumlah Dokumen yang disusun untuk memenuhi kebutuhan laporan keuangan	Laporan	3
		IKK97	Jumlah dokumen yang disusun untuk memenuhi kebutuhan laporan PNPB	Laporan	12
		IKK98	Jumlah dokumen yang disusun untuk memenuhi kebutuhan laporan daya serap	Laporan	12
		IKK99	Jumlah dokumen yang disusun untuk memenuhi kebutuhan laporan administrasi pembendaharaan	Laporan	12
		IKK 100	Tingkat penyerapan anggaran	%	97

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)
NO	PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK	162.690.564.000
1	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	67.782.100.000
2	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Transportasi Jabodetabek	51.424.015.000
3	Peningkatan, Penyediaan serta Pengembangan Lalu Lintas di Wilayah Jabodetabek	30.428.026.000
4	Peningkatan, Penyediaan Pelayanan Angkutan Orang, Angkutan barang serta Pengawasan Angkutan di Wilayah Jabodetabek	13.056.423.000

Jakarta

2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Menteri Perhubungan

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Budi Karya Sumadi

Ir. Bambang Prihartono, MSCE

Keterangan	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
Dikonsep	Tri Adi Bagus Wibowo	Kabag Perencanaan dan Evaluasi		
Diperiksa	Hindro Surahmat	Sekretaris Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek		
Diperiksa	Heru Wisnu	Direktur Prasarana		
Diperiksa	Karlo Manik	Direktur Lalu Lintas		
Diperiksa	Aca Mulyana	Direktur Angkutan		

KATA PENGANTAR

Sebagai upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, maka disusunlah dokumen Revisi Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2019. Revisi Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan Tahun 2019 disusun dengan memperhatikan dokumen Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2016-2019 dan dokumen Revisi DIPA Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2019 sehubungan dengan Reorganisasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek berdasarkan PM 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Dokumen Revisi Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2019 ini merupakan dokumen pernyataan kesepakatan kinerja antara Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dan Menteri Perhubungan untuk mewujudkan target kinerja di Tahun 2019. Dokumen ini memuat sasaran strategis, program/kegiatan utama beserta target kinerja dan anggaran.

Diharapkan Revisi Perjanjian Kinerja ini dapat menjadi pedoman untuk pelaksanaan kegiatan program tahun 2019 di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

Jakarta, 2019

KEPALA
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK



Ir. BAMBANG PRIHARTONO, MSCE

Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19600825 198811 1 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. BAMBANG PRIHARTONO, MSCE

Jabatan : Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : BUDI KARYA SUMADI

Jabatan : Menteri Perhubungan

Selaku atasan langsung Pihak pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2019

Pihak Kedua,

Menteri Perhubungan

Budi Karya Sumadi

Pihak Pertama

**Kepala
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek**

Ir. Bambang Prihartono, MSCE

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK
TAHUN 2019

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(SP) SASARAN PROGRAM BPTJ	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SS1 Mewujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas nasional dan peningkatan angkutan.	SP5 Meningkatnya cakupan pelayanan angkutan umum di kawasan perkotaan Jabodetabek	IKP5 Rasio panjang jalan nasional yang terlayani oleh jaringan angkutan umum perkotaan		%	70
		IKK1	Terlaksananya monitoring dan evaluasi SPM simpul dan Fasilitas Pendukung transportasi darat di Jabodetabek	Dokumen	1
		IKK2	Terlaksananya peningkatan pengetahuan teknis tentang Transportasi Darat	Dokumen	1
		IKK3	Tersusunnya dokumen perencanaan Terminal Tipe A di wilayah Jabodetabek	Dokumen	4
		IKK4	Terlaksananya pembangunan/ perawatan/pengembangan prasarana transportasi darat dan fasilitas pendukung di wilayah Jabodetabek	Dokumen	1
		IKK5	Tersusunnya dokumen evaluasi atas pembangunan dan pengembangan Transportasi Jalan di wilayah Jabodetabek	Dokumen	1

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(SP) SASARAN PROGRAM BPTJ	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
		IKK11	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelayanan prasarana perkeretaapian di Jabodetabek	Dokumen	1
		IKK18	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi atas pembangunan dan pengembangan kawasan berorientasi transit di wilayah Jabodetabek	Dokumen	1
		IKK54	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengembangan jaringan lintas angkutan barang jalan, perairan dan perkeretaapian di Jabodetabek	Dokumen	2
		IKK55	Tersusunnya Dokumen Perencanaan jaringan lintas angkutan barang jalan, perairan dan perkeretaapian di Jabodetabek	Dokumen	1
SS2 Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi	SP2 Menurunnya angka kecelakaan yang melibatkan angkutan umum di wilayah Jabodetabek	IKP2 Persentase penurunan jumlah kecelakaan dengan menggunakan angkutan umum di wilayah Jabodetabek		%	10,8
		IKK33	Terselenggaranya Pengadaan, pemasangan fasilitas perlengkapan jalan Nasional di wilayah Jabodetabek	Laporan	12
			Rambu	%	62,50
			Penerangan Jalan	%	62,74
			RPPJ	%	65,71

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(SP) SASARAN PROGRAM BPTJ	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
			Marka	%	60,52
			Warning Light	%	61,40
			Cermin Tikung	%	0,00
			Paku Jalan	%	0,00
		IKK34	Terselenggaranya pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan Nasional di wilayah Jabodetabek	Laporan	1
		IKK44	Terlaksananya pembinaan perusahaan angkutan umum jalan, perairan dan perkeretaapian di wilayah Jabodetabek	Laporan	2
		IKK63	Pelaksanaan pengawasan SPM operasional terminal, stasiun, dan pelabuhan angkutan perairan	Kegiatan	1
		IKK64	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan angkutan	Laporan	2
		IKK67	Pembinaan keselamatan sarana angkutan orang dan barang di wilayah Jabodetabek	Laporan	1
SS3 Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	SP3 Meningkatnya kecepatan rata-rata kendaraan umum pada jam puncak di wilayah Jabodetabek	IKP3 Kecepatan rata-rata kendaraan umum pada jam puncak di wilayah Jabodetabek		Km/Jam	17
		IKK29	Tersusunnya Perencanaan; fasilitas perlengkapan jalan Nasional di wilayah Jabodetabek	Laporan	1

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(SP) SASARAN PROGRAM BPTJ	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
		IKK30	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Ruas dan Simpang Jalan Nasional di wilayah Jabodetabek	Laporan	1
		IKK31	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Lalu Lintas di Jalan Nasional Wilayah Jabodetabek.	Laporan	1
		IKK32	Terlaksana nya pembinaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di wilayah Jabodetabek.	Laporan	2
SS4 Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi	SP1 Meningkatnya peran moda angkutan umum perkotaan di Wilayah Jabodetabek	IKP1 <i>Modal share</i> (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek		%	32
		IKK9	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan prasarana dan fasilitas pendukung perkeretaapian di Jabodetabek	Dokumen	5
		IKK10	Tersusunnya dokumen NSPK perkeretaapian di Wilayah Jabodetabek	Dokumen	2
		IKK47	Tersusunnya dokumen Perencanaan pengembangan jaringan trayek transportasi jalan dan perairan di Jabodetabek	Trayek	20

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(SP) SASARAN PROGRAM BPTJ	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
	SP6 Meningkatnya integrasi antarmoda transportasi di Kawasan perkotaan Jabodetabek	IKP6 Rasio jumlah fasilitas integrasi antarmoda transportasi yang telah selesai direncanakan		%	15
		IKK19	Tersusunnya dokumen perencanaan Kawasan Berbasis Angkutan Massal di wilayah Jabodetabek.	Dokumen	4
		IKK23	Terlaksananya bimbingan dan bantuan teknis tentang fasilitas integrasi simpul di wilayah Jabodetabek	Dokumen	2
		IKK24	Tersusunnya dokumen perencanaan Integrasi Simpul Transportasi di wilayah Jabodetabek	Dokumen	1
		IKK36	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pengembangan Jaringan Kereta Api Perkotaan di Jabodetabek	Dokumen	1
		IKK37	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Sistem Operasi dan Lintas Pelayanan KA Perkotaan di Wilayah Jabodetabek	Laporan	1
SS6 Terlaksananya perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan transportasi	SP4 Meningkatnya kinerja pelaksanaan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ)	IKP4 Persentase muatan RITJ yang telah dilaksanakan		%	24
		IKK94	Jumlah dokumen evaluasi terkait pelaksanaan perencanaan dan program	Laporan	1

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(SP) SASARAN PROGRAM BPTJ	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SS9 Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemenhub	SP7 Meningkatnya pengawasan atas izin/rekomendasi yang dikeluarkan BPTJ	IKP7 Persentase izin/rekomendasi yang telah diawasi		%	90
		IK27	Tersedianya penilaian dan pemberian rekomendasi analisis dampak lalu lintas di Jalan Nasional Wilayah Jabodetabek	Lokasi	22
		IK28	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi analisis dampak lalu lintas di Jabodetabek	Laporan	2
		IKK43	Tersedianya dokumen perizinan angkutan umum jalan dan perairan di wilayah Jabodetabek	Dokumen (KP izin)	16.620
		IKK65	Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan angkutan di wilayah Jabodetabek	Laporan	1
SS11 Terwujudnya <i>Good & Clean Government</i> di Kemenhub	SP8 Meningkatnya kinerja peningkatan kompetensi pegawai BPTJ	IKP8 Rasio jumlah pegawai BPTJ yang telah mengikuti diklat		Orang	25
		IKK77	Jumlah kepersertaan pegawai dalam mengikuti diklat/bimtek sesuai bidangnya	Orang	25
		IKK78	Jumlah pegawai yang memperoleh sertifikat kelulusan mengikuti diklat/bimtek sesuai bidang	Orang	25

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(SP) SASARAN PROGRAM BPTJ	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
	SP9 Tersedianya informasi valid, handal, dan mudah diakses di Lingkungan BPTJ	IKP9 Persentase sistem informasi yang telah dikembangkan di lingkungan BPTJ		%	20
		IKK41	Terselenggaranya Intelligent Transport System (ITS) di wilayah Jabodetabek.	Laporan	2
		IKK42	Terciptanya Pengembangan teknologi bidang lalu lintas di wilayah Jabodetabek	Laporan	3
		IKK46	Tersusunnya dokumen monitoring dan evaluasi pengembangan jaringan trayek transportasi jalan dan perairan di Jabodetabek	Dokumen	2
		IKK45	Terlaksananya Pengelolaan operasional terminal angkutan umum berbasis jalan dan perairan	Laporan	1
		IKK66	Tersedianya Sistem Informasi Manajemen (SIM) pengawasan angkutan di wilayah Jabodetabek	Dokumen	2
		IKK79	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Bagi Masyarakat Umum	Kegiatan	1
		IKK80	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Penyusunan Materi Publikasi (Non Pemberitaan)	Laporan	1

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(SP) SASARAN PROGRAM BPTJ	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
		IKK81	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Penyusunan Dokumentasi	Laporan	1
		IKK82	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan Website BPTJ	Kegiatan	1
		IKK83	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Hubungan Media	Laporan	1
		IKK84	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan Media Sosial dan Jejaring Komunikasi	Laporan	1
		IKK85	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Analisis Berita dan Opini Publik dan Penyelenggaraan Strategi Komunikasi	Laporan	1
	SP10 Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan BPTJ	IKP10 Nilai AKIP BPTJ		Nilai	88
		IKK86	Jumlah rancangan peraturan perundangundangan yang disusun	Peraturan	5
		IKK87	Tersusunnya himpunan peraturan di bidang transportasi Jabodetabek	Laporan	1
		IKK88	Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundangan	Laporan	3

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(SP) SASARAN PROGRAM BPTJ	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
		IKK89	Jumlah rancangan kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama dala negeri dan luar negeri dalam rangka kerjasama di bidang transportasi	Dokumen	6
		IKK90	Jumlah kegiatan advokasi hukum di bidang transportasi	Kegiatan	2
		IKK91	Pemenuhan kebutuhan layanan perkantoran BPTJ	Bulan	12
		IKK92	Nilai AKIP BPTJ	Nilai	88
		IKK93	Jumlah dokumen yang disusun untuk melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan jangka pendek, menengah, jangka panjang, serta program	Laporan	6
		IKK94	Jumlah dokumen evaluasi terkait pelaksanaan perencanaan dan program	Laporan	4
	SP11 Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan di lingkungan BPTJ	IKP11 Persentase penyerapan anggaran BPTJ		%	97
		IKK62	Tersusunnya Dokumen Perencanaan sumber, pemanfaatan dan pengelolaan pendanaan angkutan wilayah Jabodetabek	Dokumen	2
		IKK95	Jumlah dokumen yang disusun untuk memenuhi	Laporan	2

(SS) SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	(SP) SASARAN PROGRAM BPTJ	(IKP) INDIKATOR KINERJA PROGRAM BPTJ/ (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
			kebutuhan laporan SIMAK BMN		
		IKK96	Jumlah Dokumen yang disusun untuk memenuhi kebutuhan laporan keuangan	Laporan	3
		IKK97	Jumlah dokumen yang disusun untuk memenuhi kebutuhan laporan PNBPN	Laporan	12
		IKK98	Jumlah dokumen yang disusun untuk memenuhi kebutuhan laporan daya serap	Laporan	12
		IKK99	Jumlah dokumen yang disusun untuk memenuhi kebutuhan laporan administrasi pembendaharaan	Laporan	12
		IKK 100	Tingkat penyerapan anggaran	%	97

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)
NO	PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK	162.690.564.000
1	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	67.782.100.000
2	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Transportasi Jabodetabek	51.424.015.000
3	Peningkatan, Penyediaan serta Pengembangan Lalu Lintas di Wilayah Jabodetabek	30.428.026.000
4	Peningkatan, Penyediaan Pelayanan Angkutan Orang, Angkutan barang serta Pengawasan Angkutan di Wilayah Jabodetabek	13.056.423.000

Jakarta

2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Menteri Perhubungan

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Budi Karya Sumadi

Ir. Bambang Prihartono, MSCE